



# STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## VILLAGE POTENTIAL STATISTICS OF KEPULAUAN RIAU PROVINCE

Volume 4, 2024

2024



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
BPS-STATISTICS KEPULAUAN RIAU PROVINCE



# STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

*VILLAGE POTENTIAL STATISTICS OF  
KEPULAUAN RIAU PROVINCE*

Volume 4, 2024

2024



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
BPS-STATISTICS KEPULAUAN RIAU PROVINCE

**Statistik Potensi Desa Provinsi Kepulauan Riau 2024**

*Village Potential Statistics of Kepulauan Riau Province 2024*

**Volume 4, 2024**

**Katalog/Catalogue: 1105014.21**

**Nomor Publikasi/Publication Number: 21000.24052**

**Ukuran Buku/Book Size: 19 Cm x 27 Cm**

**Jumlah Halaman/Number of Pages: xxvi+238 Halaman/Pages**

**Penyusun Naskah/Manuscript Drafter:**

**BPS Provinsi Kepulauan Riau**

*BPS-Statistics Kepulauan Riau Province*

**Penyunting/Editor:**

**BPS Provinsi Kepulauan Riau**

*BPS-Statistics Kepulauan Riau Province*

**Pembuat Kover/Cover Designer:**

**BPS Provinsi Kepulauan Riau**

*BPS-Statistics Kepulauan Riau Province*

**Sumber Ilustrasi/Illustration Source:**

**canva.com, freepik.com, unsplash.com**

**Diterbitkan oleh/Published by:**

**©Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau**

*BPS-Statistics Kepulauan Riau Province*

**Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.**

*It is prohibited reproduce and/ or duplicate part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Kepulauan Riau Province.*



# **TIM PENYUSUN/COMPILERS**

**STATISTIK POTENSI DESA 2024**  
**VILLAGE POTENTIAL STATISTICS OF INDONESIA 2024**  
**Volume 4, 2024**

**Pengarah/Director**

Margaretha Ari Anggorowati

**Penanggung Jawab/Person in Charge**

Dian Kartika Sari

**Penyunting/Editors**

• Edy Purnomo • Shafira Purwa Chandra Dewi

**Pengolah Data, Penulis Naskah, dan Penerjemah/Data Processors, Writers, and  
Translators**

• Arif Rachmatillah Amin • Oktaviani

**Penata Letak/Layout Designers**

Arif Rachmatillah Amin



# KATA PENGANTAR

Statistik Potensi Desa Provinsi Kepulauan Riau 2024 merupakan seri publikasi BPS yang terbit tiga kali dalam sepuluh tahun yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Provinsi Kepulauan Riau menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: Potensi Desa, Kerawanan Desa, dan Infrastruktur di Desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat provinsi merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat kabupaten/kota yang merupakan agregasi data tingkat kecamatan.

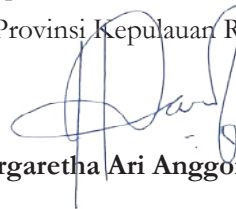
Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Podes 2024 hingga tersusunnya publikasi ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi di masa mendatang.

Tanjungpinang, Desember 2024

Kepala Badan Pusat Statistik

Provinsi Kepulauan Riau



**Margaretha Ari Anggorowati**

# **PREFACE**

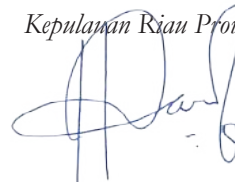
*Village Potential Statistics of Kepulauan Riau Province 2024 is a BPS publication series that is published three times in ten years which presents the results of the 2024 Village Potential Data Collection (Podes). This publication contains an overview of village-level government administration areas throughout Kepulauan Riau Province according to the potential of the village, the availability of infrastructure in the village, and also the challenges faced in the village.*

*The data and information presented in this publication are classified into: Village Potential, Village Vulnerability, and Village Infrastructure. Data and information presented at the national level are provincial level data aggregation. Meanwhile, a similar publication at regency/municipality level is also made which presents the aggregation of data at district level.*

*This publication is expected to be a reference for data and information of infrastructure and regional potential for development policy makers at the central and regional level, researchers, academics, and other various data users. Early detection and phenomenon of infrastructure availability and potential among regions are captured in the various tables presented in this publication.*

*We thank all those who have contributed in the success of completing the Podes 2024 publication. We welcome constructive criticism and suggestions from users of this publication to improve future editions of this publication.*

*Tanjungpinang, December 2024  
Acting Chief of BPS-Statistics  
Kepulauan Riau Province*



**Margaretha Ari Anggorowati**



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pusat Statistik telah melaksanakan pendataan Potensi Desa (Podes) 2024 pada bulan Mei 2024 secara sensus terhadap seluruh wilayah kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintah terendah setingkat desa. Adapun wilayah administrasi setingkat desa yang dicakup di Podes meliputi desa, kelurahan, nagari di Sumatera Barat, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait. Hasil pendataan Podes 2024 di Kepulauan Riau mencatat bahwa 430 wilayah administrasi pemerintah setingkat desa terdiri dari 286 desa dan 144 kelurahan. Selain itu diketahui pula jumlah kecamatan sebanyak 80 dan jumlah kabupaten/kota sebanyak 7.

Pendataan Podes 2024 mengumpulkan beragam informasi, baik yang bersifat potensi yang dimiliki desa/kelurahan maupun informasi terkait kerawanan atau tantangan yang dihadapi desa/kelurahan serta infrastruktur dasar di desa/kelurahan. Informasi terkait potensi desa/kelurahan meliputi : kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, olahraga dan hiburan, angkutan, komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Informasi terkait kerawanan atau tantangan meliputi bencana alam, pencemaran lingkungan, permasalahan sosial dan kesehatan di masyarakat, dan gangguan keamanan yang terjadi di desa/kelurahan. Informasi infrastruktur di desa/kelurahan meliputi: infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Hasil pendataan Podes 2024 menunjukkan sebagian besar desa/kelurahan di Kepulauan Riau masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu 301 desa/kelurahan. Selain itu, ada 48 desa/kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang industri pengolahan, dan ada 31 desa/kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Banyaknya masyarakat desa/kelurahan yang bekerja di bidang pertanian di Kepulauan Riau didukung keberadaan sungai, saluran irigasi dan embung yang berada di desa/kelurahan. Dari 430 desa/kelurahan di Kepulauan Riau ada 152 desa/kelurahan yang terdapat sungai, ada 16 desa/kelurahan yang terdapat saluran irigasi, dan ada 37 desa/kelurahan yang terdapat embung.

Pendataan Podes 2024 menunjukkan potensi ekonomi yang dimiliki desa/kelurahan, terdapat 218 desa/kelurahan yang memiliki produk barang unggulan dan sebanyak 44 desa/kelurahan yang mengeksport produk unggulannya ke negara lain. Dalam mendukung Bergeraknya perekonomian tidak hanya ditunjang oleh sarana fisik, namun dukungan fasilitas perkreditan dan fasilitas jaringan telekomunikasi menjadi penting di masa kini agar geliat pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Hasil Podes 2024 menunjukkan terdapat 246 desa/kelurahan memiliki Kredit Usaha Rakyat (KUR), ada 157 desa/kelurahan memiliki Kredit Usaha Bersama (KUBE), ada 40 desa/kelurahan memiliki Kredit Usaha Kecil (KUK). Fasilitas jaringan telekomunikasi yang dicakup di Podes yaitu keberadaan Base Transceiver Station (BTS), sinyal telepon seluler, dan sinyal internet

telepon seluler/handphone. Terdapat 430 desa/kelurahan yang ada sinyal telepon selular, namun 101 desa/kelurahan kekuatan sinyalnya lemah.

Pendataan Podes 2024 mencatat terdapat 23 desa/kelurahan terjadi pencemaran air di wilayahnya, tidak terdapat desa/kelurahan terjadi pencemaran tanah di wilayahnya, dan terdapat 23 desa/kelurahan terjadi pencemaran udara di wilayahnya. Selain kejadian pencemaran, Podes 2024 menunjukkan kejadian bencana alam di wilayah desa/kelurahan, dimana ada 78 desa/kelurahan terjadi bencana gelombang pasang laut di wilayahnya, ada 74 desa/kelurahan terjadi bencana banjir di wilayahnya, dan ada 32 desa/kelurahan terjadi bencana tanah longsor di wilayahnya.

Pendataan Podes 2024 juga menyajikan berbagai informasi terkait ketersediaan infrastruktur berbagai bidang di Indonesia. Pada bidang pendidikan, di jenjang sekolah dasar diketahui bahwa ada 965 SD Negeri dan Swasta, dan ada 77 MI Negeri dan Swasta yang tersebar di desa/kelurahan di Kepulauan Riau. Pada jenjang sekolah menengah pertama, ada 398 SMP Negeri dan Swasta dan 76 MTs Negeri dan Swasta yang tersebar di desa/kelurahan di Kepulauan Riau. Pada jenjang sekolah menengah atas ada 157 SMA Negeri dan Swasta, ada 42 MA Negeri dan Swasta, ada 99 SMK Negeri dan Swasta yang tersebar di desa/kelurahan di Kepulauan Riau. Pada jenjang akademi/ perguruan tinggi ada 5 akademi/ perguruan tinggi negeri dan ada 53 akademi/ perguruan tinggi swasta di Kepulauan Riau. Pada bidang kesehatan, Podes 2024 menunjukkan terdapat 34 rumah sakit dan 4 rumah sakit bersalin di Kepulauan Riau, dimana Kota Batam adalah wilayah kabupaten/kota yang memiliki rumah sakit dan rumah sakit bersalin terbanyak di Kepulauan Riau yaitu 19 rumah sakit dan 4 rumah sakit bersalin. Selain rumah sakit, jumlah fasilitas puskesmas Kepulauan Riau berdasarkan Podes 2024 sebanyak 38 puskesmas rawat inap dan 62 puskesmas tanpa rawat inap.

Pemerintah memprioritaskan pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hasil Pendataan Podes dapat digunakan sebagai bahan analisis kewilayahan terkait potensi ekonomi, sosial dan sarana/prasarana wilayah. Selain itu juga dapat digunakan dalam evaluasi program dan digunakan dalam penyusunan kebijakan/strategi berbasis kewilayahan.

# EXECUTIVE SUMMARY

Statistics Indonesia has carried out data collection on Village Potential (Podes) 2024 in May 2024 in a census of all regency/ municipalities, subdistricts, and the lowest government administrative areas at the village level. The village-level administrative areas covered by Podes include villages, subdistricts, nagari in West Sumatra, the Transmigration Settlement Unit (UPT), and the Transmigration Settlement Unit (SPT) which are still being fostered by the relevant ministries. The results of the 2024 Podes data collection in Kepulauan Riau noted that 430 government administrative areas at the village level consisted of 286 villages and 144 subdistricts. In addition, it is also known that the number of subdistricts is 80 and the number of regencies/ cities is 7.

Podes 2024 collects a variety of information, both those are potential for villages/ subdistricts, information related to vulnerabilities or challenges faced by villages/ subdistricts, and basic infrastructure in village/ subdistrict. Information related to the potential of the village/ subdistrict includes: demography and employment, settlement and environment, education, health, socio-culture, sports and entertainment, transportation, communication and information, economy, security, development and empowerment of the village/ subdistrict community. Information related to vulnerabilities or challenges includes natural disasters, environmental pollution, social and health problems in the community, and security disturbances that occur in villages/ subdistricts. Infrastructure information in villages/ subdistricts includes: education, health and economic infrastructure.

The results of Podes 2024 shows that most of the villages/ subdistricts in Kepulauan Riau have people working in agriculture, forestry and fisheries, namely 301 villages/ subdistricts. In addition, there are 48 villages/ subdistricts where most of the people work in manufacturing industry, and there are 31 villages/ subdistricts where most of the people work in wholesale and retail trade; repair of motor vehicle and motorcycles. The number of village/ subdistrict communities working in agriculture in Kepulauan Riau is supported by the presence of rivers, irrigation canals and reservoirs located in villages/ subdistricts. Of the 430 villages/ subdistricts in Kepulauan Riau, there are 152 villages/ subdistricts with rivers, 16 villages/ subdistricts with irrigation canals, and 37 villages/ subdistricts with embung.

Podes 2024 shows the economic potential of villages/ subdistricts, there are 218 villages/ subdistricts that have superior goods products and as many as 44 villages/ subdistricts that export their superior products to other countries. In supporting the movement of the economy, it is not only supported by physical facilities, but the support of credit facilities and telecommunication network facilities is important nowadays so that economic growth can be carried out faster. The results of Podes 2024 show that 246 villages/ subdistricts have People's Business Credit (KUR), 157 villages/ subdistricts have Joint Business Credit (KUBE), 40 villages/ subdistricts have Small Business Credit (KUK). The telecommunication network facilities covered by the Podes include the presence of a Base Transceiver Station (BTS), cellular phone signals, and cellular/ mobile phone internet signals. There are 430 villages/ subdistricts that have a cellular phone signal, but 14.766 villages/ subdistricts have weak signal strength.

Podes 2024 noted that there were 23 villages/ subdistricts where water pollution occurred in their territory, there were no villages/ subdistricts where soil pollution occurred in their territory, and there were 23 villages/ subdistricts where air pollution occurred in their territory. In addition to pollution incidents, Podes 2024 shows

*natural disasters in the village/subdistrict area, of which 78 villages/subdistricts experienced tides in their area, 74 villages/subdistricts experienced floods in their area, and 32 villages/subdistricts experienced landslides in its territory.*

*Podes 2024 also provides various information related to the availability of infrastructure in various fields in Indonesia. In the field of education, at the elementary school level, it is known that there are 965 public and private elementary schools, and 77 public and private MI spread across villages/subdistricts in Kepulauan Riau. At the junior high school level, there are 398 public and private junior high schools and 76 public and private MTs spread across villages/subdistricts in Kepulauan Riau. At the high school level, there are 157 public and private SMAs, 42 public and private MAs, 99 public and private SMKs spread across villages/subdistricts in Kepulauan Riau. At the academy/college level, there are 5 public academies/universities and there are 53 private academies/universities in Kepulauan Riau. In the health sector, Podes 2024 shows that there are 34 hospitals and 4 maternity hospitals in Kepulauan Riau, of which the municipality of Batam is the regency/municipality that has the most hospitals and maternity hospitals in Kepulauan Riau, namely 19 hospitals and 4 maternity hospitals. In addition to hospitals, the number of Kepulauan Riau Public Health Center (Puskesmas) facilities based on the 2024 Podes is 38 inpatient health centers and 62 health centers without hospitalization.*

*The government prioritizes Indonesia's development from the periphery by strengthening regions and villages within the framework of a unitary state. The results of Podes 2024 can be used as material for regional analysis related to the economic, social and regional facilities/infrastructure potential. In addition, it can also be used in program evaluation and used in the formulation of regional-based policies/strategies.*

<https://kepulauanriau.go.id>

# DAFTAR ISI/CONTENTS

## STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2024 VILLAGE POTENTIAL STATISTICS OF KEPULAUAN RIAU PROVINCE 2024

Volume 4, 2024

Halaman/Page

Kata Pengantar/ <i>Preface</i> .....	v
Ringkasan Eksekutif/ <i>Executive Summary</i> .....	vii
Daftar Isi/ <i>Contents</i> .....	xi
Daftar Tabel/ <i>List of Tables</i> .....	xiii
Penjelasan Teknis Pendataan Potensi Desa 2024/ <i>Technical Notes of Village Potential Census 2024</i> .....	xxiii
1. Keterangan Umum Desa/ <i>General Information of The Village</i> .....	1
2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan/ <i>Demography and Employment</i> .....	15
3. Perumahan dan Lingkungan/ <i>Settlement and Environment</i> .....	29
4. Pendidikan dan Kesehatan/ <i>Education and Health</i> .....	47
5. Sosial dan Budaya/ <i>Social and Culture</i> .....	61
6. Hiburan dan Olahraga/ <i>Entertainment and Sport</i> .....	69
7. Angkutan, Komunikasi, dan Informasi/ <i>Transportation, Communication, and Information</i> .....	75
8. Kegiatan dan Sarana Keamanan/ <i>Security Activities and Facilities</i> .....	89
9. Sarana Ekonomi dan Industri/ <i>Economic and Industry Facilities</i> .....	95
10. Keuangan dan Aset Desa / <i>Village Financial and Assets</i> .....	113
11. Perlindungan Sosial dan Stunting/ <i>Social Protection and Stunting</i> .....	121
12. Keterangan Pemerintah Desa/Kelurahan/ <i>Village Government Information</i> .....	129
13. Permukiman di Daerah Rawan/ <i>Settlement in Vulnerable Areas</i> .....	141
14. Pencemaran Lingkungan Hidup/ <i>Environmental Pollution</i> .....	147
15. Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam/ <i>Anticipation and Incidence of Natural Disaster</i> .....	155
16. Permasalahan Kesehatan di Masyarakat/ <i>Public Health Problems</i> .....	163
17. Permasalahan Sosial/ <i>Social Problems</i> .....	173
18. Gangguan Keamanan/ <i>Security Disturbance</i> .....	179
19. Infrastruktur Pendidikan/ <i>Education Infrastructure</i> .....	189
20. Infrastruktur Kesehatan/ <i>Health Infrastructure</i> .....	197
21. Infrastruktur Ekonomi/ <i>Economy Infrastructure</i> .....	205
Daftar Pustaka/ <i>Bibliography</i> .....	215
Lampiran/ <i>Appendix</i> .....	217





# DAFTAR TABEL/*LIST OF TABLES*

Tabel/*Tables*

Halaman/*Pages*

<b>1.</b>	<b>Keterangan Umum Desa/<i>General Information of The Village</i></b>	
1.1	Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Kabupaten/Kota <i>Number of Governmental Administrative Regions by regency/ municipality.....</i>	7
1.2.	Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Klasifikasi Pemerintahan <i>Number of The Lowest Governmental Administrative Regions by Governmental Classification</i>	8
1.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Kantor Kepala Desa/Lurah <i>Number of Villages/ Subdistricts by Presence of Villages/ Subdistricts Office.....</i>	9
1.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Topografi Wilayah <i>Number of Villages/ Subdistricts by Topography of Area.....</i>	11
1.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan dan Keberadaan Tanaman Mangrove <i>Number of Villages/ Subdistricts by Village Location to Forest Area and Availability of Mangrove .....</i>	12
1.6	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Desa Terhadap Laut <i>Number of Villages/ Subdistricts by Location of Village Toward The Sea.....</i>	13
<b>2.</b>	<b>Kependudukan dan Ketenagakerjaan/<i>Demography and Employment</i></b>	
2.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk <i>Number of Villages/ Subdistricts by Main Income Source of The Majority of Population.....</i>	23
2.2	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Sebagian Besar Penduduknya Bekerja Pada Sektor Pertanian Menurut Jenis Sub Sektor Utama <i>Number of Villages/ Subdistricts That The Majority of Population Work in Agricultural Sector by Main Type of Sub-Sector.....</i>	27
2.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Agen Pengerahan PMI/TKI <i>Number of Villages/ Subdistricts by Presence of Indonesian Migrant Worker and Agent of Indonesian Migrant Worker .....</i>	28
<b>3.</b>	<b>Perumahan dan Lingkungan/<i>Settlement and Environment</i></b>	
3.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Sumber Penerangan Jalan Utama Desa <i>Number of Villages/ Subdistricts by Presence of Family of Electric Consumer and Source of Main</i>	

	<i>Street Illumination</i> .....	33
3.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak yang Digunakan Oleh Sebagian Besar Keluarga dan Keberadaan Agen/Penjual Bahan Bakar <i>Number of Villages/Subdistricts by Type of Cooking Fuel Used by Majority of Families and Availability of Agent/Seller of Fuel</i> .....	34
3.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga <i>Number of Villages/Subdistricts by Drinking Water Sources of Majority Families</i> .....	36
3.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga <i>Number of Villages/Subdistricts by Toilet Facility Usage of Majority Families</i> .....	38
3.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Tempat Pembuangan Sampah Sebagian Besar Keluarga dan Ketersediaan Tempat Penampungan Sementara <i>Number of Villages/Subdistricts by Type of Garbage Disposal Unit of Majority Families and Availability of Temporary Garbage Disposal Unit</i> .....	39
3.6	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kegiatan Pelestarian Lingkungan dan Pengolahan Sampah <i>Number Villages/Subdistricts by Environmental Conservation and Waste Processing Activities</i>	40
3.7	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sungai, Saluran Irigasi, Danau/Waduk/Situ/Bendungan, Embung, dan Mata Air <i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of River, Irrigation Channel, Lake/Dam/Reservoir, Embung, and Spring</i> .....	41
3.8	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Dilalui Sungai Menurut Jenis Penggunaan Sungai <i>Number of Villages/Subdistricts are Traversed The River by Type of River Use</i> .....	42
3.9	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Penggunaan Embung <i>Number of Villages/Subdistricts by Usage of Embung</i> .....	44
<b>4.</b>	<b>Pendidikan dan Kesehatan/Education and Health</b>	
4.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Pendidikan <i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Education Facility</i> .....	52
4.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Lembaga Keterampilan <i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Skills Courses</i> .....	54
4.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional, Kegiatan Pendidikan Paket A/B/C, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) <i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Illiterate Eradication Activity, A/B/C Educational Packages, and Communal Library</i> .....	55
4.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Kesehatan	

	<i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Health Facility</i> .....	56
4.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kegiatan Posyandu dan Posbindu <i>Number of Villages/Subdistricts by Integrated Health Post and Integrated Development Post Activities</i> .....	58
4.6	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Tenaga Kesehatan dan Dukun Bayi yang Tinggal di Desa/Kelurahan <i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Health Practitioner and Traditional Birth Attendant Who Live in The Village/Subdistricts</i> .....	59
<b>5.</b>	<b>Sosial dan Budaya/Social and Culture</b>	
5.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keragaman Agama, Suku/Etnis, dan Bahasa <i>Number of Villages/Subdistricts by Diversity of Religion, Ethnic, and Language</i> .....	64
5.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Tempat Ibadah <i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Places of Worship</i> .....	65
5.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kebiasaan Kegiatan Gotong Royong di Desa/Kelurahan Untuk Kepentingan Umum <i>Number of Villages/Subdistricts by The Habbits of Gotong Royong in The Villages/Subdistricts For Public Interest</i> .....	67
<b>6.</b>	<b>Hiburan dan Olahraga/Entertainment and Sport</b>	
6.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Ruang Publik Terbuka, Pub/Diskotek/Karaoke, dan Pusat Kebugaran <i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Open Public Space, Pub/Discotique/Karaoke, and Fitness Center</i> .....	72
6.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas/Lapangan Olahraga <i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Sports Facilities/Fields</i> .....	73
<b>7</b>	<b>Angkutan, Komunikasi, dan Informasi/Transportation, Communication, and Information</b>	
7.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Prasarana Transportasi dan Ketersediaan Angkutan Umum <i>Number of Villages/Subdistricts by Type of Transportation Infrastructure and Availability of Public Transportation</i> .....	80
7.2	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat atau Darat dan Air Menurut Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas <i>Number of Villages/Subdistricts Used Land or Land and Water Transportation Infrastructure by Type of The Widest Road Surface</i> .....	81

7.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS), Sinyal Telepon Seluler, dan Sinyal Internet Telepon Seluler/ <i>Handphone</i> <i>Number of Villages/Subdistricts by Existence of Base Transceiver Station (BTS), Cellular Phone Signal, and Internet Signal of Cellular Phone/Handphone</i> .....	82
7.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Komunikasi <i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Communication Facilities</i> .....	84
7.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Program Televisi dan Radio yang Dapat Diterima Warga <i>Number of Villages/Subdistricts by Television and Radio Programs That Can Be Received by People</i> .....	85
7.6	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Komputer dan Fasilitas Internet di Kantor Kepala Desa/Lurah <i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Computer and Internet Facility in Village/ Subdistrict Office</i> .....	87
<b>8.</b>	<b>Kegiatan dan Sarana Keamanan/<i>Security Activities and Facilities</i></b>	
8.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Selama Setahun Terakhir <i>Number of Villages/Subdistricts by Type of Citizen's Effort to Secure Community Within Last Year</i> .....	92
8.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat <i>Number of Villages/Subdistricts by Existence of Police Station and Easy Access to Nearest Police Station</i> .....	93
<b>9.</b>	<b>Sarana Ekonomi dan Industri/<i>Economic Facilities and Industry</i></b>	
9.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Perdagangan dan Akomodasi <i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Trading and Accomodation Facility</i> .....	101
9.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Kelompok Pertokoan, Pasar, dan Toko/Kios Sarana Produksi Pertanian <i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Shopping Complexes, Markets, and Agricultural Production Shop/Stall</i> .....	102
9.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Bank <i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Bank</i> .....	104
9.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Koperasi <i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Cooperatives</i> .....	105
9.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Fasilitas Perkreditan Selama Setahun	

	Terakhir	
	<i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Credit Facilities Within Last Year</i> .....	106
9.6	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Penunjang Ekonomi	
	<i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Economic Supporting Facilities</i> .....	107
9.7	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan dan Jenis Industri Kecil Dan Mikro	
	<i>Number of Villages/Subdistricts by Availability and Type of Small and Micro Industry</i> .....	108
9.8	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Produk Barang Unggulan dan Diekspor ke Negara Lain	
	<i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Leading Products and Exported to Other Country</i> .....	111
<b>10.</b>	<b>Keuangan dan Aset Desa/Village Financial and Assets</b>	
10.1	Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Sistem Informasi Desa dan Sistem Keuangan Desa	
	<i>Number of Villages by Availability of Village Information System and Village Financial System</i> .....	116
10.2	Banyaknya Desa Menurut Kepemilikan Badan Usaha dan Aset Desa	
	<i>Number of Villages by Ownership of Enterprise and Village Assets</i> .....	117
10.3	Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa 2024, Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2023	
	<i>Number of Villages by Availability of Village Medium-Term Development Plan, Village Government Work Plan 2024, Village Regulation and Village Head Regulation 2023</i> .....	119
<b>11.</b>	<b>Perlindungan Sosial dan Stunting /Social Protection and Stunting</b>	
11.1	Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Program Bantuan Langsung Tunai dan Padat Karya Tunai Desa	
	<i>Number of Villages by Availability of Cash Transfer Assistance and Village Cash For Work Program</i> .....	124
11.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Paket Layanan Terkait Stunting Tahun 2023	
	<i>Number of Villages by Availability of Stunting Related Service Package in 2023</i> .....	125
<b>12.</b>	<b>Keterangan Pemerintah Desa/Kelurahan/Village Government Information</b>	
12.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan	
	<i>Number of Villages/Subdistricts by Existence of The Village/Subdistrict Government</i> .....	133
12.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin Kepala Desa/Lurah dan Sekretaris	

	Desa/Kelurahan					
	<i>Number of Villages/Subdistricts by Sex of The Village/Subdistrict Head and The Village/Subdistrict Secretary.....</i>					134
12.3	Banyaknya Kepala	Desa/Kelurahan Desa/Lurah	Menurut dan	Kelompok Sekretaris	Umur Desa/Kelurahan	
	<i>Number of Villages/Subdistricts by Age Group of The Village/Subdistrict Head and The Village/Subdistrict Secretary.....</i>					135
12.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Desa/Lurah					
	<i>Number of Villages/Subdistricts by Education Attainment of The Village/Subdistrict Head.....</i>					136
12.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Sekretaris Desa/Kelurahan					
	<i>Number of Villages/Subdistricts by Educational Attainment of The Village/Subdistrict Secretary.....</i>					138
<b>13.</b>	<b>Permukiman di Daerah Rawan/Settlement in Vulnerable Areas</b>					
13.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Permukiman di Puncak/Tebing dan di Bantaran Sungai					
	<i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Settlement on Peak/Cliff and on River Bank.....</i>					145
13.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Permukiman di Bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)/Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)/Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS), dan Permukiman Kumuh					
	<i>Number of Villages/Subdistricts by Availability of Settlement on Below Extra High Voltage Air Channel/High Voltage Air Channel/High Voltage Direct Current Air Channel, and Slum Settlement.....</i>					146
<b>14.</b>	<b>Pencemaran Lingkungan Hidup/Environmental Pollution</b>					
14.1	Banyaknya	Desa/Kelurahan	yang	Mempunyai	Sungai dan	
	Sungai	yang	Tercemar	Limbah	Menurut	Sumber Limbah
	<i>Number of Villages/Subdistricts With Rivers and Rivers Contaminated With Waste by Waste Sources.....</i>					151
14.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup					
	<i>Number of Villages/Subdistricts by Type of Environmental Pollution.....</i>					152
14.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis dan Sumber Utama Pencemaran Lingkungan Hidup					



	<i>Number of Villages/Subdistricts by Type and Main Source of Environmental Pollution</i> .....	153
14.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kebiasaan Masyarakat Membakar Ladang/Kebun dan Keberadaan Penggalian Golongan C <i>Number of Villages/Subdistricts by Habbits of Burning Plant/Land Tenure and Existence of C-Class Mining Field</i> .....	154
<b>15.</b>	<b>Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam/<i>Anticipation and Incidence of Natural Disaster</i></b>	
15.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam <i>Number of Villages/Subdistricts by Effort in Anticipation/Mitigation of Natural Disaster</i> .....	159
15.2	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Jenis Bencana Alam, 2023–2024* <i>Number of Villages/Subdistricts by Type of Natural Disaster, 2023–2024*</i> .....	160
<b>16.</b>	<b>Permasalahan Kesehatan di Masyarakat/<i>Public Health Problems</i></b>	
16.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah Penyakit Selama Setahun Terakhir <i>Number of Villages/Subdistricts by Type of Epidemic Within Last Year</i> .....	168
16.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penderita Kekurangan Gizi dan Orang yang Dipasung <i>Number of Villages/Subdistricts by Presence of Malnutrition and Deprived People</i> .....	169
16.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Disabilitas <i>Number of Villages/Subdistricts by Presence of Disabled</i> .....	170
<b>17.</b>	<b>Permasalahan Sosial/<i>Social Problems</i></b>	
17.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Warga Penerima Surat Keterangan Tidak Mampu pada Tahun 2023 <i>Number of Villages/Subdistricts by Presence of People Who Received Poor Certificate in 2023</i> .....	176
17.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Korban Bunuh Diri, Lokasi Berkumpul Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pekerja Seks Komersial (PSK) <i>Number of Villages/Subdistricts by Existence of Suicide Victims, Location of Street Children, Homeless, and Commercial Sex Workers</i> .....	177
<b>18.</b>	<b>Gangguan Keamanan/<i>Security Disturbance</i></b>	
18.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi Selama	

	Setahun Terakhir	
	<i>Number of Villages/Subdistricts by Type of Mass Fight Incident Within Last Year.....</i>	182
18.2	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal dan Kategori Korban	
	<i>Number of Villages/Subdistricts With Mass Fight Incidents and Type of Victims .....</i>	183
18.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Setahun Terakhir	
	<i>Number of Villages/Subdistricts by Initiators of The Settlement of The Most Frequent Mass Fight Within Last Year.....</i>	184
18.4	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Tindak Kejahatan	
	<i>Number of Villages/Subdistricts with Incidents of Crime Within Last Year by Type of Crime .....</i>	185
18.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kejadian Tindak Kejahatan yang Paling Sering Terjadi Selama Setahun Terakhir	
	<i>Number of Villages/Subdistricts by Type of The Most Frequent Incidents of Crime Within Last Year.....</i>	187
<b>19.</b>	<b>Infrastruktur Pendidikan/Education Infrastructure</b>	
19.1	Banyaknya SD/MI Negeri dan Swasta Menurut Provinsi	
	<i>Number of Public and Private Elementary Schools by Province .....</i>	192
19.2	Banyaknya SMP/MTs Negeri dan Swasta Menurut Provinsi	
	<i>Number of Public and Private Junior High Schools by Province.....</i>	193
19.3	Banyaknya SMA/MA Negeri dan Swasta Menurut Provinsi	
	<i>Number of Public and Private Senior High Schools by Province .....</i>	194
19.4	Banyaknya SMK Negeri dan Swasta Menurut Provinsi	
	<i>Number of Public and Private Vocational Schools by Province .....</i>	195
19.5	Banyaknya Akademi/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Menurut Provinsi	
	<i>Number of Public and Private Academy/University by Province .....</i>	196
<b>20.</b>	<b>Infrastruktur Kesehatan/Health Infrastructure</b>	
20.1	Banyaknya Rumah Sakit dan Rumah Sakit Bersalin Menurut Provinsi	
	<i>Number of Hospitals and Maternity Hospitals by Province.....</i>	202
20.2	Banyaknya Puskesmas Menurut Provinsi	
	<i>Number of Public Health Centers by Province.....</i>	203
20.3	Banyaknya Poliklinik/Balai Pengobatan dan Apotek Menurut Provinsi	
	<i>Number of Polyclinics/Treatment Centers and Pharmacies by Province.....</i>	204

<b>21.</b>	<b>Infrastruktur Ekonomi/Economy Infrastructure</b>	
21.1	Banyaknya Kelompok Pertokoan dan Pasar Menurut Provinsi <i>Number of Shopping Complexs and Markets by Province</i> .....	210
21.2	Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Provinsi <i>Number of Trading Facilities by Province</i> .....	211
21.3	Banyaknya Sarana Akomodasi Menurut Provinsi <i>Number of Accomodation Facilities by Province</i> .....	212
21.4	Banyaknya Lembaga Keuangan Bank Menurut Provinsi <i>Number of Bank Facilities by Province</i> .....	213
21.5	Banyaknya Lembaga Keuangan Koperasi Menurut Provinsi <i>Number of Cooperatives by Province</i> .....	214

<https://kepri.bps.go.id>



## Penjelasan Teknis Pendataan Potensi Desa 2024

1. Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Pengumpulan data Podes dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu sepuluh tahun, sebagai bagian dari siklus sepuluh tahunan kegiatan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Podes dilaksanakan dua tahun sebelum pelaksanaan sensus untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. Pada tahun berakhiran '1', pendataan Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Pertanian yaitu identifikasi wilayah konsentrasi usaha pertanian menurut sektor dan subsektor. Pada tahun berakhiran '4', Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Ekonomi dalam rangka identifikasi usaha menurut sektor dan subsektor. Pada tahun berakhiran '8', Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Penduduk yaitu untuk identifikasi wilayah permukiman baru.
2. Pendataan Podes 2024 dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 1) menyediakan data yang mendukung perencanaan kegiatan sensus ekonomi 2026, (2) sebagai sarana untuk pemutakhiran Master File Desa (MFD), (3) menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi: sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah, (4) menyediakan data bagi keperluan pemutakhiran klasifikasi/tipologi desa, misalnya perkotaan-perdesaan, pesisir non pesisir, dan sebagainya, (5) sebagai sumber data pemutakhiran peta wilayah kerja

## Technical Notes of Village Potential Census 2024

1. Village Potential Census (Podes) has been implemented since 1980. Podes data collection is carried out three times in a period of ten years, as part of the ten-year cycle of census activities conducted by BPS-Statistics Indonesia. Podes is carried out two years before the census to support it. In the year ending with '1', Podes is carried out to support the Agricultural Census, to identify the concentration area of agricultural businesses according to the sector and subsector. In the year ending with '4', Podes is implemented to support the Economic Census in order to identify businesses according to sectors and sub-sectors. In the year ending with '8', Podes is implemented to support the Population Census, to identify new residential areas.
2. The Podes 2024 is carried out to achieve the following objectives: (1) to provide data to supports of planning of economic census 2026 activities, (2) to serve as data source to update the BPS "Master File Desa" (Village Master File), (3) to provide the data on existence, and development of potential owned by of each governmental administrative region which includes social, economy, and facilities and infrastructures aspect, (4) to provide the data used to update classification/typology of region (such as: urban-rural, coastal areas – non-coastal areas and so on), (5) to serve as a data source for updating statistical area map, (6) to provide main data for compilation of small area statistics, (7) to provide data

statistik, (6) menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil (7) menyediakan data bagi penyusunan berbagai analisis seperti identifikasi dan penentuan desa tertinggal, variabel konteks dalam PMT, identifikasi desa rawan bencana, dan identifikasi desa yang mempunyai kesulitan geografis, (8) menyediakan data bagi penghitungan indikator-indikator pembangunan/kemajuan desa.

3. Podes 2024 dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (wilayah administrasi setingkat desa yang dimaksud, yaitu: desa, kelurahan, nagari dan jorong di Sumatera Barat, Unit Permukiman Transmigrasi atau UPT, dan Satuan Permukiman Transmigrasi atau SPT yang masih dibina oleh kementerian terkait). UPT/SPT di Indonesia menurut Podes 2024 terdapat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
4. Suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai target lokasi pendataan jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional dengan kriteria sebagai berikut: (1) memiliki batas wilayah yang jelas, (2) memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya, dan (3) memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.

*for compilation of various analyses such as identification and determining lagging regions, context variabel in the PMT, identification of disaster prone village, and indentification of the village with geographical complexity, (8) to provide the data used for calculating the village development/progress index.*

3. *Podes 2024 implemented as a census of the entire regency/municipality, subdistrict, and the lowest governmental administrative region equivalent to village (the village level administration areas referred to are village, subdistrict, nagari and jorong in West Sumatera, Transmigration Settlement Unit or UPT, and Entity of Transmigration Settlement or SPT which is still fostered by the relevant ministries). According to Podes 2024 UPT / SPT in Indonesia are found in Aceh, North Sumatra, Bengkulu, Lampung, Central Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, Gorontalo, West Sulawesi, Maluku and North Maluku provinces.*
4. *A governmental administrative region is decided as the target location of the data collection if the region has been declared as a definitive and operational area with the following criterias: (1) having jurisdiction with clear boundaries, (2) has a population residing permanently in its territory, and (3) has a legitimate and sovereign government.*



5. Instrumen Podes 2024 yang digunakan sebanyak empat jenis kuesioner sesuai dengan jenis dan jenjang wilayah pencacahan, yaitu: wilayah kabupaten/kota (PODES2024-KAB/KOTA), kecamatan (PODES2024-KEC), desa (PODES2024-DESA), dan terluar/terdepan (PODES2024-2T). Pembedaan ini dilakukan untuk menjaga kelengkapan dan akurasi data. Sementara itu, referensi waktu bagi setiap data merujuk pada periode pencacahan yaitu Mei 2024, kecuali bagi beberapa data tertentu yang dinyatakan memiliki referensi waktu yang berbeda misalnya satu atau tiga tahun sebelum periode pencacahan.
6. Data yang merujuk satu tahun sebelum periode pencacahan terdapat pada tabel: 5.3; 8.1; 9.5; 10.3; 11.1; 11.2; 15.2; 16.1; 17.1; 18.1; 18.2; 18.3; 18.4; dan 18.5. Data yang merujuk tiga tahun sebelum periode pencacahan terdapat pada Tabel 3.6.
7. Pengumpulan data Podes 2024 dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan di wilayah pencacahan serta penelusuran dokumen terkait. Petugas wawancara adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus pelatihan pendataan Podes 2024. Sementara itu, narasumber yang dipilih adalah beberapa orang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap wilayah target pencacahan. Kemajuan pendataan dilaporkan dan dipantau secara langsung melalui situs web.

5. *The instruments of Podes 2024 consists of four types of questionnaires according to the levels and types of enumeration areas, namely: regency/city (PODES2024-KAB/KOTA), subdistrict (PODES2024-KEC), village (PODES2024-DESA) levels, and forefront/outer area (PODES2024-2T). This distinction is decided to maintain the completeness and accuracy of data. Meanwhile, the time reference for each data refers to the period of enumeration that is May 2024, in exception for some specific data which is declared have different time references such as one or three years before the period of enumeration.*
6. *Data referring to one year before the enumeration period are in the table: 5.3; 8.1; 9.5; 10.3; 11.1; 11.2; 15.2; 16.1; 17.1; 18.1; 18.2; 18.3; 18.4; and 18.5. While data referring to three years before the enumeration period are in Table 3.6.*
7. *Data collection of Podes 2024 carried out through direct interviews by trained personnel with relevant respondents in the enumeration area and searches related documents. The interviewers are BPS Regency/City personnel or partners that have passed Podes enumeration training. Meanwhile, the selected respondents are several people who have the know-ledge, authority, and responsibility towards the target area of enumeration. The progress of data collection is reported and monitored directly through are presented in realtime on the websites.*

8. Pengolahan data Podes 2024 secara umum sudah dilakukan secara otomatis melalui penggunaan CAPI dalam pencacahan, sehingga input data dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses wawancara. Selain berfungsi sebagai media input data, CAPI juga merupakan media pertama dalam melakukan evaluasi data melalui rule validasi yang telah terpasang dalam aplikasi. Dalam rangka menjamin kualitas data maka disediakan dashboard Podes yang dilengkapi menu query tools, dan tabulasi untuk mengevaluasi data hasil Podes 2024. Selain itu, penjaminan kualitas data juga dilakukan melalui pemeriksaan data secara bertingkat baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sampai dengan tingkat BPS Pusat. Dilakukan pula rekonsiliasi data dalam rangka penjaminan kualitas.
  9. Diseminasi hasil pendataan Podes 2024 disusun ke dalam beberapa jenis publikasi yang utama yaitu: Statistik Potensi Desa Indonesia 2024, Statistik Potensi Desa Provinsi 2024, dan Statistik Indonesia 2025. Publikasi Statistik Potensi Desa Indonesia 2024 dibuat dalam dua cakupan data yaitu publikasi nasional (dirinci menurut provinsi) dan publikasi provinsi (dirinci menurut kabupaten/kota).
8. *The processing of Podes 2024 data has generally been carried out automatically through the use of CAPI in the enumeration so that data input can be carried out simultaneously with the interview process. In addition to functioning as a data input media, CAPI is also the first to evaluate data through validation rules installed in the application. In order to guarantee data quality, a Podes dashboard is provided, equipped with a query tools menu, and tabulation to evaluate the results of Podes 2024 data. In addition, data quality assurance is also carried out through data checks at various levels at the regency and provincial levels, up to the BPS RI level. Data reconciliation is also carried out to guarantee quality.*
  9. *The dissemination of Podes 2024 is prepared into some main publications namely: Village Potential Statistics of Indonesia 2024, Village Potential Statistics of Province 2024, and Statistical Yearbook of Indonesia 2025. The book of Village Potential Statistics of Indonesia 2024 is drafted in two types of data i.e. national publications (specified by province) and provincial publications (elaborated by regency/ city).*

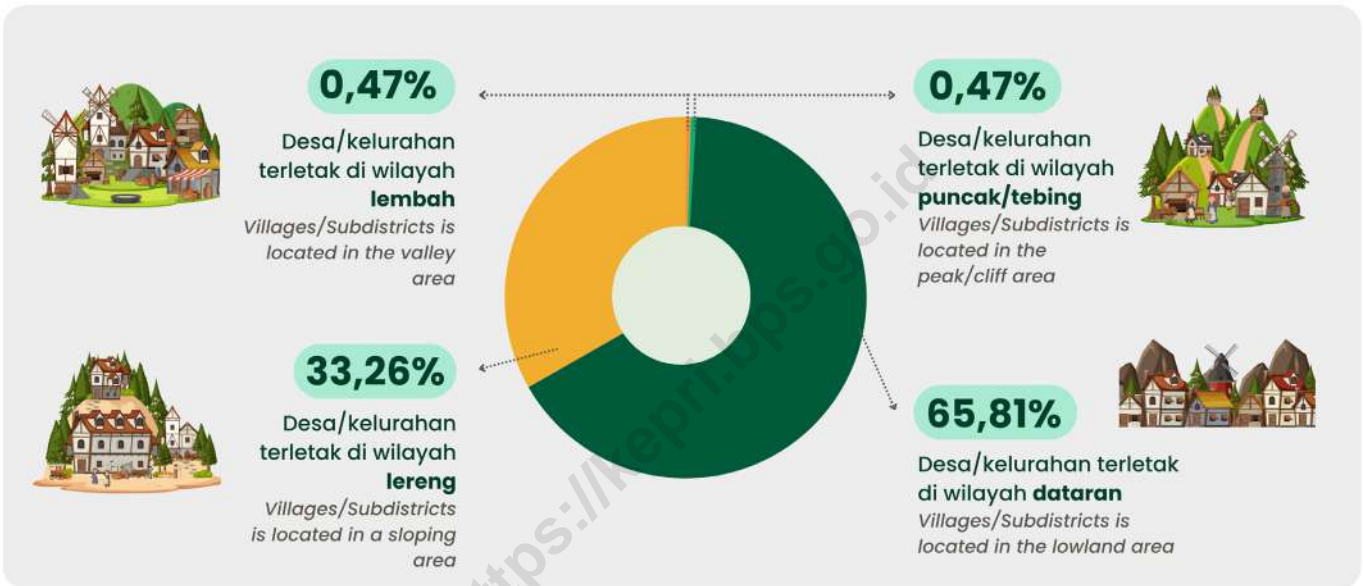
# KETERANGAN UMUM DESA

BAB  
Chapter

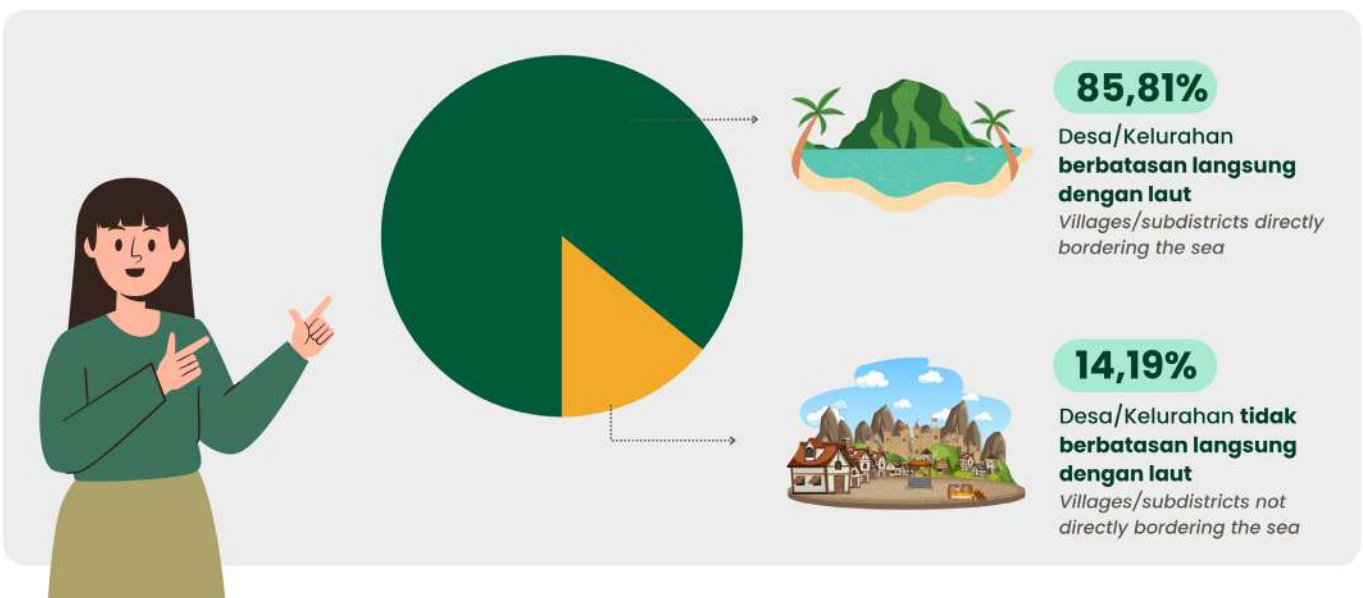
01

GENERAL INFORMATION OF THE VILLAGE

## PERSENTASE DESA/KELURAHAN MENURUT TOPOGRAFI WILAYAH PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY TOPOGRAPHY OF AREA



## PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG WILAYAHNYA BERBATASAN LANGSUNG DENGAN LAUT PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WHOSE AREAS ARE DIRECTLY BORDERED BY THE SEA





## Penjelasan Teknis Keterangan Umum Desa

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
2. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)
3. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat. Organisasi UPT merupakan kelembagaan yang bersifat sementara dibentuk sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum transmigran ditempatkan dan

## Technical Notes General Information of The Village

1. *Village is village and custom village or that is called by other terms, hereinafter referred to as the village is the unity of the legal community who have territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, the interest of local communities based on community initiatives, the origin and local customs that are acknowledged and respected within the unitary System of Government Republic of Indonesia (Law No. 6 Year 2014 about Village).*
2. *Subdistrict is division of administrative areas in Indonesia under the subdistrict. Subdistrict is led by a head of subdistrict (Lurah) as an apparatus of district and responsible to the district head. The Lurah inaugurated by regent/mayor head as suggestion by region secretary from civil servants who qualified according regulation (Law No. 23 Year 2014 about Local Governmental).*
3. *Transmigration Settlement Unit (UPT) is entity of transmigration settlement that serves as a residence and place of business for migrants that is planned to form a village or join the local village. Organizational of transmigration settlement unit is a temporary institution established for at least 2 months before the migrants are placed and maximum of 5 years (Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No.*



paling lama 5 tahun (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.22/MEN/IX/2007).

PER.22/MEN/IX/2007).

4. Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) adalah satuan permukiman potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2003 tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigrasi).
  5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (PP Nomor 72 Tahun 2005). Satu nagari terdiri dari beberapa Jorong/Korong. Orang yang memimpin Jorong/Korong disebut sebagai Kepala Jorong atau Wali Korong. Catatan: nagari dapat dilihat datanya pada publikasi nasional dan publikasi Provinsi Sumatera Barat.
  6. Kantor Kepala Desa/Lurah adalah bangunan yang dikuasai oleh desa/kelurahan yang diperuntukkan secara khusus untuk kegiatan operasional pemerintah desa/kelurahan baik merupakan aset desa maupun bukan aset desa.
4. *Entity of Transmigration Settlement (SPT) is potential settlement unit that designed as transmigration settlements to support the economic growth centers in the region that already exist or are being developed accordance with the spatial plans (Decision of the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. 246 Year 2003 concerning Procedures and Criteria for Preparation of Settlement Location Transmigasi).*
  5. *Nagari is customary law community units that have certain territorial boundaries, and are authorized to regulate and manage the interests of its own local community based on the Minangkabau traditional philosophy (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) or based on local origins and customs in the West Sumatra Province (Government Regulation No. 72 of 2005). A Nagari consists of several Jorong/Korong. The person who leads Jorong/Korong is referred to as the Head of Jorong or Wali Korong. Note: the data of nagari is found in the national publications and the publication of Province of Sumatra Barat.*
  6. *Head of village/subdistrict office is building that owned by village/subdistrict for providing specifically to the operations of village/subdistrict government as village asset or not.*

7. Topografi adalah keadaan muka bumi pada suatu kawasan atau daerah
    - a. Puncak/tebing adalah wilayah yang memiliki perbedaan elevasi lebih dari 30 m dengan wilayah sekitarnya atau memiliki kemiringan lebih dari 50 derajat.
    - b. Lereng adalah wilayah yang memiliki perbedaan elevasi -5 hingga 30 m dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.
    - c. Dataran adalah wilayah yang memiliki perbedaan elevasi -5 hingga 30 dibandingkan dengan wilayah sekitarnya dan memiliki kemiringan kurang 2 derajat.
    - d. Lembah adalah wilayah yang memiliki elevasi lebih rendah 5 meter dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.
  
  8. Desa Tepi Laut adalah desa yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang.
  
  9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
  
  10. Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan, dibedakan menjadi:
    - a. Di Dalam Kawasan Hutan adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya terletak di tengah/ dikelilingi hutan.
    - b. Di Tepi/Sekitar Kawasan Hutan adalah desa/kelurahan yang
- 
7. *Topography is the state of the earth in a certain area or region.*
    - a. *Peak/cliff is an area that has an elevation difference more than 30 m with the surrounding area or has a slope more than 50 degrees.*
    - b. *Slope is an area that has an elevation difference -5 to 30 m compared to the surrounding area.*
    - c. *Flat is areas that have an elevation difference -5 to 30 compared to the surrounding area and have a slope less than 2 degrees.*
    - d. *A valley is an area that has an elevation 5 meters lower than the surrounding area.*
  
  8. *Coastal Village is a village which some areas are intersect/directly adjacent to the sea, either gently sloping/ flat beach or cliffs/ reef.*
  
  9. *Forest is the unit of ecosystem in the form of lands comprising biological resources that are dominated by trees in their natural environment that can not be separated (Law No. 41 Year 1999).*
  
  10. *Village Location of the Forest Area, divided into:*
    - a. *Inside the Forest Area is the village/ subdistrict whose all territory is located in the middle or surrounded by forests.*
    - b. *Around the Forest Area is the village/ subdistrict whose territory is adjacent to*



wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan, atau sebagian wilayah desa tersebut berada di dalam hutan.

- c. Di Luar Kawasan Hutan adalah desa/ kelurahan yang seluruh wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan hutan.

*forest areas or parts of villages located in forest.*

- c. *Outside the Forest Area is the village/ subdistrict whose territory is not directly adjacent to the forest.*

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL : 1.1** **BANYAKNYA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**  
**TABLE : 1.1** **MENURUT KABUPATEN/KOTA**  
**NUMBER OF GOVERNMENTAL ADMINISTRATIVE REGIONS BY**  
**REGENCY/MUNICIPALITY**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kecamatan <i>District</i>	Desa/Kelurahan <i>Village/Subdistric</i>
(1)	(2)	(3)
Karimun	14	71
Bintan	10	51
Natuna	17	77
Lingga	13	95
Kepulauan Anambas	10	54
Kota Batam	12	64
Kota Tanjungpinang	4	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>80</b>	<b>430</b>

**TABEL** : 1.2  
TABLE

**BANYAKNYA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERENDAH  
MENURUT KLASIFIKASI PEMERINTAHAN**  
NUMBER OF THE LOWEST GOVERNMENTAL ADMINISTRATIVE REGIONS  
BY GOVERNMENTAL CLASSIFICATION

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Desa <i>Village</i>	Kelurahan <i>Subdistrict</i>	UPT/SPT <i>Transmigration Settlement Unit/ Entity of Transmigration Settlement</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	42	29	–	71
Bintan	36	15	–	51
Natuna	70	7	–	77
Lingga	86	9	–	95
Kepulauan Anambas	52	2	–	54
Kota Batam	–	64	–	64
Kota Tanjungpinang	–	18	–	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>286</b>	<b>144</b>	<b>–</b>	<b>430</b>

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL**  
**TABLE : 1.3**  
**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN KANTOR**  
**KEPALA DESA/LURAH**  
**NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY PRESENCE OF**  
**VILLAGES/SUBDISTRICTS HEAD OFFICE**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Keberadaan Kantor Kepala Desa / <i>The Village Head Office Presence</i>			Jumlah <i>Total</i>
	Di Dalam Wilayah Desa <i>Inside The Village</i>	Di Luar Wilayah Desa <i>Outside The Village</i>	Tidak Ada Kantor <i>No Office</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	41	1	–	42
Bintan	35	–	1	36
Natuna	70	–	–	70
Lingga	86	–	–	86
Kepulauan Anambas	50	2	–	52
Kota Batam	–	–	–	–
Kota Tanjungpinang	–	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>282</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>286</b>

Lanjutan Tabel/Continued Table 1.3

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Keberadaan Kantor Lurah / <i>Subdistrict Office Presence</i>			Jumlah <i>Total</i>
	Di Dalam Wilayah Kelurahan <i>Inside The Subdistrict</i>	Di Luar Wilayah Kelurahan <i>Outside The Subdistrict</i>	Tidak Ada Kantor <i>No Office</i>	
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Karimun	29	–	–	29
Bintan	15	–	–	15
Natuna	7	–	–	7
Lingga	9	–	–	9
Kepulauan Anambas	2	–	–	2
Kota Batam	63	1	–	64
Kota Tanjungpinang	18	–	–	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>143</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>144</b>

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL** : 1.4 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT TOPOGRAFI WILAYAH**  
**TABLE** : 1.4 **NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY TOPOGRAPHY OF AREA**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Puncak/Tebing <i>Peak/Cliff</i>	Lereng <i>Slope</i>	Dataran <i>Flat</i>	Lembah <i>Valley</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	–	3	68	–	71
Bintan	–	12	39	–	51
Natuna	–	38	39	–	77
Lingga	–	11	84	–	95
Kepulauan Anambas	2	48	2	2	54
Kota Batam	–	24	40	–	64
Kota Tanjungpinang	–	7	11	–	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>2</b>	<b>143</b>	<b>283</b>	<b>2</b>	<b>430</b>

**TABEL : 1.5** **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT LOKASI DESA TERHADAP KAWASAN HUTAN DAN KEBERADAAN TANAMAN MANGROVE**  
**TABLE : 1.5** **NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY VILLAGE LOCATION TO FOREST AREA AND AVAILABILITY OF MANGROVE**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Lokasi Desa/Kelurahan <i>Village/Subdistrict Location</i>			Jumlah <i>Total</i>	Kebudayaan Tanaman Mangrove <i>Availability of Mangrove</i>
	Dalam Hutan <i>Inside Forest Area</i>	Tepi/Sekitar Hutan <i>Edge/Around Forest Area</i>	Luar Hutan <i>Outside Forest Area</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	–	3	68	71	61
Bintan	–	21	30	51	35
Natuna	1	26	50	77	46
Lingga	–	40	55	95	71
Kepulauan Anambas	2	23	29	54	38
Kota Batam	–	7	57	64	34
Kota Tanjungpinang	–	1	17	18	12
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>3</b>	<b>121</b>	<b>306</b>	<b>430</b>	<b>297</b>

<https://kepri.bps.go.id>



**TABEL : 1.6** **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT LOKASI DESA TERHADAP LAUT**  
*NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY LOCATION OF VILLAGE TOWARD THE SEA*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Tepi Laut <i>Coastal Area</i>	Bukan Tepi Laut <i>Non-Coastal Area</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	66	5	71
Bintan	43	8	51
Natuna	65	12	77
Lingga	84	11	95
Kepulauan Anambas	52	2	54
Kota Batam	45	19	64
Kota Tanjungpinang	14	4	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>369</b>	<b>61</b>	<b>430</b>



# KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

BAB  
Chapter

# 02

DEMOGRAPHY AND  
EMPLOYMENT



**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN WARGA YANG SEDANG BEKERJA SEBAGAI PMI (PEKERJA MIGRAN)/TKI DI LUAR NEGERI**

NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY THE PRESENCE OF INDONESIAN MIGRANT WORKER



→ **135**

Desa/Kelurahan **ada** PMI/TKI

Villages/subdistricts with Indonesian Migrant Worker

→ **295**

Desa/Kelurahan **tidak ada** PMI/TKI

Villages/subdistricts with no Indonesian Migrant Worker

**PERSENTASE DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN AGEN PENERAHAN PMI/TKI KE LUAR NEGERI DI DESA/KELURAHAN**

PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY THE PRESENCE OF INDONESIAN MIGRANT WORKER DEPLOYMENT AGENCIES



**1,63%**

Desa/kelurahan yang **terdapat agen penerahan PMI/TKI** ke luar negeri

Villages/subdistricts with Indonesian migrant worker deployment agencies

**98,37%**

Desa/kelurahan yang **tidak terdapat agen penerahan PMI/TKI** ke luar negeri

Villages/subdistricts with no Indonesian migrant worker deployment agencies





## Penjelasan Teknis Kependudukan dan Ketenagakerjaan

1. Penduduk desa/kelurahan yang dicatat pada Podes 2024 adalah jumlah penduduk yang tercatat pada buku administrasi kependudukan desa/kelurahan berdasarkan laporan desa/kelurahan atau banyaknya penduduk desa/kelurahan yang diketahui oleh aparat desa/kelurahan. Referensi waktu pencatatan adalah kondisi 1 Januari 2024.
2. Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk adalah lapangan usaha sebagian besar penduduk desa/kelurahan memperoleh penghasilan/pendapatan. Sumber penghasilan penduduk meliputi:
  - a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultura, peternakan, pengambilan dan penanaman hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air.
  - b. Pertambangan dan Penggalan mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalan di permukaan tanah atau dibawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain.
  - c. Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha

## Technical Notes Demography and Employment

1. *The village/subdistrict population recorded in Podes 2024 is the total population recorded in the village / subdistrict population administration book based on the village / subdistrict report or the number of village / subdistrict residents acknowledged or recorded by village / subdistrict officials. Reference time for the recording is the condition of January 1 2024.*
2. *Main Income Source of the Majority of Population is field of business where most residents earn revenue/income, main income population including:*
  - a. *Agriculture, Forestry and Fisheries cover all economic activities/business fields, including food crop farming, plantation crops, horticulture, animal husbandry, harvesting and planting of forest products as well as catching and cultivating fish/aquatic biota..*
  - b. *Mining and Quarrying includes economic activities/business fields of extracting minerals in natural form, namely solid (coal and metal ore), liquid (petroleum) or gas (natural gas). This activity can be carried out by different methods such as mining and quarrying on the surface of the ground or underground, operating mining wells, mining on the seabed and others.*
  - c. *Manufacture Sector includes economic activities/business fields in the field of*

- di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru.
- d. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen.
  - e. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan.
  - f. Konstruksi mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil.
  - g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.
  - h. Pengangkutan dan Pergudangan mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan, seperti fasilitas
- chemical or physical changes of materials, elements or components into new products.*
- d. *Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply includes economic activities/business fields for the procurement of electricity, natural gas, steam, hot water and the like through permanent infrastructure networks, channels or pipes..*
  - e. *Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities include economic activities/business fields related to the management of various forms of waste/garbage, such as solid or non-solid waste, whether household or industrial, which can pollute the environment.*
  - f. *Construction includes economic activities/business fields in the construction sector, namely general construction activities and special construction of building and civil engineering works..*
  - g. *Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicle and Motorcycles includes economic activities/business fields in the wholesale and retail trade sector (i.e. sales without technical changes) of various types of goods, and providing compensation for services accompanying the sale of these goods.ering works.*
  - h. *Transportation and Storage includes the provision of passenger or freight transportation, whether scheduled or not, using rail, pipeline, road, water or air and related activities, such as terminal and parking facilities, loading and unloading, warehousing and others.*



- terminal dan parkir, bongkar muat, penggudangan dan lain-lain.
- i. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera.
  - j. Informasi dan Komunikasi mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya.
  - k. Aktivitas Keuangan & Asuransi mencakup jasa keuangan, termasuk asuransi, reasuransi dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan.
  - l. Real Estat mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penaksir real estat atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estat.
  - m. Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis mencakup khususnya kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik, kegiatan ini membutuhkan suatu tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.
  - n. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya mencakup berbagai
    - i. *Accommodation and Food Service Activities includes the provision of short-term lodging accommodation for visitors and other travelers as well as the provision of food and beverages for immediate consumption.*
    - j. *Information and Communication includes the production and distribution of information and cultural products, the provision of means to transmit or distribute these products as well as data or communication activities, information, information technology and data processing and other information service activities.*
    - k. *Financial and Insurance Activities include financial services, including insurance, reinsurance and pension fund activities and financial support services.*
    - l. *Real Estate Activities includes the activities of lessors, agents and/or brokers/intermediaries in the sale or purchase of real estate, the rental of real estate and the provision of other real estate services, such as real estate appraisal services or acting as a real estate testamentary agent.*
    - m. *Professional, Scientific and Technical Activities include in particular professional, scientific and technical activities, these activities require a high level of training and produce specialized knowledge and skills available to users.*
    - n. *Rental Leasing Activities, Employment, Travel Agents and Other Business Support include various activities that support general business operations.*



macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum.

- o. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan.
  - p. Pendidikan mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi.
  - q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
  - r. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, tempat perjudian, olahraga dan rekreasi.
  - s. Aktivitas Jasa Lainnya mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini.
  - t. Aktivitas Keluarga Pemberi Kerja mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan dalam melayani rumah tangga, dan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan.
  - u. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
- a. Public Administration and Defence; Compulsory Social Security include activities of a governmental nature, which are generally carried out by government administration.*
  - p. Education includes educational activities at various levels and for various jobs, both orally and in writing as well as by various means of communication.*
  - q. Human Health and Social Work Activities include the provision of health services and social activities.*
  - r. Arts, Entertainment and Recreation covers a broad range of activities to meet the arts/culture, entertainment and recreation needs of the general public, including live performances, operation of historical sites, gambling, sports and recreation venues.*
  - s. Other Service Activities include the activities of membership organizations, repair of computers and household and personal goods, and various personal service activities not covered elsewhere in this classification.*
  - t. Family Activities as Employers include activities that utilize the services of individuals in serving households, and activities that produce goods and services for households to use themselves to meet their needs.*
  - u. International Agency and Other Extra International Agency Activities include*

mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WCO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), the European Communities, the European Free Trade Association dan lain-lain.

3. Jenis Komoditi/Subsektor Pertanian, meliputi:
  - a. Tanaman Pangan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan.
  - b. Tanaman Hortikultura lebih sering mengarah pada produk-produk yang bisa dikonsumsi atau tanaman kebun, seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias.
  - c. Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tahunan.
  - d. Peternakan mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan.
  - e. Perikanan mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting) moluska, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi
  - f. Kehutanan mencakup penebangan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar.
  - g. Jasa Pertanian mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk

*the activities of International Bodies, such as the United Nations and its representatives, Regional Bodies and others, including The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WCO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), the European Communities, the European Free Trade Association and others.*

3. *The Type of Commodity/Agriculture Subsector, includes:*
  - a. *Food crops are grouped based on age, namely annual plants and perennial plants.*
  - b. *Horticultural crops more often refer to products that can be consumed or garden plants, such as fruits, vegetables, and ornamental plants.*
  - c. *Estate Crops consist of annual and perennial plantation crops.*
  - d. *Livestock includes the cultivation and breeding of livestock, poultry, insects, reptiles, worms, pets.*
  - e. *Fishery include catching and cultivating fish, crustaceans (such as shrimp, crabs), molluscs, and other aquatic biota in the sea, brackish water and fresh water. Excluding recreational fishing.*
  - f. *Forestry includes the felling of trees for their wood as well as the collection and harvesting of forest products other than wood that grow wild.*
  - g. *Agricultural Services include supporting activities in producing agricultural products and similar activities for agriculture that are*

pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.

*not carried out for production purposes on a fee or contract basis, including harvesting and post-harvest services, and preparing agricultural products for sale to the market.*

4. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
5. Agen Pengerahan TKI ke Luar Negeri adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan mencari, merekrut, menampung, dan menyalurkan TKI untuk bekerja di luar negeri.

4. *Indonesian Overseas Worker is an Indonesian citizen who are qualified for working abroad for a certain period to get the income (wages).*
5. *Indonesian Migrant Worker Agent is a person or group of persons who perform activities of searching, recruiting, accomodating and channeling the Indonesian overseas workers or women overseas workers.*

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL** : 2.1 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT SUMBER PENGHASILAN UTAMA SEBAGIAN BESAR PENDUDUK**  
**TABLE** : 2.1 **NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICT BY MAIN INCOME SOURCE OF THE MAJORITY OF POPULATION**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry And Fishing</i>	Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	Industri Pengolahan <i>Manufacturing</i>	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin <i>Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply</i>	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	Konstruksi <i>Construction</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	45	3	2	–	–	6
Bintan	36	–	7	–	–	2
Natuna	72	–	–	–	–	–
Lingga	82	–	2	–	–	–
Kepulauan Anambas	44	1	–	–	–	–
Kota Batam	21	–	37	–	–	–
Kota Tanjungpinang	1	–	–	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>301</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>8</b>

Lanjutan Tabel/Continued Table 2.1

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicle and Motorcycles</i>	Pengangkutan dan Pergudangan <i>Transportation and Storage</i>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	Informasi dan Komunikasi <i>Information and Communication</i>	Aktivitas Keuangan dan Asuransi <i>Financial and Insurance Activities</i>	Real Estat <i>Real Estate Activities</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Karimun	10	–	–	–	–	–
Bintan	–	–	4	–	–	–
Natuna	1	–	–	–	–	–
Lingga	3	–	–	–	–	–
Kepulauan Anambas	–	1	–	–	–	–
Kota Batam	5	–	1	–	–	–
Kota Tanjungpinang	12	–	–	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

<https://kepri.bps.go.id>

Lanjutan Tabel/Continued Table 2.1

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis <i>Professional, Scientific and Technical Activities</i>	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya <i>Rental Leasing Activities, Employment, Travel Agents and Other Business Support</i>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	Pendidikan <i>Education</i>	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial <i>Human Health and Social Work Activities</i>	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi <i>Arts, Entertainment and Recreation</i>
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Karimun	–	–	5	–	–	–
Bintan	–	–	–	–	–	–
Natuna	–	–	3	–	–	–
Lingga	–	1	3	–	–	–
Kepulauan Anambas	–	–	8	–	–	–
Kota Batam	–	–	–	–	–	–
Kota Tanjungpinang	–	–	5	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	–	<b>1</b>	<b>24</b>	–	–	–

Lanjutan Tabel/ Continued Table 2.1

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Aktivitas Jasa Lainnya <i>Other Service Activities</i>	Aktivitas Keluarga sebagai Pemberi Kerja <i>Family Activities as Employers</i>	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya <i>International Agency and Other Extra International Agency Activities</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)
Karimun	–	–	–	71
Bintan	2	–	–	51
Natuna	1	–	–	77
Lingga	4	–	–	95
Kepulauan Anambas	–	–	–	54
Kota Batam	–	–	–	64
Kota Tanjungpinang	–	–	–	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>7</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>430</b>

<https://kepri.bps.go.id>



**TABEL** : 2.2  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG SEBAGIAN BESAR PENDUDUKNYA  
BEKERJA PADA SEKTOR PERTANIAN MENURUT JENIS SUB SEKTOR  
UTAMA**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS THAT THE MAJORITY OF POPULATION  
WORK IN AGRICULTURAL SECTOR BY MAIN TYPE OF SUB-SECTOR

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tanaman Pangan <i>Food Crops</i>	Tanaman Hortikultura <i>Horticultural Crops</i>	Tanaman Perkebunan <i>Estate Crops</i>	Peternakan <i>Livestock</i>	Perikanan <i>Fishery</i>	Kehutanan <i>Forestry</i>	Jasa Pertanian <i>Agricultural Services</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Karimun	–	2	18	–	25	–	–	45
Bintan	1	8	1	–	26	–	–	36
Natuna	1	4	15	–	51	1	–	72
Lingga	–	4	4	–	74	–	–	82
Kepulauan Anambas	4	–	3	–	37	–	–	44
Kota Batam	–	–	–	–	21	–	–	21
Kota Tanjungpinang	–	–	–	–	1	–	–	1
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>–</b>	<b>235</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>301</b>

**TABEL : 2.3**  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)/TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DAN AGEN PENERGERAHAN PMI/TKI**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY PRESENCE OF INDONESIAN MIGRANT WORKER AND AGENT OF INDONESIAN MIGRANT WORKER

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Pekerja Migran Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia <i>Indonesian Migrant Worker</i>		Agen Pengerahan PMI/ TKI ke Luar Negeri <i>Indonesians Migrant Workers Agent</i>	
	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	48	23	–	71
Bintan	6	45	–	51
Natuna	20	57	–	77
Lingga	23	72	2	93
Kepulauan Anambas	6	48	–	54
Kota Batam	24	40	5	59
Kota Tanjungpinang	8	10	–	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>135</b>	<b>295</b>	<b>7</b>	<b>423</b>

<https://kepri.bps.go.id>

# PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

BAB  
Chapter

03

SETTLEMENT AND ENVIRONMENT

## PERSENTASE DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SEBAGIAN BESAR KELUARGA

PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY TYPE OF GARBAGE DISPOSAL FOR MOST FAMILIES



0,23%

Desa/kelurahan dengan pembuangan sampah sebagian besar keluarga ke **drainase**

Villages/subdistricts where most families dispose of their garbage in the drainage



44,19%

Desa/kelurahan dengan pembuangan sampah sebagian besar keluarga ke **Tempat Sampah Kemudian diangkut**

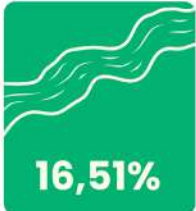
Villages/subdistricts where most families dispose of their garbage in garbage bins and then have it collected



0,47%

Desa/kelurahan dengan pembuangan sampah sebagian besar keluarga ke **Lainnya**

Village/kelurahan where most families dispose of their garbage in other disposal type



16,51%

Desa/kelurahan dengan pembuangan sampah sebagian besar keluarga ke **sungai/ saluran irigasi/danau/ laut**

Villages/subdistricts where most families dispose of their garbage in rivers/ irrigation canals/lakes/oceans



38,60%

Desa/kelurahan dengan pembuangan sampah sebagian besar keluarga ke **dalam lubang atau dibakar**

Villages/subdistricts where most families dispose of their garbage in pits or burn them

## BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KETERSEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA

NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF TEMPORARY GARBAGE DISPOSAL SITES

169

Desa/Kelurahan terdapat Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Villages/Subdistricts have Temporary Garbage Disposal Sites





## Penjelasan Teknis Perumahan dan Lingkungan

1. Keluarga Pengguna Listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN.
2. Keluarga Pengguna Listrik Non-PLN adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik selain PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, atau listrik swadaya masyarakat.
3. Keluarga Bukan Pengguna Listrik adalah keluarga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk penerangan rumah.
4. Jalan Utama Desa adalah jalan yang dianggap oleh sebagian besar penduduk desa/kelurahan setempat sebagai jalan yang paling penting atau paling sering digunakan untuk arus transportasi dari/menjuu kantor camat terdekat.
5. Sumber Penerangan Jalan Utama adalah jenis penerangan dan sumber pembiayaan penerangan yang ada di jalan utama desa. Dikelompokan menjadi: listrik diusahakan oleh pemerintah, listrik non-pemerintah, dan non-listrik.
6. Bahan Bakar adalah jenis bahan yang digunakan untuk memasak oleh mayoritas keluarga di desa/kelurahan.
7. Tempat Pembuangan Sampah mencakup 5 kategori yaitu
  - a. Tempat sampah yang kemudian

## Technical Notes Settlement and Environment

1. *Family of PLN (State Electricity Company) Electric Consumer is user family/customer of electricity supplied by State Electricity Company with or without official meter.*
2. *Family of Electric Consumer of NonState Electricity Company (Non-PLN) is user family/customer of electricity supplied besides by National Electricity Company, eg diesel/generator, power cultivated by the local government, private, and electricity based on community.*
3. *Non-Electricity Consuming Family is family that do not use electricity as a source of energy for home lighting.*
4. *Village Main Street is a street that is considered by the locals as the most important and the key transportation infrastructure from and to the nearest subdistrict office.*
5. *The Source of Main Street Illumination is the type of lighting and the source of financing of the existing lighting in the main street of the village. It's grouped into: state electricity, nonstate electricity, and non-electric.*
6. *Fuel is the type of material that is used for cooking by the majority of families in village/ subdistrict.*
7. *Garbage Disposal Unit involves five things:*
  - a. *Dispossed in garbage pail then caried away;*

- diangkut;
- b. Dikumpulkan dalam lubang kemudian dibakar;
  - c. Dibuang di sungai/saluran irigasi/danau/laut;
  - d. Dibuang di drainase (got/selokan)
  - e. Lainnya (misalnya dikumpulkan kemudian dipakai sebagai bahan pembuatan kompos, d.s.b).
8. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) adalah tempat atau lahan yang digunakan sebagai penampungan pembuangan sampah yang bersifat sementara sebelum diangkut ke tempat perdauran ulang, pengolahan atau tempat pengolahan sampah terpadu.
  9. Sungai adalah tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai yang dimaksud di sini termasuk anak sungai, kanal, dan sodetan (Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011).
  10. Embung adalah bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan untuk persediaan suatu desa di musim kering.
  11. Mata air adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya (alami).
- b. *Gathered in pool then burned/ buried;*
  - c. *Disposed in rivers/irrigation channels/ lake/ seas*
  - d. *Disposed in drainage (sewer/ drain);*
  - e. *Others, e.g. garbage is dumped then using as composting material.*
8. *Temporary Garbage Disposal Unit (TPS) is a place or land used as a temporary garbage disposal unit before the garbage being transported to the recycling unit, processing garbage unit, or integrated garbage dump.*
  9. *River is the place, container, and water networks that are formed naturally or artificially starts from upstream to with bounded right and left by the demarcation line. River is here including creeks, canals, and sodetan (Governmental Regulaiaon No. 38 Year 2011).*
  10. *Embung is a particular building that accommodates excess of water in the rainy season as water supply in a village for the dry season.*
  11. *Spring is a surface water source where water naturally flows out from the ground.*

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS BAHAN BAKAR UNTUK MEMASAK YANG DIGUNAKAN OLEH SEBAGIAN BESAR KELUARGA DAN KEBERADAAN AGEN/PENJUAL BAHAN BAKAR**

**TABEL : 3.2**  
TABLE

NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY TYPE OF COOKING FUEL USED BY MAJORITY OF FAMILIES AND AVAILABILITY OF AGENT/SELLER OF FUEL

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jenis Bahan Bakar <i>Types of Cooking Fuel</i>						
	Listrik <i>Electricity</i>	Elpiji 5,5			Gas Kota <i>City Gas</i>	Biogas <i>Biogas</i>	Minyak Tanah <i>Kerosene</i>
		kg/blue gaz <i>5,5 kg-LPG</i>	Elpiji 12 kg <i>12 kg-LPG</i>	Elpiji 3 kg <i>3kg-LPG</i>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Karimun	–	–	–	70	–	–	–
Bintan	–	–	–	51	–	–	–
Natuna	–	–	5	–	–	–	72
Lingga	–	–	1	–	–	–	94
Kepulauan Anambas	–	–	5	–	–	–	49
Kota Batam	–	–	–	64	–	–	–
Kota Tanjungpinang	–	–	–	18	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	–	–	11	203	–	–	215

**TABEL : 3.2**  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS BAHAN BAKAR UNTUK MEMASAK YANG DIGUNAKAN OLEH SEBAGIAN BESAR KELUARGA DAN KEBERADAAN AGEN/PENJUAL BAHAN BAKAR**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY TYPE OF COOKING FUEL USED BY MAJORITY OF FAMILIES AND AVAILABILITY OF AGENT/SELLER OF FUEL

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jenis Bahan Bakar <i>Types of Cooking Fuel</i>						
	Listrik <i>Electricity</i>	Elpiji 5,5 kg/blue gaz <i>5,5 kg-LPG</i>	Elpiji 12 kg <i>12 kg-LPG</i>	Elpiji 3 kg <i>3kg-LPG</i>	Gas Kota <i>City Gas</i>	Biogas <i>Biogas</i>	Minyak Tanah <i>Kerosene</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Karimun	-	-	-	70	-	-	-
Bintan	-	-	-	51	-	-	-
Natuna	-	-	5	-	-	-	72
Lingga	-	-	1	-	-	-	94
Kepulauan Anambas	-	-	5	-	-	-	49
Kota Batam	-	-	-	64	-	-	-
Kota Tanjungpinang	-	-	-	18	-	-	-
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	-	-	11	203	-	-	215



Lanjutan Tabel/Continued Table 3.2

Kabupaten Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jenis Bahan Bakar <i>Types of Cooking Fuel</i>					Agen/Penjual Bahan Bakar <i>Agent/Seller of Cooking Fuel</i>		
	Briket <i>Briquettes</i>	Arang <i>Charcoal</i>	Kayu Bakar <i>Firewood</i>	Lainnya <i>Others</i>	Jumlah <i>Total</i>	Minyak Tanah <i>Kerosene</i>	LPG	Tidak ada <i>Not Available</i>
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Karimun	–	–	1	–	71	19	70	1
Bintan	–	–	–	–	51	22	51	–
Natuna	–	–	–	–	77	59	60	6
Lingga	–	–	–	–	95	95	43	–
Kepulauan Anambas	–	–	–	–	54	45	41	3
Kota Batam	–	–	–	–	64	8	61	3
Kota Tanjungpinang	–	–	–	–	18	7	18	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	–	–	<b>1</b>	–	<b>430</b>	<b>255</b>	<b>344</b>	<b>13</b>

**TABEL : 3.3** **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT SUMBER AIR MINUM SEBAGIAN BESAR KELUARGA**  
**TABLE** : 3.3 **NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY DRINKING WATER SOURCES OF MAJORITY FAMILIES**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Air Kemasan Bermerk Bottled Water	Air Isi Ulang Refill Water	Ledeng Dengan Meteran Water/ Tap Water	Ledeng Tanpa Meteran Electric/ Hand Pump	Sumur Bor atau Pempa Borehole/Tube Well	Sumur Well
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	–	23	1	1	29	15
Bintan	–	26	3	–	4	17
Natuna	–	32	7	–	4	18
Lingga	–	23	13	8	4	29
Kepulauan Anambas	–	30	1	2	–	1
Kota Batam	2	49	2	–	2	9
Kota Tanjungpinang	–	14	1	–	–	3
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>2</b>	<b>197</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>43</b>	<b>92</b>

Lanjutan Tabel/Continued Table 3.3

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Mata Air <i>Spring</i>	Sungai/Danau/Kolam/ Waduk/Situ/Embung/ Bendungan <i>River/Lake/Pool/Reservoir/ Dam</i>	Air Hujan <i>Rain-water</i>	Lainnya <i>Others</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Karimun	–	–	2	–	71
Bintan	–	–	–	1	51
Natuna	16	–	–	–	77
Lingga	18	–	–	–	95
Kepulauan Anambas	19	1	–	–	54
Kota Batam	–	–	–	–	64
Kota Tanjungpinang	–	–	–	–	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>430</b>

**TABEL** : 3.4  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT PENGGUNAAN FASILITAS  
TEMPAT BUANG AIR BESAR SEBAGIAN BESAR KELUARGA**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY TOILET FACILITY USAGE OF  
MAJORITY FAMILIES

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jamban <i>Toilet</i>			Bukan Jamban <i>Non-Toilet</i>	Jumlah <i>Total</i>
	Sendiri <i>Private</i>	Bersama <i>Shared</i>	Umum <i>Public</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	71	–	–	–	71
Bintan	51	–	–	–	51
Natuna	76	1	–	–	77
Lingga	95	–	–	–	95
Kepulauan Anambas	54	–	–	–	54
Kota Batam	64	–	–	–	64
Kota Tanjungpinang	18	–	–	–	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>429</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>430</b>

<https://kepri.lbps.go.id>

**TABEL** : 3.5  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SEBAGIAN BESAR KELUARGA DAN KETERSEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY TYPE OF GARBAGE DISPOSAL UNIT OF MAJORITY FAMILIES AND AVAILABILITY OF TEMPORARY GARBAGE DISPOSAL UNIT

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jenis Tempat Pembuangan Sampah <i>Type of Garbage Disposal Unit</i>					Jumlah <i>Total</i>	Ketersediaan Tempat Penampungan Sementara <i>The Availability of Temporary Garbage Disposal Unit</i>
	Tempat Sampah Kemudian Diangkut <i>Garbage Pail and Carried Away</i>	Dalam Lubang/ Dibakar <i>Throw Away to the Pool/Burned</i>	Sungai/ Saluran Irigasi/ Danau/Laut River/ Irrigation Channel/ Lake/Sea	Drainase <i>Drainage</i>	Lainnya <i>Others</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Karimun	20	38	12	–	1	71	26
Bintan	24	23	4	–	–	51	31
Natuna	18	45	13	–	1	77	11
Lingga	18	47	30	–	–	95	18
Kepulauan Anambas	48	4	1	1	–	54	26
Kota Batam	46	8	10	–	–	64	39
Kota Tanjungpinang	16	1	1	–	–	18	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>190</b>	<b>166</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>430</b>	<b>169</b>

**TABEL 3.6** BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEGIATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH  
*TABLE 3.6 NUMBER VILLAGES/SUBDISTRICTS BY ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND WASTE PROCESSING ACTIVITIES*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Pelestarian Lingkungan <sup>1</sup> <i>Environmental Conservation<sup>1</sup></i>		Sampah/Limbah <i>Waste Processing/ Recycling</i>		Pupuk Organik <i>Promoting the Use of Organic Fertilizers</i>	
	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	29	42	4	67	14	57
Bintan	18	33	9	42	17	34
Natuna	14	63	1	76	21	56
Lingga	29	66	3	92	6	89
Kepulauan Anambas	7	47	5	49	3	51
Kota Batam	33	31	26	38	23	41
Kota Tanjungpinang	10	8	16	2	9	9
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>140</b>	<b>290</b>	<b>64</b>	<b>366</b>	<b>93</b>	<b>337</b>

Catatan : <sup>1</sup> Pelestarian lingkungan yang dimaksud dapat berupa penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove dsb

Note : <sup>1</sup> *Environmental conservation in question can be the planting/maintenance of trees on critical land, mangrove planting, and the like.*

**TABEL : 3.7** **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN SUNGAI, SALURAN IRIGASI, DANAU/WADUK/SITU/BENDUNGAN, EMBUNG, DAN MATA AIR**  
**TABLE** **NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF RIVER, IRRIGATION CHANNEL, LAKE/DAM/RESERVOIR, EMBUNG, AND SPRING**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sungai <i>River</i>	Saluran Irigasi <i>Irrigation Channel</i>	Danau/Waduk/Situ/ Bendungan		Mata Air <i>Spring</i>
			<i>Lake/Dam/Reservoir</i>	<i>Embung</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	5	2	6	1	15
Bintan	20	2	12	2	33
Natuna	41	6	1	17	49
Lingga	62	4	6	3	68
Kepulauan Anambas	20	2	3	8	45
Kota Batam	4	–	9	6	20
Kota Tanjungpinang	–	–	–	–	4
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>152</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>234</b>

**TABEL** : 3.8  
**TABLE**

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG DILALUI SUNGAI MENURUT JENIS PENGGUNAAN SUNGAI**  
**NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS ARE TRAVERSED THE RIVER BY TYPE OF RIVER USE**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Mandi/ Cuci <i>Bathing/ Washing</i>	Minum/ Masak <i>Drinking/ Cooking</i>	Bahan Baku Air Minum <i>Drinking Water Source</i>	Pengairan/ Irigasi <i>Irrigation</i>	Pariwisata <i>Tourism</i>	Perikanan <i>Fisbery</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	–	–	–	–	–	4
Bintan	5	1	1	2	3	10
Natuna	13	7	2	3	1	14
Lingga	22	1	2	5	1	28
Kepulauan Anambas	10	1	–	1	1	–
Kota Batam	1	–	–	–	–	1
Kota Tanjungpinang	–	–	–	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>57</b>

<https://kepri.bps.go.id>



Lanjutan Tabel/*Continued Table 3.8*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Transportasi <i>Transportation</i>	Pembangkit Listrik <i>Power Plant</i>	Industri/ Pabrik <i>Industries/ Manufactories</i>	Lainnya <i>Others</i>	Tidak Dimanfaatkan <i>Not Used</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Karimun	–	–	–	1	–
Bintan	1	–	–	1	–
Natuna	16	–	–	9	–
Lingga	26	–	6	5	–
Kepulauan Anambas	–	–	–	8	–
Kota Batam	1	–	–	1	–
Kota Tanjungpinang	–	–	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>44</b>	<b>–</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>–</b>

**TABEL 3.9** **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN EMBUNG**  
**TABLE 3.9** **NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY USAGE OF EMBUNG**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Mandi/ Cuci <i>Batbing/ Washing</i>	Minum/ Masak <i>Drinking/ Cooking</i>	Bahan Baku Air Minum <i>Drinking Water Source</i>	Pengairan/ Irigasi <i>Irrigation</i>	Pariwisata <i>Tourism</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	1	1	–	–	–
Bintan	1	–	1	1	–
Natuna	8	5	1	6	–
Lingga	1	–	–	1	–
Kepulauan Anambas	4	1	–	–	–
Kota Batam	6	6	1	–	–
Kota Tanjungpinang	–	–	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>–</b>

<https://kepri.bps.go.id>

Lanjutan Tabel/Continued Table 3.9

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Perikanan <i>Fisbery</i>	Pembangkit Listrik <i>Power Plant</i>	Industri/ Pabrik <i>Industries/ Manufactories</i>	Lainnya <i>Others</i>	Tidak Dimanfaatkan <i>Not Used</i>
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Karimun	–	–	–	–	–
Bintan	–	–	–	–	–
Natuna	–	–	–	3	–
Lingga	1	–	–	–	–
Kepulauan Anambas	–	–	–	3	–
Kota Batam	–	–	–	–	–
Kota Tanjungpinang	–	–	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>6</b>	<b>–</b>



# PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

BAB  
Chapter

04

EDUCATION AND HEALTH

## Bahasa Asing

Foreign Language Course



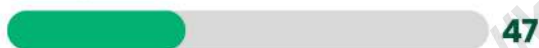
## Komputer

Computer Course



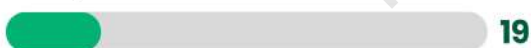
## Menjahit/Tata Busana

Sewing/Fashion Course



## Kecantikan

Beauty Course



## Montir Mobil/Motor

Car/motorcycle Mechanic Course



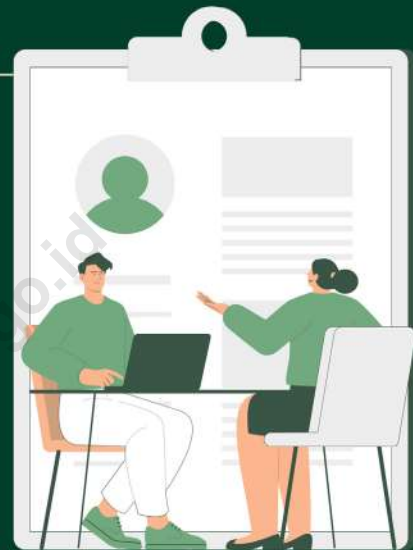
## Elektronika

Electronics Course



## Lainnya

Other Course



**BANYAKNYA  
DESA/KELURAHAN MENURUT  
KEBERADAAN LEMBAGA  
KETERAMPILAN**

**NUMBER OF VILLAGES/  
KELURAHAN BY AVAILABILITY OF  
SKILLS COURSES**

”  
Lembaga keterampilan

**Bahasa Asing**

merupakan lembaga dengan **jumlah terbanyak** yang berada di desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024

*Foreign language courses are the institutions with the largest number in villages/kelurahan in Kepulauan Riau Province in 2024.*

”



## Penjelasan Teknis Pendidikan dan Kesehatan

1. Jenjang Pendidikan Non Formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
  - a. Lembaga Keterampilan adalah pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh lembaga/pelatihan/kursus keterampilan yang mempunyai ciri: jangka waktu pendidikan relatif pendek, ditujukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat umum, dan menyediakan sertifikat bagi peserta yang lulus.
  - b. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) atau biasa disebut PAUD adalah tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan/perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini).
  - c. Keaksaraan Fungsional adalah metode pemberantasan buta aksara

## Technical Notes Education and Health

1. *The Non-Formal Education includes life skills education, early childhood education, youth education, women's empowerment education, literacy education, vocational and job training education, equality education, and other education that aimed to develop the ability of learners. The non-formal education unit consists of courses institutes, training institutes, study groups, learning centers, and forum of taklim, and similar educational unit.*
  - a. *Skill Course is outside of school education managed by the training institution or skill course that has characteristics: duration of education is relatively short, it is provided to improve the skill of community, and provides certificate for the trainees who pass the exam.*
  - b. *Early Childhood Education Facility is a pre-elementary activities place for child since birth up to the age of six years through provision of proper early education in order to assist physical and mental growth so that child become ready for attending further education level (Regulation of the Minister of Education and Culture No 137 of Year 2014 on Standard of National Early Childhood Education)*
  - c. *Functional Literacy is one of the education programs outside of school in*

meliputi pengajaran kemampuan baca, tulis, dan hitung, serta berbagai keterampilan lain. Keterampilan di sini tergantung proposal yang diajukan, misal memasak, menjahit, pembuatan kain sulam, d.s.b.

d. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah lembaga yang lahir dari dan untuk masyarakat yang merupakan potensi dalam memberdayakan warga (masyarakat umum) untuk belajar dan memperoleh informasi/pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup.

2. Posyandu adalah salah satu wadah peran serta masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan memantau pertumbuhan balita dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara dini. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.
3. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), yang saat ini dikenal Posbindu PTM (penyakit tidak menular) merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik (Juknis Pelaksanaan Posbindu, Kemenkes, 2012).
4. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya

*order to eradicate illiteracy which includes the teaching of reading, writing, and calculation, and other functional abilities in everyday activities such as cooking, sewing, embroidery fabric manufacture, etc.*

*d. Communal Library is a public reading facility that is established by and for the community which become the potential facility for empowering the community to learn and acquire information/ knowledge to improve their living.*

2. *Integrated Health Service is a facility for the community participation which is managed and organized from, by, for, and with the community to obtain basic health services and monitor the growth of infants in order to improve the quality of human resources at an early stage. Those activities are immunization services, community nutrition education, and health services for mother and child.*
3. *Integrated Health Counseling Post (the Posbindu), which is currently known as the Posbindu PTM (Integrated Health Counseling Post for the noninfectious disease) is the role of the community in conducting early detection and monitoring of main risk factors of noninfectious disease carried out in an integrated, routine and periodic manner (Technical Guidelines on the Posbindu Operation, the Ministry of Health, 2012 )*
4. *Health worker, is every person who devotes to health care and has knowledge or skills through education in the field of health. The certain types of skills in this service require the authority or license to provide health treatment (the Minister of Health Regulation Number 36 of 2014 on Health Workers).*



kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan)

5. Dokter meliputi dokter umum dan dokter spesialis, tidak termasuk dokter hewan.
  6. Bidan adalah seorang petugas paramedis yang memperoleh pendidikan formal mengenai kebidanan dan berdomisili/ tinggal di desa/kelurahan.
  7. Tenaga kesehatan lainnya meliputi: tenaga keperawatan, tenaga psikologi klinis, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan sebagainya.
  8. Dukun Bayi/Dukun Bersalin (Paraji) adalah wanita yang memiliki keterampilan secara turun temurun untuk menolong persalinan secara tradisional.
5. *Doctors include general practitioners and specialists, but not veterinarians.*
  6. *Midwives are paramedics who receive formal education about midwifery and live in the village/subdistrict.*
  7. *Other Health Workers include: nursing staff, clinical psychology personnel, pharmacy personnel, public health personnel, environmental health workers, nutritionist, physical hygiene personnel, medical technical personnel, biomedical engineering personnel, traditional health workers, etc.*
  8. *Traditional Birth Attendant is someone with skill hereditary to help childbirth traditionally.*

**TABEL** : 4.1  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN SARANA PENDIDIKAN**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF EDUCATIONAL FACILITY

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Pos PAUD <i>Early Childhood Education Facility</i>	TK/RA/BA <i>Kindergarten</i>	SD/MI <i>Elementary School</i>	SMP/MTs <i>Junior High School</i>	SMA/MA <i>Senior High School</i>	SMK <i>Vocational High School</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	61	45	68	49	21	8
Bintan	48	28	49	26	13	7
Natuna	55	53	65	33	18	5
Lingga	80	13	91	40	18	5
Kepulauan Anambas	43	29	53	25	7	4
Kota Batam	60	57	64	60	47	25
Kota Tanjungpinang	16	17	18	16	8	8
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>363</b>	<b>242</b>	<b>408</b>	<b>249</b>	<b>132</b>	<b>62</b>

<https://kepri.bps.go.id>

Lanjutan Tabel/*Continued Table* 4.1

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Akademi/ Perguruan Tinggi <i>Academy/University</i>	SD Luar Biasa <i>Extraordinary Elementary School</i>	SMP Luar Biasa <i>Extraordinary Junior High School</i>	SMA Luar Biasa <i>Extraordinary Senior High School</i>	Pondok Pesantren <i>Islamic Boarding School</i>	Madrasah Diniyah <i>Madrasah Diniyah</i>	Seminari/ Sejenisnya <i>Seminary</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Karimun	2	3	2	2	16	7	–
Bintan	3	4	2	1	8	2	1
Natuna	1	1	1	2	3	10	–
Lingga	2	1	1	1	6	3	–
Kepulauan Anambas	–	3	1	1	4	11	–
Kota Batam	19	3	1	–	29	6	1
Kota Tanjungpinang	6	2	2	1	6	6	1
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>72</b>	<b>45</b>	<b>3</b>

**TABEL** : 4.2  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN LEMBAGA  
KETERAMPILAN**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF SKILLS COURSES

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Bahasa Asing <i>Foreign Language Course</i>	Komputer <i>Computer Course</i>	Menjahit/ Tata Busana <i>Fashion Design Course</i>	Kecantikan <i>Beauty Course</i>	Montir Mobil/ Motor <i>Automotive Course</i>	Elektronika <i>Electronics Course</i>	Lainnya <i>Others</i>	Tidak Ada Lembaga Keteram- pilan <i>No Skills Courses</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Karimun	9	7	5	3	2	1	–	56
Bintan	4	1	6	1	3	–	5	38
Natuna	10	2	4	1	2	1	1	65
Lingga	3	3	14	2	8	1	–	75
Kepulauan Anambas	1	2	2	–	–	–	–	50
Kota Batam	25	11	12	10	2	3	12	34
Kota Tanjungpinang	9	4	4	2	2	1	2	8
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>61</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>326</b>

**TABEL : 4.3**  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KETERSEDIAAN  
KEGIATAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA/KEAKSARAAN  
FUNGSIONAL, KEGIATAN PENDIDIKAN PAKET A/B/C, DAN TAMAN  
BACAAN MASYARAKAT (TBM)**

NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF  
ILLITERATE ERADICATION ACTIVITY, A/B/C EDUCATIONAL  
PACKAGES, AND COMMUNAL LIBRARY

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Pendidikan Keaksaraan Dasar/Lanjutan <i>Illiterate Eradication</i>	Pendidikan Paket A/B/C <i>A/B/C Educational Package</i>	Taman Bacaan Masyarakat <i>Communal Library</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	2	10	20
Bintan	–	11	24
Natuna	–	2	22
Lingga	1	11	19
Kepulauan Anambas	2	1	9
Kota Batam	–	15	14
Kota Tanjungpinang	4	2	12
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>9</b>	<b>52</b>	<b>120</b>

**TABEL** : 4.4  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN SARANA KESEHATAN**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF HEALTH FACILITY

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Rumah Sakit <i>Hospital</i>	Rumah Sakit Bersalin <i>Maternity Hospital</i>	Puskesmas <sup>1</sup> <i>Public Health Center<sup>1</sup></i>	Puskesmas Pembantu <i>Subsidiary of Public Health Center</i>	Poliklinik/Balai Pengobatan <i>Polyclinic/Treatment Center</i>	Tempat Praktek Dokter <i>Doctor Practice</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	3	–	13	35	6	16
Bintan	2	–	18	23	6	13
Natuna	2	–	16	39	1	6
Lingga	2	–	13	35	1	7
Kepulauan Anambas	3	–	10	44	2	6
Kota Batam	11	3	18	41	40	38
Kota Tanjungpinang	3	–	8	8	15	14
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>96</b>	<b>225</b>	<b>71</b>	<b>100</b>

Catatan

: <sup>1</sup> Puskesmas mencakup puskesmas dengan rawat inap dan puskesmas tanpa rawat inap.

Note

: <sup>1</sup> Public Health Center includes public health center with hospitalization and without hospitalization.

Lanjutan Tabel/*Continued Table 4.4*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Rumah Bersalin <i>Maternity House</i>	Tempat Praktek Bidan <i>Midwife</i>	Poskesdes <i>Village Health Post</i>	Polindes <i>Village Maternity Post</i>	Apotek <i>Pharmacy</i>	Khusus Obat/Jam u <i>Traditional Drugs Store</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Karimun	1	26	53	14	17	20
Bintan	–	18	7	44	9	5
Natuna	–	8	16	15	6	5
Lingga	–	14	4	69	5	9
Kepulauan Anambas	2	3	2	6	6	1
Kota Batam	3	42	9	14	40	37
Kota Tanjungpinang	1	12	17	3	14	11
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>7</b>	<b>123</b>	<b>108</b>	<b>165</b>	<b>97</b>	<b>88</b>

**TABEL : 4.5** **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEGIATAN POSYANDU DAN POSBINDU**  
**TABLE : 4.5** **NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY INTEGRATED HEALTH POST AND INTEGRATED DEVELOPMENT POST ACTIVITIES**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kegiatan Posyandu <i>The Activity of Integrated Health Post</i>		Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) <i>Integrated Development Post</i>
	Setiap Sebulan Sekali <i>Once in a Month</i>	Setiap 2 Bulan atau Lebih <i>Once in at Least Two Months</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	71	1	40
Bintan	51	7	33
Natuna	77	4	66
Lingga	95	–	63
Kepulauan Anambas	54	2	26
Kota Batam	64	4	42
Kota Tanjungpinang	18	–	12
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>430</b>	<b>18</b>	<b>282</b>

<https://kepri.lbps.go.id>



**TABEL**  
**TABLE** : 4.6

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN TENAGA KESEHATAN DAN DUKUN BAYI YANG TINGGAL DI DESA/KELURAHAN**  
**NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF HEALTH PRACTITIONER AND TRADITIONAL BIRTH ATTENDANT WHO LIVE IN THE VILLAGE/SUBDISTRICTS**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Tenaga Kesehatan yang Tinggal di Desa/Kelurahan <i>Health Practitioner who Live in the Village/SUBDISTRICTS</i>					Dukun Bayi <i>Traditional Birth Attendant</i>
	Dokter Umum/ Spesialis Pria <i>Male Doctor</i>	Dokter Umum/ Spesialis Wanita <i>Female Doctor</i>	Dokter Gigi <i>Dentist</i>	Bidan <i>Midwife</i>	Lainnya <i>Other Health Practitioner</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	24	18	11	70	51	38
Bintan	13	13	10	47	33	8
Natuna	10	13	7	61	64	58
Lingga	11	13	12	82	59	48
Kepulauan Anambas	11	12	9	38	49	30
Kota Batam	28	32	18	56	34	13
Kota Tanjungpinang	12	12	10	17	10	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>109</b>	<b>113</b>	<b>77</b>	<b>371</b>	<b>300</b>	<b>195</b>



# SOSIAL DAN BUDAYA

## BAB Chapter 05

### SOCIAL DAN CULTURE

#### PERSENTASE DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERAGAMAN AGAMA PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY THE DIVERSITY OF RELIGION

**75,12%**  
Desa/Kelurahan dengan Penduduk Beragama Berbeda  
Villages/Subdistricts with Residents of The Various Religions



**24,88%**  
Desa/Kelurahan dengan Penduduk Beragama Sama  
Villages/Subdistricts with Residents of The Same Religion

#### PERSENTASE DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERAGAMAN SUKU/ETNIS PERCENTAGE OF VILLAGES/KELURAHAN BY THE DIVERSITY OF ETHNICITY



**3,49%**  
Desa/Kelurahan yang terdiri dari Satu Suku/Etnis  
Villages/Subdistricts Consisting of One or Single Ethnicity

**96,51%**  
Desa/Kelurahan yang terdiri dari Beberapa Suku/Etnis  
Villages/Subdistricts Consisting of Several Ethnicities

#### PERSENTASE DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERAGAMAN BAHASA PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY THE DIVERSITY OF LANGUAGE

**16,98%**  
Desa/Kelurahan yang Warganya Berkomunikasi dengan Satu Bahasa  
Villages/Subdistricts whose Residents Communicate Using One Language

**83,02%**  
Desa/Kelurahan yang Warganya Berkomunikasi dengan Beberapa Bahasa  
Villages/Subdistricts whose Residents Communicate Using Several Languages





## Penjelasan Teknis Sosial dan Budaya

1. Tempat Ibadah adalah bangunan/ruangan yang lokasinya tetap dan peruntukannya khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum sesuai agama yang dianut tanpa memandang status kepemilikan, termasuk bangunan/ruangan yang lokasinya tetap dan fungsinya dikhususkan untuk ibadah di fasilitas umum. Tidak termasuk tempat ibadah yang khusus dipakai oleh pribadi/keluarga.
  - a. Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk Sholat Jum'at.
  - b. Surau/Langgar adalah tempat peribadatan umat Islam, lebih kecil dari masjid dan tidak digunakan untuk Sholat Jum'at.
  - c. Gereja Kristen adalah tempat ibadah untuk umat Kristen
  - d. Gereja Katolik adalah tempat ibadah untuk umat Katolik
  - e. Kapel adalah tempat ibadah untuk umat Katolik yang tidak ada Pastur.
  - f. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu.
  - g. Vihara adalah tempat ibadah umat Buddha.
  - h. Klenteng adalah tempat ibadah umat Konghucu.
  - i. Balai Basarah merupakan tempat ibadah umat Kaharingan.
  - j. Lainnya, khusus untuk tempat ibadah Aliran Penghayat Kepercayaan. Contohnya Pamunjungan atau disebut Kabuyutan, yang merupakan tempat ibadah umat Sunda Wiwitan.

## Technical Notes Social and Culture

1. *Places of Worship is a building/room which the location is fixed and specially designed for worship by the public according to their religious affiliation, regardless of ownership status of the building. It includes building/room which the location is fixed and the function remain devoted to worship in public facilities. Excluding the special place of worship used by personal/family.*
  - a. *Mosque is a place of worship for Muslims, which can be used as a place for Friday prayers.*
  - b. *Prayer Room is a place of worship for Muslims, smaller than the mosque and not used as a place for Friday prayers.*
  - c. *Christian Church is a place of worship for Christians.*
  - d. *Catholic Church is a place of worship for Catholics.*
  - e. *Chapel is a place of worship for Catholics without a pastor.*
  - f. *Hindu Temple is a place of worship for Hinduism.*
  - g. *Buddhist Temple is a place of worship for Buddhist.*
  - h. *Shrine is a place of worship for Confucian.*
  - i. *Balai Basarah is a place of worship for the Kaharingan community.*
  - j. *Other is a place of worship for the native-faith followers. For example, Pamunjungan or called Kabuyutan, which is a place of worship for the Sunda Wiwitan community.*

**TABEL** : 5.1  
**TABLE**

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KERAGAMAN AGAMA, SUKU/ETNIS, DAN BAHASA**  
**NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY DIVERSITY OF RELIGION, ETHNIC, AND LANGUAGE**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Agama/ <i>Religion</i>		Etnis/ <i>Ethnic</i>		Bahasa/ <i>Language</i>	
	Satu Agama <i>Single Religion</i>	Multi Agama <i>Multi-Religion</i>	Satu Etnis <i>Single Ethnic</i>	Multi Etnis <i>Multi-Ethnic</i>	Satu Bahasa <i>Single Language</i>	Multi Bahasa <i>Multi-Language</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	9	62	1	70	6	65
Bintan	5	46	1	50	6	45
Natuna	34	43	2	75	21	56
Lingga	22	73	3	92	25	70
Kepulauan Anambas	32	22	8	46	13	41
Kota Batam	4	60	–	64	1	63
Kota Tanjungpinang	1	17	–	18	1	17
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>107</b>	<b>323</b>	<b>15</b>	<b>415</b>	<b>73</b>	<b>357</b>

<https://kepri.bps.go.id/>

**TABEL**  
**TABLE** : 5.2

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN TEMPAT IBADAH**  
**NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF PLACES OF WORSHIP**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Masjid <i>Mosque</i>	Surau/ Langgar /Musala <i>Prayer Room</i>	Gereja Kristen <i>Christian Church</i>	Gereja Katolik <i>Catholic Church</i>	Kapel <i>Chapel</i>	Pura <i>Hindu Temple</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	71	70	21	11	–	–
Bintan	46	46	14	11	5	3
Natuna	71	62	8	2	1	–
Lingga	95	68	10	12	–	–
Kepulauan Anambas	52	34	5	4	1	–
Kota Batam	64	62	45	32	1	2
Kota Tanjungpinang	18	18	14	5	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>417</b>	<b>360</b>	<b>117</b>	<b>77</b>	<b>8</b>	<b>5</b>

Lanjutan Tabel/*Continued Table* 5.2

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Vihara <i>Buddhist Temple</i>	Kelenteng <i>Shrine</i>	Balai Basarah <i>Basarah Hall</i>	Lainnya <i>Others</i>	Tidak Ada Tempat Ibadah <i>No Place of Worship</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Karimun	16	16	1	–	–
Bintan	11	16	–	–	–
Natuna	3	2	–	1	1
Lingga	5	23	–	–	–
Kepulauan Anambas	2	1	–	–	–
Kota Batam	22	14	1	–	–
Kota Tanjungpinang	9	8	–	1	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>68</b>	<b>80</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

<https://kepri.bps.go.id>



**TABEL : 5.3**  
**TABEL** : 5.3  
**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBIASAAN GOTONG ROYONG DI DESA/KELURAHAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**  
**NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY THE HABBITS OF GOTONG ROYONG IN THE VILLAGES/SUBDISTRICTS FOR PUBLIC INTEREST**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Ada, Sebagian Besar Warga Terlibat <i>Yes, Most People are Involved</i>	Ada, Sebagian Kecil Warga Terlibat <i>Yes, Only Few People are Involved</i>	Tidak Ada Kebiasaan <i>No Habit</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	50	21	–
Bintan	46	5	–
Natuna	61	13	3
Lingga	93	2	–
Kepulauan Anambas	47	7	–
Kota Batam	59	5	–
Kota Tanjungpinang	17	1	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>373</b>	<b>54</b>	<b>3</b>



# HIBURAN DAN OLAHRAGA

BAB  
Chapter

06

ENTERTAINMENT AND SPORT

## PERSENTASE DESA/KELURAHAN TERDAPAT RUANG PUBLIK, PUB/DISKOTIK/ TEMPAT KARAOKE, DAN FASILITAS FITNESS/AEROBIK

PERCENTAGE OF VILLAGES/KELURAHAN BY AVAILABILITY OF OPEN PUBLIC SPACE,  
PUB/DISCOTHEQUE/KARAOKE PLACE, AND FITNESS/AEROBIC CENTER

46,98%

Desa/Kelurahan terdapat  
**Ruang Publik Terbuka**

*Villages/Subdistricts that have Open Public  
Space*



13,02%

Desa/Kelurahan terdapat  
**Pub/Diskotik/Tempat Karaoke**

*Villages/Subdistricts that have Pub/  
Discotheque/Karaoke Place*



16,05%

Desa/Kelurahan terdapat  
**Fasilitas Fitness, Aerobik**

*Villages/Subdistricts that have Fitness,  
Aerobic Center*





## Penjelasan Teknis Hiburan dan Olahraga

1. Ruang Publik Terbuka adalah lahan umum yang utamanya diperuntukkan sebagai tempat berkumpul warga seperti untuk bersantai, bermain tanpa perlu membayar. Ruang publik terbuka dapat berupa lapangan terbuka/alun-alun, taman, tempat bermain, d.s.b.
2. Pub/diskotek/tempat karaoke adalah tempat/gedung yang digunakan secara permanen untuk pub/diskotek/karaoke. Tidak termasuk peralatan karaoke yang disewakan.
3. Pusat Kebugaran adalah tempat khusus berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik. Sebuah *fitness centre* yang biasanya menyajikan banyak fasilitas dengan konsep *one stop sport* dan *entertainment* menjadi kunci utamanya.

## *Technical Notes Entertainment and Sport*

1. *Open Public Space is a public land that primarily designed as a place for leisure, playing for community without needing to pay. Open public space consists of field or square, park, playground, etc.*
2. *Pub/discotheque/karaoke place is a place/building that is used permanently for pubs/discotheques/karaoke. The concept does not include karaoke equipment for rent.*
3. *The Fitness Center is a special place that provides equipment for physical fitness exercise or where the body muscle is done routinely/regularly. It usually provides a number facilities including entertainment with one stop sport concept.*

**TABEL**  
**TABLE** : 6.1

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KETERSEDIAAN RUANG  
PUBLIK TERBUKA, PUB/DISKOTEK/KARAOKE, DAN PUSAT KEBUGARAN**  
*NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF OPEN PUBLIC  
SPACE, PUB/DISCOTHEQUE/KARAOKE, AND FITNESS CENTER*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Ruang Publik Terbuka <i>Open Public Space</i>	Pub/Diskotik/ Karaoke <i>Pub/Discotheque/Karaoke</i>	Pusat Kebugaran <i>Fitness Center</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	47	4	9
Bintan	20	5	10
Natuna	22	2	3
Lingga	29	8	2
Kepulauan Anambas	42	9	2
Kota Batam	27	24	36
Kota Tanjungpinang	15	4	7
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>202</b>	<b>56</b>	<b>69</b>

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL : 6.2** **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KETERSEDIAAN FASILITAS/LAPANGAN OLAHRAGA**  
**TABLE** **NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF SPORTS FACILITIES/FIELDS**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sepak Bola <i>Soccer</i>	Bola Voli <i>Volley Ball</i>	Bulu Tangkis <i>Badminton</i>	Bola Basket <i>Basket Ball</i>	Tenis Lapangan <i>Court Tennis</i>	Tenis Meja <i>Table Tennis</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	64	67	29	9	6	20
Bintan	34	51	19	6	5	18
Natuna	65	77	16	4	5	18
Lingga	91	94	22	3	3	13
Kepulauan Anambas	48	53	8	1	1	11
Kota Batam	41	63	48	32	13	38
Kota Tanjungpinang	10	16	11	5	8	9
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>353</b>	<b>421</b>	<b>153</b>	<b>60</b>	<b>41</b>	<b>127</b>

Lanjutan Tabel/Continued Table 6.2

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Futsal <i>Futsal</i>	Renang <i>Swimming Pool</i>	Bela Diri <i>Martial Arts</i>	Bilyard <i>Billiards</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Karimun	26	8	9	9	6
Bintan	15	1	14	8	9
Natuna	7	2	8	7	21
Lingga	31	1	4	9	5
Kepulauan Anambas	4	–	10	4	11
Kota Batam	25	18	36	29	11
Kota Tanjungpinang	10	4	3	9	1
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>118</b>	<b>34</b>	<b>84</b>	<b>75</b>	<b>64</b>

<https://kepri.bps.go.id>



# ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI

BAB  
Chapter

07

TRANSPORTATION, COMMUNICATION,  
AND INFORMATION

## KEKUATAN SINYAL TELEPON SELULER DAN INTERNET DI DESA/KELURAHAN

THE STRENGTH OF CELLULAR PHONE AND INTERNET SIGNAL IN VILLAGES/SUBDISTRICTS

### Persentase Desa/Kelurahan Menurut Kekuatan Sinyal Telepon Seluler di Sebagian Besar Wilayah

Percentage of Villages/Subdistricts by the Strength of Cellular Phone Signal in Most Areas



### Persentase Desa/Kelurahan Menurut Kekuatan Sinyal Internet di Sebagian Besar Wilayah

Percentage of Villages/Subdistricts by the Strength of Internet Signal in Most Areas



## KEBERADAAN SARANA KOMUNIKASI DI DESA/KELURAHAN

THE PRESENCE OF COMMUNICATION FACILITIES IN VILLAGES/SUBDISTRICTS

01



43,26%

Desa/Kelurahan Terdapat Warnet

Villages/Subdistricts have Internet Stall

02



18,37%

Desa/Kelurahan Terdapat Kantor Pos/ Pos Pembantu/Rumah Pos

Villages/Subdistricts have Post Office/Sub-Post Office/Post House

03



5,58%

Desa/Kelurahan Terdapat Pos Keliling

Villages/Subdistricts have Mobile Postal Service

04



25,81%

Desa/Kelurahan Terdapat Perusahaan Jasa Ekspedisi Swasta

Villages/Subdistricts have Private Expedition Service Company



## Penjelasan Teknis Angkutan, Komunikasi, dan Informasi

1. Prasarana Transportasi adalah sarana penunjang lalu lintas pemindahan orang dan atau barang, yang terdiri atas jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan lain-lain yang digunakan oleh warga desa untuk mobilitas dari dan ke desa terdekat.
2. Angkutan Umum adalah sarana angkutan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan).
3. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang atau orang dan barang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
4. Jenis Permukaan Jalan Terluas adalah jenis permukaan jalan terluas yang ada di desa/kelurahan. Jenis permukaan jalan terdiri dari: aspal/beton, diperkeras (dengan kerikil atau batu), tanah, dan lainnya yaitu terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa, termasuk jalan setapak, jalan di hutan dan sejenisnya.
5. *Base Transceiver Station (BTS)* adalah alat yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima (*transceiver*) sinyal komunikasi

## *Technical Notes Transportation, Communication, and Information*

1. *Transportation Infrastructure is a facility of supporting the transfer of people and or goods, which consists of roads, bridges, docks, harbors, etc used by villagers for mobility to and from the nearest village.*
2. *Public Transportation is the transportation infrastructure to transfer of people and or goods from one place to another by using a motor vehicle that is provided to the public with payment (Regulation of Government No. 41 Year 1993 about Road Transportation).*
3. *Route is the track of public transport for the transportation service for people and or goods, which has fixed trip origin and destination, fixed route, and fixed schedule or unscheduled.*
4. *The Type of Widest Road Surface is the widest road surface in the village/subdistrict. This types of road surface consisting of: asphalt/concrete, pebble (with gravel or stone), land, and others such as made of wood/board that is usually used in swamp areas, including walkways, roads in the forests, etc.*
5. *Cellular Phone Tower or Base Transceiver Station (BTS) is a tool that serves as the sender and receiver (transceiver) of cellular*

seluler. Biasanya BTS ditandai adanya menara/tower yang dilengkapi antena sebagai perangkat *transceiver*.

6. Sinyal telepon seluler adalah besaran elektromagnetik yang berubah dalam ruang dan waktu dengan membawa informasi yang memberikan konfirmasi bahwa layanan telepon seluler sudah tersedia.
7. Sinyal internet telepon seluler adalah jaringan sistem data paket internet dengan kecepatan transfer data tertentu. Paket data disini biasanya digunakan dalam melakukan akses internet. Protokol transfer data ini mengalami beberapa perubahan mulai dari yang kecepatannya rendah sampai tinggi yaitu 2,5G/E/GPRS, 3G/H/H+/EVDO, hingga 5G/4G/LTE.
8. Program TV adalah program yang dirancang/disusun oleh stasiun/pemancar TV, baik stasiun TVRI, TV daerah, TV swasta, maupun TV luar negeri. Program TV yang dimaksud adalah program TV baik menggunakan antena parabola/TV kabel maupun tidak.
9. Warnet adalah usaha penyewaan jasa internet seperti: usaha sewa komputer dengan jaringan internet termasuk yang digunakan sebagai *game online*.
10. Kantor Pos adalah tempat pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan

*communication signals. Usually, BTS is marked with a tower equipped with antenna as transceiver devices.*

6. *Cellular telephone signal is electromagnetic quantities that change in space and time by bringing information that confirms when the cell phone services are available.*
7. *Cellular telephone internet signal is an internet package data system network with certain data transfer speeds. Data packages here are usually used in access the internet. This data transfer protocol has undergone several changes ranging from low to high speeds, namely 2,5G/E/GPRS, 3G/H/H+/EVDO, to 5G/4G/LTE.*
8. *TV program is a program broadcasted by TV stations/transmitters, either by TVRI (state-owned tv broadcast station), or local TV, or private TV, and or foreign TV broadcast. The TV programs covered in this concept are both TV programs using satellite receiver or cable installation TV and the other types of reception.*
9. *The Internet Stall is an internet service rental business such as: computer rental business with internet network including those asserve online games.*
10. *Post Office is a service provider place of written communication and or electronic mail, parcel service, logistics services, financial transaction services, postal and agency services to the public. Postal house has the same function as the post office and subsidiary of post office, the*

kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

11. Pos Keliling adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu.
12. Perusahaan Jasa Agen Ekspedisi Swasta adalah pelayanan pengiriman paket maupun dokumen yang dikelola oleh pihak swasta, misalnya Tiki, JNE, ESL, d.l.l.

*difference is that postal house usually located in remote areas.*

11. *Mobile Postal Service is nomadic postal service (to sell, send, and receive postal stationery) by car or transportation facility that the functions are the same as the post office or subsidiary of post office.*
12. *Private Expedition Service Company is packages and documents delivery service managed by privates, for example Tiki, JNE, ESL, etc.*

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL**  
TABLE : 7.1

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS PRASARANA  
TRANSPORTASI DAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY TYPE OF TRANSPORTATION  
INFRASTRUCTURE AND AVAILABILITY OF PUBLIC TRANSPORTATION

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jenis Prasarana Transportasi <i>The Type of Transportation Infrastructure</i>				Ketersediaan Angkutan Umum <i>The Availability of Public Transportation</i>		
	Darat <i>Land</i>	Air <i>Water</i>	Darat dan Air <i>Land and Water</i>	Udara <i>Air</i>	Ada, Dengan Trayek Tetap <i>Available with Fixed Routes</i>	Ada, Tanpa Trayek Tetap <i>Available without Fixed Routes</i>	Angkutan Umum <i>Not Available</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Karimun	43	7	21	–	51	9	11
Bintan	33	4	14	–	17	8	26
Natuna	25	1	51	–	37	13	27
Lingga	39	6	50	–	47	42	6
Kepulauan Anambas	12	17	25	–	24	16	14
Kota Batam	43	7	14	–	48	14	2
Kota Tanjungpinang	14	–	4	–	1	17	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>209</b>	<b>42</b>	<b>179</b>	<b>–</b>	<b>225</b>	<b>119</b>	<b>86</b>

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL** : 7.2  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG MENGGUNAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT ATAU DARAT DAN AIR MENURUT JENIS PERMUKAAN JALAN DARAT TERLUAS**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS USED LAND OR LAND AND WATER TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE BY TYPE OF THE WIDEST ROAD SURFACE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Aspal/Beton <i>Asphalt/Concrete</i>	Diperkeras (Kerikil, Batu, dll) <i>Pebble</i>	Tanah <i>Land</i>	Lainnya <i>Others</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	57	3	4	–	64
Bintan	47	–	–	–	47
Natuna	75	1	–	–	76
Lingga	72	5	12	–	89
Kepulauan Anambas	36	–	–	1	37
Kota Batam	54	2	1	–	57
Kota Tanjungpinang	17	1	–	–	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>358</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>388</b>

**TABEL** : 7.3  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN *BASE TRANSCEIVER STATION (BTS)*, SINYAL TELEPON SELULER, DAN SINYAL INTERNET TELEPON SELULER/*HANDPHONE***  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY EXISTENCE OF *BASE TRANSCEIVER STATION (BTS)*, CELLULAR PHONE SIGNAL, AND INTERNET SIGNAL OF CELLULAR PHONE/*HANDPHONE*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Keberadaan BTS <i>The Existence of BTS</i>		Kekuatan Sinyal Telepon Seluler <i>The Strenght of Cellular Phone Signal</i>			
	Ada <i>Exist</i>	Tidak Ada <i>Not Exist</i>	Sangat Kuat <i>Very Strong</i>	Kuat <i>Strong</i>	Lemah <i>Weak</i>	Tidak Ada Sinyal <i>No Signal</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	59	12	19	43	9	–
Bintan	37	14	9	30	12	–
Natuna	65	12	17	30	30	–
Lingga	64	31	7	61	27	–
Kepulauan Anambas	43	11	9	29	16	–
Kota Batam	59	5	38	19	7	–
Kota Tanjungpinang	18	–	10	8	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>345</b>	<b>85</b>	<b>109</b>	<b>220</b>	<b>101</b>	<b>–</b>

<https://kepri.iis.go.id>



Lanjutan Tabel/Continued Table 7.3

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sinyal Internet Telepon Seluler/ <i>Handphone</i> <i>Internet Signal of Cellular Phone/Handphone</i>			
	5G/4G/LTE <i>5G/4G/LTE</i>	3G/H/H+/ EVDO <i>3G/H/H+/ EVDO</i>	2,5G/E/GPRS <i>2.5G/E/GPRS</i>	Tidak Ada Sinyal Internet <i>No Internet Signal</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
Karimun	67	4	–	–
Bintan	43	3	5	–
Natuna	75	2	–	–
Lingga	77	11	7	–
Kepulauan Anambas	50	4	–	–
Kota Batam	60	4	–	–
Kota Tanjungpinang	18	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>390</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>–</b>

**TABEL** : 7.4  
**TABLE**

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN SARANA KOMUNIKASI**  
**NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF COMMUNICATION FACILITIES**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Warnet <i>Internet Stall</i>	Kantor Pos/ Pos Pembantu/ Rumah Pos <i>Post Office/Subsidiary of Post Office</i>	Pos Keliling <i>Mobile Postal Service</i>	Perusahaan Jasa Ekspedisi Swasta <i>Private Expedition Service Company</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	23	10	10	19
Bintan	34	9	5	8
Natuna	36	10	2	12
Lingga	14	7	2	6
Kepulauan Anambas	16	4	–	8
Kota Batam	45	34	5	45
Kota Tanjungpinang	18	5	–	13
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>186</b>	<b>79</b>	<b>24</b>	<b>111</b>

<https://kepri.lbps.go.id>

**TABEL** : 7.5  
**TABLE**

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT PROGRAM TELEVISI DAN RADIO YANG DAPAT DITERIMA WARGA**  
**NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY TELEVISION AND RADIO PROGRAMS THAT CAN BE RECEIVED BY PEOPLE**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Program TV/ <i>TV Program</i>				Tidak Ada Program Televisi yang Dapat Diterima <i>No Television Program That Can Be Received</i>
	TVRI <i>TV of The Republic Indonesia</i>	TVRI Daerah <i>Local TV of The Republic Indonesia</i>	TV Swasta <i>Commercial TV</i>	TV Luar Negeri <i>Foreign TV</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	68	57	70	70	–
Bintan	45	44	50	45	–
Natuna	77	53	75	66	–
Lingga	93	85	93	94	1
Kepulauan Anambas	47	12	51	47	1
Kota Batam	62	55	64	61	–
Kota Tanjungpinang	18	16	18	18	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>410</b>	<b>322</b>	<b>421</b>	<b>401</b>	<b>2</b>

Lanjutan Tabel/Continued Table 7.5

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Program Radio/ <i>Radio Program</i>		
	RRI <i>RRI</i>	RRI Daerah <i>RRI Region</i>	Radio Swasta/ Komunitas <i>Private/Community Radio</i>
(1)	(7)	(8)	(9)
Karimun	58	53	67
Bintan	47	50	48
Natuna	36	36	27
Lingga	85	84	82
Kepulauan Anambas	14	4	9
Kota Batam	63	59	60
Kota Tanjungpinang	18	18	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>321</b>	<b>304</b>	<b>311</b>

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL** : 7.6  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN  
KOMPUTER DAN FASILITAS INTERNET DI KANTOR KEPALA  
DESA/LURAH**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF  
COMPUTER AND INTERNET FACILITY IN VILLAGE OFFICE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Komputer/Laptop/PC yang Masih Berfungsi <i>Computer/Laptop/PC that Still Work</i>			
	Digunakan <i>Used</i>	Jarang Digunakan <i>Rarely Used</i>	Tidak Digunakan <i>Not Used</i>	Tidak Ada <i>No Computer</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	70	1	–	–
Bintan	51	–	–	–
Natuna	77	–	–	–
Lingga	95	–	–	–
Kepulauan Anambas	54	–	–	–
Kota Batam	63	1	–	–
Kota Tanjungpinang	18	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>428</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

Lanjutan Tabel/Continued Table 7.6

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Fasilitas Internet <i>Internet Facility</i>			
	Berfungsi <i>Working</i>	Jarang Berfungsi <i>Rarely Works</i>	Tidak Berfungsi <i>Does not work</i>	Tidak Ada <i>No Internet</i>
	(1)	(6)	(7)	(8)
Karimun	57	2	2	10
Bintan	48	1	1	1
Natuna	63	4	8	2
Lingga	41	4	6	44
Kepulauan Anambas	50	1	3	–
Kota Batam	60	–	2	2
Kota Tanjungpinang	18	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>337</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>59</b>

<https://kepri.bps.go.id>

# KEGIATAN DAN SARANA KEAMANAN

BAB  
Chapter

08

SECURITY ACTIVITIES AND FACILITIES

01 26,74%

Desa/Kelurahan Terdapat Pos Polisi (Termasuk Polsek, Polres, dan Polda)

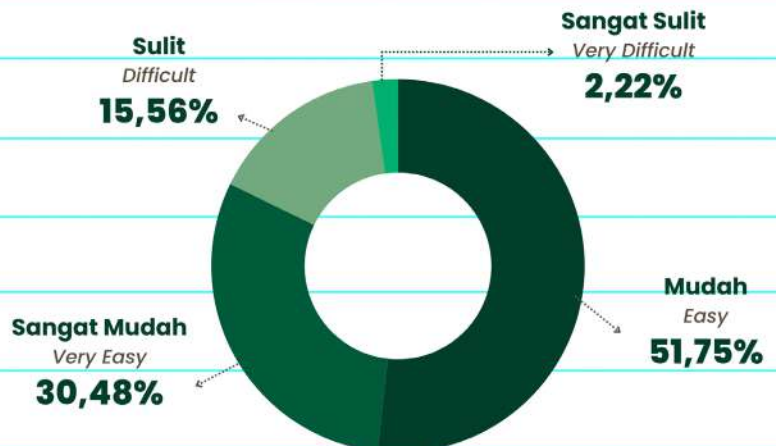
Villages/Subdistricts have Police Station (Including Sectoral Police, Resort/Departmental Police, and Regional Police)



Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Pos Polisi Menurut Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat

02

Percentage of Villages/Subdistricts without Police Station by The Ease of Access to The Nearest Police Station







## Penjelasan Teknis Kegiatan dan Sarana Keamanan

1. Pos Polisi adalah tempat polisi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah sekitar, termasuk Polisi Sektor (Polsek), Polisi Resort (Polres), dan Polisi Daerah (Polda).
  - a. Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan.
  - b. Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kabupaten.
  - c. Kepolisian Daerah (Polda) adalah struktur komando Kepolisian Indonesia di tingkat provinsi.

## *Technical Notes Security Activities and Facilities*

1. *Police Stations is a place where the police maintain security around the region, includes the sector police, the resort police, and the regional police.*
  - a. *The Sector Police is the Indonesian police command structure at the subdistrict level.*
  - b. *The Resort Police is the Indonesian police command structure at the regency level.*
  - c. *The Regional Police is the Indonesian police command structure at the province level.*

**TABEL** : 8.1  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS UPAYA WARGA  
MENJAGA KEAMANAN LINGKUNGAN SELAMA SETAHUN TERAKHIR**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY TYPE OF CITIZEN'S EFFORT TO  
SECURE COMMUNITY WITHIN LAST YEAR

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pos Keamanan Lingkungan <i>Building/ Maintenance Security Post</i>	Pembentukan/ Pengaturan Regu Keamanan <i>Establishing Security Guard</i>	Penambahan Jumlah Anggota Hansip/Linmas <i>Raising Civil Defense/Civil Protection Personnel</i>	Pelaporan Tamu Menginap Lebih dari 24 Jam <i>Reporting Guests Staying More Than 24 Hours</i>	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga <i>Activation of Security System from Citizen Initiative</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	26	21	8	57	36
Bintan	32	29	19	45	36
Natuna	17	17	24	55	14
Lingga	32	47	28	82	36
Kepulauan Anambas	13	28	16	45	20
Kota Batam	35	31	13	55	52
Kota Tanjungpinang	16	13	10	18	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>171</b>	<b>186</b>	<b>118</b>	<b>357</b>	<b>212</b>

**TABEL** : 8.2  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN POS POLISI DAN KEMUDAHAN AKSES KE POS POLISI TERDEKAT**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY EXISTENCE OF POLICE STATION AND EASY ACCESS TO NEAREST POLICE STATION

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pos Polisi (Termasuk Polsek, Polres, dan Polda) <i>Police Station (Includes Sector Police, Resort Police, and Regional Police)</i>		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Pos Polisi) <i>The Ease of Access to Nearest Police Station (For Village/Kelurahan That Not Having Police Station)</i>			
	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>	Sangat Mudah <i>Very Easy</i>	Mudah <i>Easy</i>	Sulit <i>Difficult</i>	Sangat Sulit <i>Very Difficult</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	14	57	22	23	12	–
Bintan	23	28	7	18	–	3
Natuna	9	68	18	33	16	1
Lingga	23	72	16	50	5	1
Kepulauan Anambas	6	48	7	26	13	2
Kota Batam	30	34	20	11	3	–
Kota Tanjungpinang	10	8	6	2	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>115</b>	<b>315</b>	<b>96</b>	<b>163</b>	<b>49</b>	<b>7</b>



# SARANA EKONOMI DAN INDUSTRI

BAB  
Chapter

09

ECONOMY AND INDUSTRY  
FACILITIES



50,70%

Desa/Kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki produk barang unggulan

*Villages/Subdistricts in Kepulauan Riau Province that have Leading Products*

20,18%

Desa/Kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki produk barang unggulan yang diekspor ke negara lain

*Villages/Subdistricts in Kepulauan Riau Province that have Leading Products that exported to other country*



79,82%

Desa/Kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki produk barang unggulan tetapi tidak diekspor ke negara lain

*Villages/Subdistricts in Kepulauan Riau Province that have Leading Products but not exported to other country*





## Penjelasan Teknis Sarana Ekonomi dan Industri

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip:
  - a. Keanggotaannya sukarela dan terbuka;
  - b. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis;
  - c. Pembagian sisa hasil usahanya dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
  - e. Kemandirian, serta sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
2. Fasilitas Perkreditan adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Tidak termasuk pinjaman dari perorangan.
3. Industri Kecil dan Mikro dikelompokkan menurut bahan baku utama dengan tenaga kerja kurang dari dua puluh pekerja
  - a. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (tas, sepatu, sandal, ikat pinggang, dll).
  - b. Industri furnitur dari kayu, rotan/bambu, plastik logam, (meja, kursi, tempat tidur, lemari, dll).
  - c. Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya (teralis, pagar, sabit, pisau, parang, gunting, sendok,

## Technical Notes Economy and Industry Facilities

1. *Cooperative is a business entity consisting of people or cooperative legal entities which activities are based on the principles:*
  - a. *Membership is voluntary and open;*
  - b. *Management is conducted democratically;*
  - c. *Benefits are distributed proportionally according to the member's share;*
  - d. *Remuneration is limited to the capital; and*
  - e. *Independence, as well as the people's economic movement based on the principle of kinship;*
2. *Credit facility is financial facilities that allow a person or business entity to borrow money to buy a product and repay it within a specified period. Not included loans from individuals.*
3. *Small and Micro Industry is classified by the main raw materials with a workforce of less than twenty workers.*
  - a. *Leather and Related Products and Footwear Industry, examples: the making of bags, shoes, sandals, etc*
  - b. *Furniture of Wood, Rattan/Bamboo, Plastic, Metal Industry, examples: making tables, chairs, beds, cupboards, etc.*
  - c. *Metal Products, Non-Machinery and Equipment Industry, examples: trellis, fence, sickle, knife, machete, scissors, spoon,*

- golok, dll).
- d. Industri tekstil (kain ulos, kain songket, kain tenun, dan percetakan batik, dll).
  - e. Industri Industri pakaian jadi (konveksi, pakaian, kemeja, rok, celana, mukena bordir).
  - f. Industri barang galian bukan logam/ industri gerabah/keramik/batu bata (genteng, batu bata, porselin, tegel, keramik, kaca patri, cangkir, guci, dll)
  - g. Industri kayu, barang dari kayu, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (reng kayu, papan, anyaman tas dan tikar kusen, dll).
  - h. Industri makanan (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah, sayuran, minyak dan lemak, susu, dll).
  - i. Industri minuman (minuman kemasan, air mineral, air isi ulang, sopi dll)
  - j. Industri pengolahan tembakau (industri rokok, pengeringan dan perajangan tembakau).
  - k. Industri kertas dan barang dari kertas (kantong kertas, post card, kardus, sak semen)
  - l. Industri percetakan dan reproduksi media rekaman (buku, brosur, kartu nama, kalender, spanduk, dll).
  - m. Industri alat angkutan lainnya (perahu, klotok, rakit, kursi roda, dll).
  - n. Industri kerajinan dan lainnya (kerajinan tangan, mainan anak-anak batu akik, perhiasan emas/imitasi, dll).
  - o. Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan (las keliling, reparasi dinamo, reparasi mesin penggiling
- cleaver, etc.*
- d. *Textile Industry; examples: ulos cloth, songket cloth, woven cloth, and batik printing, etc.*
  - e. *Apparel Industry, examples: convection, clothing, shirts, skirts, trousers, embroidered mukena.*
  - f. *Other Non-Metallic Mineral Products/ Manufacture of Pottery/Ceramic/Brick Industry, examples: roof tiles, bricks, porcelain, tiles, ceramics, stained glass, cups, jars, etc*
  - g. *Wood Products, Woven Product of Bamboo, Rattan, and Other Related Materials Industry, examples: wooden battens, planks, woven bags and mats, frames, etc.*
  - h. *Food Industry, examples: processing and preservation of meat, fish, fruit, vegetables, oils and fats, milk, etc.*
  - i. *Beverage Industry, examples: packaged drinks, mineral water, refilled water, sopi etc.*
  - j. *Tobacco Products Industry, examples: cigarette industry, drying and shredding tobacco*
  - k. *Paper and Paper Products Industry, examples: paper bags, post cards, cardboard, cement sacks*
  - l. *Printing and Reproduction of Recorded Media Industry, examples: books, brochures, business cards, calendars, banners, etc.*
  - m. *Other Transport Equipment Industry, examples: boats, kelotok, rafts, wheelchairs, etc.*
  - n. *Craft Industry and Others, examples: handicrafts, children's toys, gemstones, gold/ imitation jewelry, etc.*
  - o. *Repair and Installation of Machinery and Equipment, examples: mobile welding, dynamo repair, rice milling machine repair,*



- padi, dll)
- p. Industri lainnya adalah industri selain yang telah disebutkan sebelumnya
4. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang bersifat informal yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuhkan kembangkan usaha mikro dan kecil.
  5. Pergadaian adalah badan usaha yang secara resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Menurut Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.
  6. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah mesin elektronik yang dapat melayani nasabah bank untuk melakukan berbagai kegiatan perbankan (mengambil uang, transfer, mengecek rekening tabungan, d.l.l) secara mandiri tanpa perlu dilayani oleh petugas bank.
  7. Bengkel mobil/motor adalah tempat yang menyediakan ruang dan peralatan untuk melakukan konstruksi atau manufaktur dan memperbaiki mobil atau motor.
  8. Salon Kecantikan adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Variasi lain dari jenis usaha salon kecantikan adalah salon rambut, dan salon tangan dan kuku (pedikur dan manikur).

- etc.*
- p. Other industries are industries other than those mentioned previously.*
4. *Sharia Financial Services Cooperative is an informal microfinance institution that is operated with the principle of profit sharing to grow micro and small businesses.*
  5. *Pawnshop is a business entity that officially has permission to carry out financial institution activities in the form of financing in the terms of funds distribution to the public on the basis of pawning law. According to the Civil Law Article 1150, pawning is a right obtained by someone who has a receivable of a movable item.*
  6. *Automated Teller Machine (ATM) is electronic machine that can serve bank customers to carry out various banking activities (withdrawing and transferring money, checking savings accounts, etc.) independently without being served by bank tellers.*
  7. *Car/motorcycle repair shop is a place that provides space and equipment to carry out construction or manufacture and repair cars or motorbikes.*
  8. *Beauty salon is a business that deals with cosmetics, facial and hair care, for both men and women. Other variations of this type of beauty salon business are hair salons, and hand and nail salons (pedicures and manicures).*

9. Agen tiket/travel/biro perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang maupun sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
  10. Agen Bank adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.
9. *Ticket / travel agent / travel agency is a commercial business activity that arranges and provides services for a person or group of people to travel with the main purpose of recreational trip.*
  10. *Agent Bank is the party who collaborates with the Laku Pandai bank that is the bank's representative to provide banking services to the public in the context of financial inclusion as agreed.*

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL : 9.1**  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN SARANA PERDAGANGAN DAN AKOMODASI**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF TRADING AND ACCOMODATION FACILITY

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sarana Perdagangan <i>Trading Facility</i>				Sarana Akomodasi <i>Acomodation Facility</i>	
	Mini Market/Swalayan/ Supermarket	Restoran/ Rumah Makan	Warung/Keda i Makanan Minuman	Toko/Warung Kelontong	Hotel	Penginapan Inn
	<i>Mini Market/Swalayan/ Supermarket</i>	<i>Restaurant/ Food Stall</i>	<i>Food and Beverage Store</i>	<i>Shop/Grocery Store</i>	<i>Hotel</i>	<i>Inn</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	25	20	66	71	8	9
Bintan	23	17	45	51	9	12
Natuna	4	2	64	77	5	14
Lingga	6	17	75	95	4	14
Kepulauan Anambas	4	13	48	54	2	12
Kota Batam	48	50	62	64	33	26
Kota Tanjungpinang	18	18	18	18	10	10
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>128</b>	<b>137</b>	<b>378</b>	<b>430</b>	<b>71</b>	<b>97</b>

**TABEL 9.2**  
**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT**  
**KEBERADAAN KELOMPOK PERTOKOAN, PASAR DAN**  
**TOKO/KIOS SARANA PRODUKSI PERTANIAN**  
**NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY**  
**OF SHOPPING COMPLEXES, MARKETS, AND AGRICULTURAL**  
**PRODUCTION SHOP/STALL**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kelompok Pertokoan <i>Shopping Complexes</i>	Pasar dengan	Pasar dengan	Pasar tanpa	Tidak ada
		Bangunan Permanen <i>Markets in Permanent Building</i>	Bangunan Semi Permanen <i>Market in Semi Permanent Building</i>	Bangunan <i>Market without Permanent Building</i>	Kelompok Pertokoan dan Pasar <i>No Shopping Complexes and Markets</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	22	8	–	–	48
Bintan	11	6	1	–	38
Natuna	3	2	3	–	72
Lingga	6	6	–	1	86
Kepulauan Anambas	3	5	1	1	48
Kota Batam	43	31	10	12	20
Kota Tanjungpinang	14	5	1	2	2
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>102</b>	<b>63</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>314</b>

Lanjutan Tabel/Continued Table 9.2

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Toko/Kios Sarana Produksi Pertanian <i>Agricultural Production Shop/Stall</i>		
	KUD <i>Village Cooperative Unit</i>	BUM Desa <i>Village Government Enterprise</i>	Non-KUD/BUM Desa <i>Non-Village Cooperative Unit/Village Government Enterprise</i>
	(1)	(7)	(8)
Karimun	1	9	6
Bintan	1	10	13
Natuna	1	2	11
Lingga	–	5	24
Kepulauan Anambas	–	7	1
Kota Batam	–	–	5
Kota Tanjungpinang	1	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>60</b>

**TABEL : 9.3 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN BANK**  
**TABLE : 9.3 NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF BANK**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jenis Bank <i>The Type of Bank</i>			Tidak Ada Bank <i>No Bank</i>
	Bank Umum Pemerintah <i>Government Bank</i>	Bank Umum Swasta <i>Private Bank</i>	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) <i>Rural Bank</i>	
	(1)	(2)	(3)	
Karimun	8	3	7	61
Bintan	6	3	6	42
Natuna	5	1	1	71
Lingga	4	–	1	91
Kepulauan Anambas	4	2	–	50
Kota Batam	27	21	15	33
Kota Tanjungpinang	11	6	6	6
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>65</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>354</b>

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL : 9.4 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN KOPERASI**  
**TABLE : 9.4 NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF COOPERATIVES**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Koperasi Unit Desa <i>Village Cooperative Unit</i>	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat <i>Small Industry and Citizen Handicraft Cooperative</i>	Koperasi Simpan Pinjam <i>Savings and Loan Cooperative</i>	Koperasi Lainnya <i>Other Cooperative</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	2	–	10	1
Bintan	5	1	17	–
Natuna	4	–	7	7
Lingga	4	1	11	6
Kepulauan Anambas	1	–	4	1
Kota Batam	1	–	27	34
Kota Tanjungpinang	2	–	14	1
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>90</b>	<b>50</b>

**TABEL : 9.5**  
**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN FASILITAS PERKREDITAN SELAMA SETAHUN TERAKHIR**  
**NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF CREDIT FACILITIES WITHIN LAST YEAR**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kredit Usaha Rakyat (KUR) <i>Micro Credit Program</i>	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) <i>Loan for Food Sustainability Program and Energy</i>	Kredit Usaha Kecil (KUK) <i>Credit for Small Enterprises</i>	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) <i>Joint Business Group</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	55	1	7	31
Bintan	33	–	6	41
Natuna	27	1	2	17
Lingga	59	–	1	18
Kepulauan Anambas	13	–	1	7
Kota Batam	45	–	13	31
Kota Tanjungpinang	14	1	10	12
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>246</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>157</b>

<https://kepri.bps.go.id>



**TABEL** : 9.6  
**TABLE**

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN SARANA  
PENUNJANG EKONOMI**  
**NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF ECONOMIC  
SUPPORTING FACILITIES**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) <i>Sharia Financial Services</i>	Pergadaian <i>Pawnshops</i>	Anjungan Tunai Mandiri (ATM) <i>Automated Teller Machines</i>	Bengkel Mobil/Motor <i>Car/ Motorcycle Repair</i>	Salon Kecantikan <i>Beauty Salon</i>	Agen Tiket/Travel/B iro Perjalanan <i>Ticket/Travel Agent</i>	Agen Bank <i>Agent Bank</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Karimun	–	12	20	58	24	13	52
Bintan	1	5	12	45	23	10	28
Natuna	5	3	7	57	15	9	24
Lingga	1	2	4	51	13	8	49
Kepulauan Anambas	–	2	4	25	6	5	20
Kota Batam	7	34	44	53	49	43	46
Kota Tanjungpinang	2	12	15	18	17	13	17
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>16</b>	<b>70</b>	<b>106</b>	<b>307</b>	<b>147</b>	<b>101</b>	<b>236</b>

**TABEL** : 9.7  
**TABLE**

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN DAN JENIS INDUSTRI KECIL DAN MIKRO**  
**NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY AND TYPE OF SMALL AND MICRO INDUSTRY**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki <i>Leather and Related Products and Footwear Industry</i>	Industri Furnitur dari Kayu, Rotan/Bambu, Plastik, Logam <i>Furniture of Wood, Rattan/Bamboo, Plastic, Metal Industry</i>	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya <i>Metal Products, Non- Machinery and Equipment Industry</i>	Industri Tekstil <i>Textile Industry</i>	Industri Pakaian Jadi <i>Apparel Industry</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	1	37	40	2	48
Bintan	1	19	12	2	27
Natuna	–	33	12	–	34
Lingga	–	43	25	3	23
Kepulauan Anambas	–	23	6	1	7
Kota Batam	5	32	41	23	25
Kota Tanjungpinang	2	12	14	2	15
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>9</b>	<b>199</b>	<b>150</b>	<b>33</b>	<b>179</b>

Lanjutan Tabel/Continued Table 9.7

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Industri Barang Galian Bukan Logam/Industri Gerabah/Keramik/Batu Bata <i>Other Non-Metallic Mineral Products/Manufacture of Pottery/Ceramic/Brick Industry</i>	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya <i>Wood Products, Woven Product of Bamboo, Rattan, and Other Related Materials Industry</i>	Industri Makanan <i>Food Industry</i>	Industri Minuman <i>Beverage Industry</i>	Industri Pengolahan Tembakau <i>Tobacco Products Industry</i>	Industri Kertas dan Barang dari Kertas <i>Paper and Paper Products Industry</i>
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Karimun	47	44	58	51	–	–
Bintan	14	20	41	30	–	–
Natuna	14	38	66	48	–	–
Lingga	36	67	74	46	–	1
Kepulauan Anambas	14	23	40	29	–	–
Kota Batam	22	23	50	58	1	4
Kota Tanjungpinang	2	4	17	17	–	1
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>149</b>	<b>219</b>	<b>346</b>	<b>279</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

Lanjutan Tabel/Continued Table 9.7

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman <i>Printing and Reproduction of Recorded Media Industry</i>	Industri Alat Angkutan Lainnya <i>Other Transport Equipment Industry</i>	Industri Kerajinan dan Lainnya <i>Craft Industry and Others</i>	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan <i>Repair and Installation of Machinery and Equipment</i>	Industri Lainnya <i>Other Industry</i>
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Karimun	18	20	8	14	2
Bintan	7	8	3	9	1
Natuna	5	25	5	9	2
Lingga	6	57	13	23	4
Kepulauan Anambas	3	21	1	6	1
Kota Batam	33	6	10	8	2
Kota Tanjungpinang	10	1	6	4	1
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>82</b>	<b>138</b>	<b>46</b>	<b>73</b>	<b>13</b>

**TABEL** : 9.8  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN PRODUK BARANG UNGGULAN DAN DI EKSPOR KE NEGARA LAIN**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF LEADING PRODUCTS AND EXPORTED TO OTHER COUNTRY

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Produk Barang Unggulan <i>Leading Product</i>		Produk Unggulan Diekspor ke Negara Lain <i>Exported Leading Product</i>	
	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	40	31	19	21
Bintan	26	25	10	16
Natuna	53	24	2	51
Lingga	40	55	3	37
Kepulauan Anambas	32	22	2	30
Kota Batam	18	46	7	11
Kota Tanjungpinang	9	9	1	8
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>218</b>	<b>212</b>	<b>44</b>	<b>174</b>



# KEUANGAN DAN ASET DESA

BAB  
Chapter

10

VILLAGE FINANCIAL AND ASSETS

## 01 UNIT USAHA BUMDES

73,08%

Desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Villages have BUMDes

## 02 PASAR DESA

2,45%

Desa memiliki Pasar Desa

Villages have Village's Market

## 03 BANGUNAN MILIK DESA

97,20%

Desa terdapat Bangunan Milik Desa

Villages have Village's Building

## 04 MATA AIR MILIK DESA

48,25%

Desa terdapat Mata Air Milik Desa

Villages have Village's Spring







## Penjelasan Teknis Keuangan dan Aset Desa

1. Sistem Informasi Desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem Informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
2. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
3. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Aset desa dapat berupa Badan Usaha Milik Desa, tanah kas desa/ulayat; bangunan desa, misalnya: kantor kepala desa, balai desa, d.l.l; pasar desa, misalnya: pasar hewan, pelelangan ikan, dan pelelangan hasil pertanian; atau aset desa lainnya.

## *Technical Notes Village Financial and Assets*

1. *Village Information Systems include village data, village development data, rural areas, as well as other information relating to general rural development and rural areas development. Village Information System is managed by the Village Government and can be accessed by the village community and all stakeholders.*
2. *Village Financial System (SISKEUDES) is an information system application developed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in order to improve the quality of village financial governance.*
3. *Village Asset is village property that is derived from the village original wealth, purchased or obtained at the budget village or other legal rights acquisition (Law No. 6 Year 2014 about Village). Village assets can be Village Owned Enterprise, village land; village buildings, for example: the village head's office, village hall, etc.; village market, for example: animal market, fish auction, and agricultural products auctions; or other village assets.*

**TABEL : 10.1** **BANYAKNYA DESA MENURUT KEBERADAAN SISTEM INFORMASI DESA DAN SISTEM KEUANGAN DESA**  
**TABLE : 10.1** **NUMBER OF VILLAGES BY AVAILABILITY OF VILLAGE INFORMATION SYSTEM AND VILLAGE FINANCIAL SYSTEM**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sistem Informasi Desa <i>Village Information System</i>			Sistem Keuangan Desa <i>Village Financial System</i>		
	Ada, Diperbaharui	Ada, Tidak Diperbaharui	Tidak Ada	Ada, Diperbaharui	Ada, Tidak Diperbaharui	Tidak Ada
	<i>Updated</i>	<i>Not Updated</i>	<i>None</i>	<i>Updated</i>	<i>Not Updated</i>	<i>None</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	32	7	3	40	1	1
Bintan	34	2	–	36	–	–
Natuna	64	5	1	68	2	–
Lingga	57	3	26	72	4	10
Kepulauan Anambas	42	7	3	52	–	–
Kota Batam	–	–	–	–	–	–
Kota Tanjungpinang	–	–	–	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>229</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>268</b>	<b>7</b>	<b>11</b>

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL** : 10.2  
TABLE

**BANYAKNYA DESA MENURUT KEPEMILIKAN BADAN USAHA DAN ASET DESA**  
NUMBER OF VILLAGES BY OWNERSHIP OF ENTERPRISE AND VILLAGE ASSETS

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) <i>Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</i>	Tanah Kas Desa/Ulayat <i>Village's Communal Land</i>	Tambatan Perahu <i>Mooring</i>	Pasar Desa <i>Village's Market</i>	Bangunan Milik Desa <i>Village's Building</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	39	32	30	–	41
Bintan	32	18	22	–	36
Natuna	50	62	56	–	70
Lingga	55	73	69	5	79
Kepulauan Anambas	33	37	45	2	52
Kota Batam	–	–	–	–	–
Kota Tanjungpinang	–	–	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>209</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>7</b>	<b>278</b>

Lanjutan Tabel/*Continued Table* 10.2

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Hutan Milik Desa <i>Village's Forest</i>	Mata Air Milik Desa <i>Village's Springs</i>	Tempat Wisata/ Pemandian Umum <i>Tourist Place/Public Bath</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Karimun	5	3	16	42
Bintan	10	11	10	36
Natuna	13	32	13	70
Lingga	33	57	25	86
Kepulauan Anambas	4	35	16	52
Kota Batam	–	–	–	–
Kota Tanjungpinang	–	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>65</b>	<b>138</b>	<b>80</b>	<b>286</b>

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL 10.3** BANYAKNYA DESA MENURUT KEBERADAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA 2024, PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 2023  
 TABLE NUMBER OF VILLAGES BY AVAILABILITY OF VILLAGE MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN, VILLAGE GOVERNMENT WORK PLAN 2024, VILLAGE REGULATION AND VILLAGE HEAD REGULATION 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) <i>Village Medium-term Development Plan</i>	Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 2024 <i>Village Government Work Plan 2024</i>	Peraturan Desa 2023 <i>Village Regulation 2023</i>	Peraturan Kepala Desa 2023 <i>Village Head Regulation 2023</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	42	42	42	42
Bintan	36	36	35	35
Natuna	70	68	70	70
Lingga	74	78	77	74
Kepulauan Anambas	44	50	52	52
Kota Batam	–	–	–	–
Kota Tanjungpinang	–	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>266</b>	<b>274</b>	<b>276</b>	<b>273</b>



# PERLINDUNGAN SOSIAL DAN STUNTING

BAB  
Chapter

11

SOCIAL PROTECTION AND  
STUNTING

## Persentase Desa menurut Penggunaan Dana Desa 2023

Percentage of Villages by Village's Fund Utilization in 2023



Ada  
**95,80%**

**Penyaluran Dana Desa untuk BLT (3 Bulan  
Pertama)**

*Villages's Fund Distribution for Cash Transfer  
Assistance (First Three Months)*



Ada  
**92,66%**

**Penyaluran Dana Desa untuk BLT (3  
Bulan Kedua)**

*Villages's Fund Distribution for Cash Transfer  
Assistance (Second Three Months)*



Ada  
**60,14%**

**Penyaluran Dana Desa untuk Padat  
Karya Tunai Desa**

*Villages's Fund Distribution for Cash-Intensive  
Work*







## Penjelasan Teknis Perlindungan Sosial dan Stunting

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa.
2. Penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.
4. Posyandu merupakan perpanjangan tangan Puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan posyandu dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Posyandu sebagai wadah peran serta masyarakat, yang menyelenggarakan system pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas manusia, secara empirik telah dapat pemeratakan pelayanan bidang kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak (Departemen Kesehatan, 1999)

## Technical Notes Social Protection and Stunting

1. *Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-Dana Desa) is financial assistance to poor families in villages sourced from the Village Fund.*
2. *Recipients of BLT-Dana Desa are poor or underprivileged families in the village who have not received assistance programs from the Central Government and/or Regional Governments.*
3. *Cash labor intensive (Padat karya tunai) is an activity to empower rural communities, especially the poor and marginal, which is productive by prioritizing the use of local resources, labor, and technology to provide additional wages/income, increase purchasing power, reduce poverty, and at the same time support the reduction of stunting.*
4. *Posyandu is an extension of the Puskesmas that provides integrated health services and monitoring. Posyandu activities are carried out by and for the community. Posyandu as a forum for community participation, which organizes a service system for meeting basic needs, improving human quality, has empirically been able to equalize health services. These activities include immunization services, community nutrition education and maternal and child health services (Ministry of Health, 1999).*

**TABEL** **BANYAKNYA DESA MENURUT KEBERADAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN PADAT KARYA TUNAI DESA**  
**TABLE : 11.1** **NUMBER OF VILLAGES BY AVAILABILITY OF CASH TRANSFER ASSISTANCE AND VILLAGE CASH FOR WORK PROGRAM**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Bantuan Langsung Tunai (Tiga Bulan Pertama) <i>Cash Transfer Assistance (First Three Months)</i>	Bantuan Langsung Tunai (Tiga Bulan Kedua) <i>Cash Transfer Assistance (Second Three Months)</i>	Padat Karya Tunai Desa <i>Village Cash for Work</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	42	42	23
Bintan	36	31	21
Natuna	70	68	56
Lingga	74	72	43
Kepulauan Anambas	52	52	29
Kota Batam	–	–	–
Kota Tanjungpinang	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>274</b>	<b>265</b>	<b>172</b>

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL** : 11.2  
**TABLE** :

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN PAKET LAYANAN TERKAIT *STUNTING* TAHUN 2023**  
**NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF *STUNTING* RELATED SERVICE PACKAGE IN 2023**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kegiatan Posyandu <i>Posyandu Activity</i>	Kelas Ibu Hamil <i>Maternity Class</i>	Kelas Ibu Balita <i>Mom of Toddler Class</i>	PMT Ibu Hamil Kurang Energi Kronis/Resiko Tinggi (RESTI) dari Keluarga Miskin <i>Food Supplement for Pregnant Woman of Poor Families with Chronic Energy Deficiency (CED) and High Risk Pregnancy</i>	Akses Air Minum Aman <i>Access to Clean Water</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	69	58	56	50	51
Bintan	51	46	40	34	42
Natuna	76	66	66	41	42
Lingga	93	79	78	54	63
Kepulauan Anambas	51	42	32	21	32
Kota Batam	64	59	57	44	50
Kota Tanjungpinang	18	18	17	14	15
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>422</b>	<b>368</b>	<b>346</b>	<b>258</b>	<b>295</b>

Lanjutan Tabel/*Continued Table* 11.2

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Akses Jamban Sehat <i>Access to Proper Sanitation</i>	Jaminan Kesehatan untuk Ibu Hamil dari Keluarga Miskin <i>Health Insurance for Pregnant Woman of Poor Families</i>	Jaminan Kesehatan untuk Anak Baduta dari Keluarga Miskin <i>Health Insurance for Child Under 2 Years Old of Poor Families</i>
(1)	(7)	(8)	(9)
Karimun	48	49	43
Bintan	39	36	27
Natuna	58	45	41
Lingga	69	62	56
Kepulauan Anambas	39	21	20
Kota Batam	45	54	49
Kota Tanjungpinang	14	16	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>312</b>	<b>283</b>	<b>254</b>

<https://kepri.bps.go.id>

Lanjutan Tabel/ *Continued Table 11.2*

Kabupaten/Kota <i>Regency/ Municipality</i>	Akta Kelahiran untuk Bayi dari Keluarga Miskin <i>Birth Certificate for Baby of Poor Families</i>	Kelas Pengasuhan <i>Parenting Class</i>	Pemanfaatan Pekarangan Keluarga dan Tanah Desa <i>Utilization of Family Yard and Village Land</i>
(1)	(10)	(11)	(12)
Karimun	50	7	29
Bintan	33	9	27
Natuna	39	11	31
Lingga	76	12	39
Kepulauan Anambas	33	12	17
Kota Batam	46	27	42
Kota Tanjungpinang	18	11	15
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>295</b>	<b>89</b>	<b>200</b>



# KETERANGAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

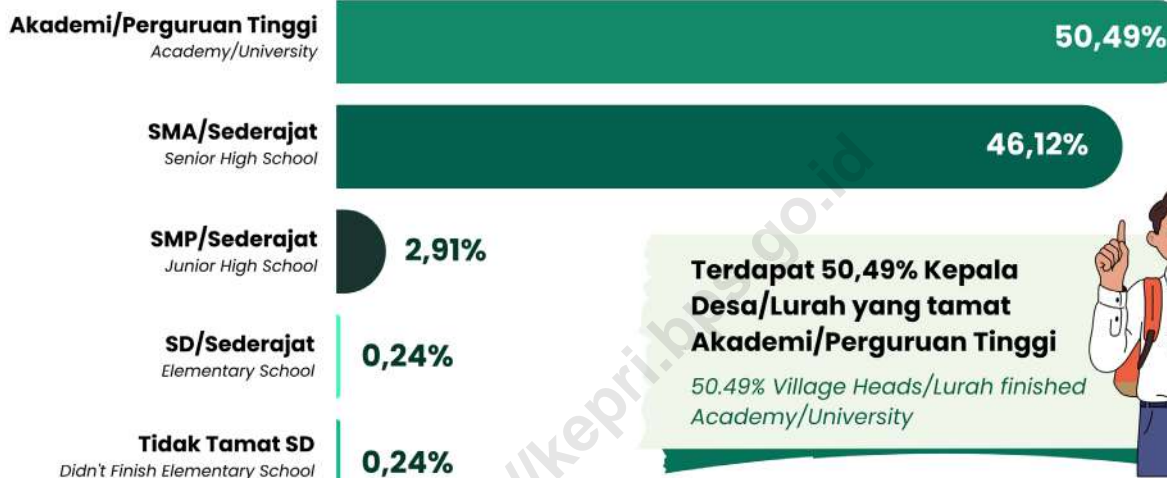
BAB  
Chapter

# 12

VILLAGE GOVERNMENT  
INFORMATION

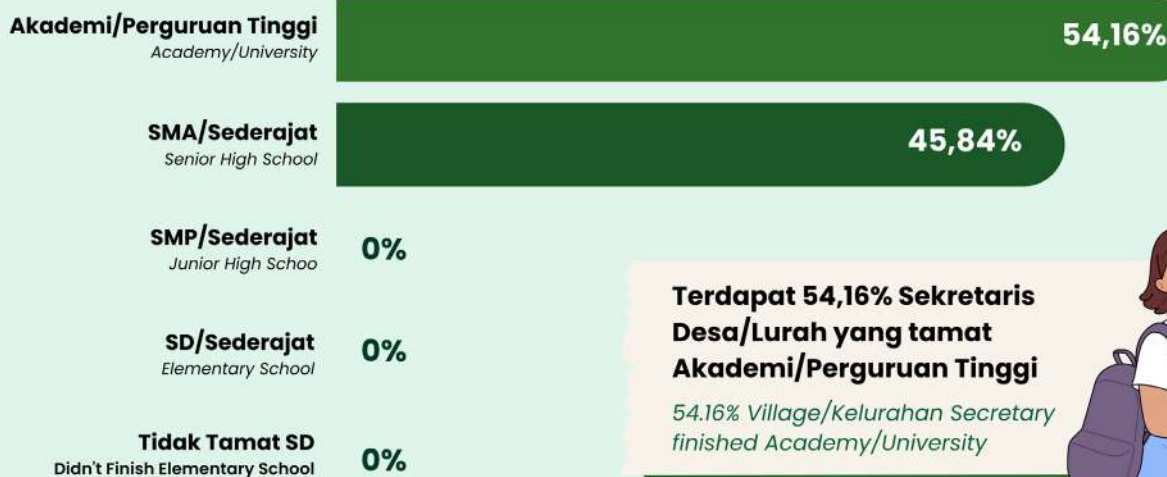
## PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN KEPALA DESA/LURAH

EDUCATION ATTAINMENT OF THE VILLAGE HEAD/LURAH



## PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN SEKRETARIS DESA/LURAH

EDUCATION ATTAINMENT OF THE VILLAGE/KELURAHAN SECRETARY







## Penjelasan Teknis Keterangan Pemerintah Desa/Kelurahan

1. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).
2. Kepala Desa/Lurah adalah pejabat pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Sekretaris Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
4. Sekretariat Desa/Kelurahan dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat desa/kelurahan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
5. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

## Technical Notes Village Government Information

1. *The Village Government is the village head or called by another name helped by the village apparatus as an element of village administration. The village apparatus consists of village secretariat, implementing teritorial, and technical teritorial (Law No. 6 Year 2014 about Village).*
2. *Head of Village/Subdistrict is a village/subdistrict government official who have the authority, duties and obligations to organize and manage their village households and carry out duties from the Government and Regional Governments.*
3. *Village/Subdistrict Secretary hold the position as the leadership element of the Village Secretariat. Village Secretary/Subdistrict Secretary is in charge of assisting the head of village in the field of government administration.*
4. *Village/Subdistrict Secretariat is led by village secretary who is assisted by elements of secretarial staff assigned to assist the head of village in the field of public administration. Village Secretariat/Subdistrict Secretariat consists of 3 (three) divisions that are in charge in, administration and general affairs, financial affairs, and planning, and at least consist of 2 (two) divisions, general affairs and planning, and financial affairs.*
5. *Teritorial Administrator is an assistant element of the village head as a teritorial task force.*

6. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit dua seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

6. *Technical Administrator is an assistant element of the head of village to support operational task or activities. Technical administrator consists of 3 (three) sections namely the government affairs section, the welfare section, and the public service section, and at least 2 (two) sections namely the government affairs section, and the welfare and public service section.*

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL** : 12.1  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN APARAT  
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN**

NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY EXISTENCE OF THE  
VILLAGE/SUBDISTRICTS GOVERNMENT

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kepala Desa/Lurah <i>Village Head/Lurah</i>	Sekretaris Desa/Kelurahan <i>Village/SUBDISTRICTS Secretary</i>	Pelaksana Kewilayahan <i>Implementing Territorial</i>	Pelaksana Teknis <i>Technical Territorial</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	69	69	71	67
Bintan	48	50	51	51
Natuna	75	77	77	77
Lingga	87	91	95	95
Kepulauan Anambas	51	53	54	54
Kota Batam	64	64	64	64
Kota Tanjungpinang	18	17	18	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>412</b>	<b>421</b>	<b>430</b>	<b>426</b>

**TABEL : 12.2** **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS KELAMIN KEPALA DESA/LURAH DAN SEKRETARIS DESA/KELURAHAN**  
**TABLE** **NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY SEX OF THE VILLAGE HEAD/LURAH AND THE VILLAGE/SUBDISTRICTS SECRETARY**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kepala Desa/Lurah <i>Village Head/Lurah</i>			Sekretaris Desa/Kelurahan <i>Village/SUBDISTRICTS Secretary</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	66	3	69	49	20	69
Bintan	44	4	48	35	15	50
Natuna	74	1	75	68	9	77
Lingga	85	2	87	75	16	91
Kepulauan Anambas	51	–	51	43	10	53
Kota Batam	58	6	64	53	11	64
Kota Tanjungpinang	15	3	18	11	6	17
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>393</b>	<b>19</b>	<b>412</b>	<b>334</b>	<b>87</b>	<b>421</b>

**TABEL** : 12.3  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KELOMPOK UMUR KEPALA  
DESALURAH DAN SEKRETARIS DESA/KELURAHAN**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AGE GROUP OF THE VILLAGE HEAD/  
LURAH AND THE VILLAGE/SUBDISTRICTS SECRETARY

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kelompok Umur (Tahun) / <i>Age Group (Year)</i>											
	Kepala Desa/Lurah <i>Village Head/Lurah</i>						Sekretaris Desa/Kelurahan <i>Village/SUBDISTRICTS Secretary</i>					
	≤24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55+	Jumlah <i>Total</i>	≤24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55+	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Karimun	–	15	12	28	14	69	–	19	32	15	3	69
Bintan	–	8	13	21	6	48	–	10	27	10	3	50
Natuna	–	3	29	27	16	75	–	16	46	13	2	77
Lingga	–	7	35	32	13	87	–	33	37	19	2	91
Kepulauan Anambas	–	7	15	23	6	51	1	31	9	11	1	53
Kota Batam	–	19	12	28	5	64	–	8	20	34	2	64
Kota Tanjungpinang	–	5	9	4	–	18	–	9	3	4	1	17
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	–	<b>64</b>	<b>125</b>	<b>163</b>	<b>60</b>	<b>412</b>	<b>1</b>	<b>126</b>	<b>174</b>	<b>106</b>	<b>14</b>	<b>421</b>

**TABEL : 12.4**  
**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN KEPALA DESA/LURAH**  
**TABLE** NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY EDUCATION ATTAINMENT OF THE VILLAGE HEAD/LURAH

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Tingkat Pendidikan/ <i>Level of Education</i>				
	Tidak Pernah Sekolah <i>Never Attending School</i>	Tidak Tamat SD <i>Not Completed Elementary School</i>	SD dan Sederajat <i>Elementary School</i>	SMP dan Sederajat <i>Junior High School</i>	SMU dan Sederajat <i>Senior High School</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	–	–	1	1	24
Bintan	–	–	–	–	31
Natuna	1	–	–	2	47
Lingga	–	–	–	5	51
Kepulauan Anambas	–	–	–	4	36
Kota Batam	–	–	–	–	1
Kota Tanjungpinang	–	–	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>190</b>

<https://kepri.bps.go.id>

Lanjutan Tabel/Continued Table 12.4

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Tingkat Pendidikan/ <i>Level of Education</i>				Jumlah <i>Total</i>
	Akademi/DIII <i>Academy/ Associate's Degree</i>	Diploma IV/S1 <i>Bachelor Degree/ Undergraduate</i>	S2 <i>Graduate</i>	S3 <i>Post Graduate</i>	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Karimun	1	36	6	–	69
Bintan	1	13	3	–	48
Natuna	4	20	1	–	75
Lingga	4	27	–	–	87
Kepulauan Anambas	1	10	–	–	51
Kota Batam	3	50	9	1	64
Kota Tanjungpinang	–	15	3	–	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>14</b>	<b>171</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>412</b>

**TABEL : 12.5** **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN SEKRETARIS DESA/KELURAHAN**  
**TABLE** **NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY EDUCATIONAL ATTAINMENT OF THE VILLAGE/SUBDISTRICTS SECRETARY**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Tingkat Pendidikan/ <i>Level of Education</i>				
	Tidak Pernah Sekolah <i>Never Attending School</i>	Tidak Tamat SD <i>Not Completed Elementary School</i>	SD dan Sederajat <i>Elementary School</i>	SMP dan Sederajat <i>Junior High School</i>	SMU dan Sederajat <i>Senior High School</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	-	-	-	-	28
Bintan	-	-	-	-	22
Natuna	-	-	-	-	51
Lingga	-	-	-	-	59
Kepulauan Anambas	-	-	-	-	32
Kota Batam	-	-	-	-	-
Kota Tanjungpinang	-	-	-	-	1
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	-	-	-	-	<b>193</b>



Lanjutan Tabel/Continued Table 12.5

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tingkat Pendidikan/ Level of Education				Jumlah Total
	Akademi/DIII Academy/ Associate's Degree	Diploma IV/S1 Bachelor Degree/ Undergraduate	S2 Graduate	S3 Post Graduate	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Karimun	2	39	–	–	69
Bintan	5	22	1	–	50
Natuna	4	22	–	–	77
Lingga	6	24	2	–	91
Kepulauan Anambas	1	20	–	–	53
Kota Batam	–	60	4	–	64
Kota Tanjungpinang	–	13	3	–	17
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>18</b>	<b>200</b>	<b>10</b>	<b>–</b>	<b>421</b>



# PERMUKIMAN DI DAERAH RAWAN

BAB  
Chapter

13

SETTLEMENT IN VULNARABLE AREAS

**62,76%**

**Desa/Kelurahan Terdapat Permukiman di Puncak/Tebing/Lereng**  
*Villages/Subdistricts Have Settlement on Peak/Cliff/Slope*

**31,58%**

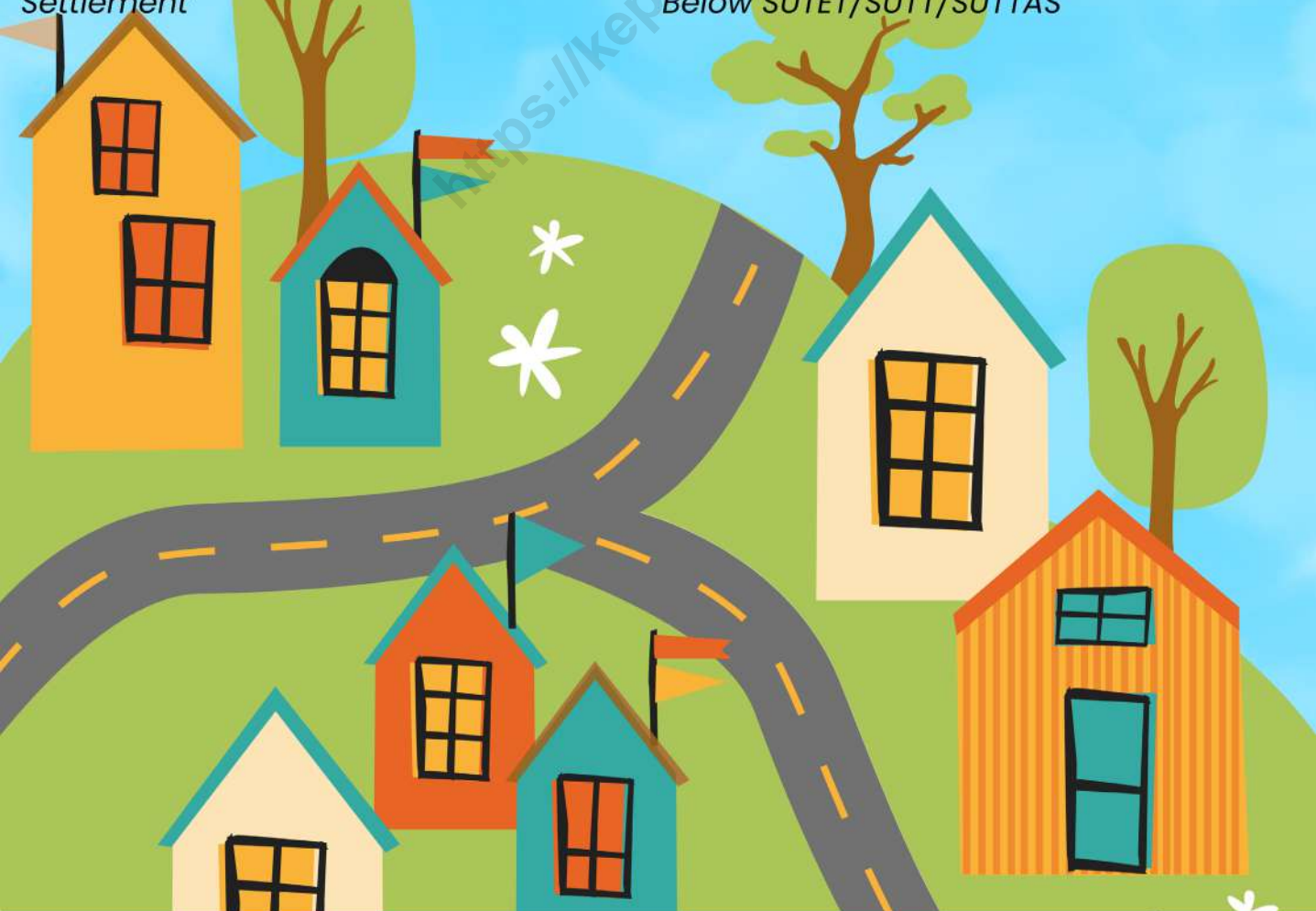
**Desa/Kelurahan Terdapat Permukiman di Bantaran Sungai**  
*Villages/Subdistricts Have Settlement on River Bank*

**7,67%**

**Desa/Kelurahan Terdapat Permukiman Kumuh**  
*Villages/Subdistricts Have Slum Settlement*

**70,37%**

**Desa/Kelurahan Terdapat Permukiman di Bawah SUTET/SUTT/SUTTAS**  
*Villages/Subdistricts Have Settlement Below SUTET/SUTT/SUTTAS*





## Penjelasan Teknis Permukiman di Daerah Rawan

1. Puncak/tebing adalah wilayah yang memiliki perbedaan elevasi lebih dari 30 m dengan wilayah sekitarnya atau memiliki kemiringan lebih dari 50 derajat.
2. Lereng adalah wilayah yang memiliki perbedaan elevasi -5 hingga 30 m dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.
3. Menurut PP Nomor 38 tahun 2011, bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai. Garis sempadan sungai sering tertukar dengan bantaran sungai. Jika bantaran sungai hanya memperlihatkan daerah bantaran sungai saat banjir (flood plain), maka sempadan sungai memperlihatkan daerah bantaran sungai ditambah dengan daerah longsoran tebing sungai yang mungkin terjadi.
4. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 kV.
5. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 35 kV sampai dengan 230 kV.
6. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat

## Technical Notes Settlements in Vulnerable Areas

1. *Peak/cliff is an area that has a height of more than 30 m with the surrounding area or has a slope of more than 50 degrees.*
2. *A slope is an area that has an elevation difference of -5 to 30 m compared to the surrounding area.*
3. *According to Government Regulation Number 38 of 2011, the riverbank is the space between the edge of the riverbed and the foot of the inner embankment which is located on the left and/or right of the riverbed. River borders are often confused with river banks. If the riverbank only shows the riverbank area during a flood (flood plain), then the river border shows the riverbank area plus the area of riverbank landslides that may occur.*
4. *Extra High Voltage Air Line (SUTET) is an electric power line that uses bare wire (conductor) in the air with a nominal voltage above 230 kV.*
5. *High Voltage Air Line (SUTT) is an electric power line that uses bare wire (conductor) in the air with nominal voltage above 35 kV to 230 kV.*
6. *Direct Current High Voltage Air Line (SUTTAS) is an electric power line that uses bare wire in the air with nominal voltage*

telanjang di udara bertegangan nominal diatas 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif atau kombinasi dari keduanya. Jarak bebas minimum horizontal dari menara/tiang adalah 14 meter untuk SUTTAS 250 kV = 14 meter dan 18 meter untuk SUTTAS 500 kV.

*above 250 kV and 500 kV with positive, negative polarity or a combination of both. The minimum horizontal clearance from the tower/pole is 14 meters for SUTTAS 250 kV = 14 meters and 18 meters for SUTTAS 500 kV.*

7. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

7. *According to Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas, slum settlements are settlements that are unfit for habitation due to building irregularities, high building density, and the quality of buildings and facilities and infrastructure that do not meet the requirements.*

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL** : 13.1  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN PERMUKIMAN  
DI PUNCAK/TEBING DAN DI BANTARAN SUNGAI**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF SETTLEMENT ON  
PEAK/CLIFF AND ON RIVER BANK

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Permukiman/ <i>Settlement</i>				
	Di Puncak/Tebing <i>On Peak/Cliff</i>		Di Bantaran Sungai <i>On River Bank</i>		
	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>	Tidak Ada Sungai <i>No River</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	1	2	–	5	66
Bintan	5	7	–	20	31
Natuna	31	7	20	21	36
Lingga	1	10	23	39	33
Kepulauan Anambas	35	15	3	17	34
Kota Batam	16	8	2	2	60
Kota Tanjungpinang	2	5	–	–	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>91</b>	<b>54</b>	<b>48</b>	<b>104</b>	<b>278</b>

**TABEL : 13.2**  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN PERMUKIMAN DI BAWAH SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)/ SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT)/ SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI ARUS SEARAH (SUTTAS), DAN PERMUKIMAN KUMUH**

NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY AVAILABILITY OF SETTLEMENT ON BELOW EXTRA HIGH VOLTAGE AIR CHANNEL/HIGH VOLTAGE AIR CHANNEL/HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT AIR CHANNEL, AND SLUM SETTLEMENT

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Permukiman/ Settlement				
	Di Bawah SUTET/SUTT/SUTTAS Below SUTET/SUTT/SUTTAS			Permukiman Kumuh Slum Settlement	
	Ada Available	Tidak Ada Not Available	Tidak Ada SUTET/SUTT/ SUTTAS No SUTET/SUTT/SUTTAS	Ada Available	Tidak Ada Not Available
Karimun	–	2	69	5	66
Bintan	5	2	44	–	51
Natuna	–	–	77	2	75
Lingga	1	–	94	6	89
Kepulauan Anambas	–	–	54	3	51
Kota Batam	13	3	48	12	52
Kota Tanjungpinang	–	1	17	5	13
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>403</b>	<b>33</b>	<b>397</b>



# PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

ENVIRONMENTAL POLLUTION

BAB  
Chapter

14

## Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kejadian Pencemaran

Number of Villages/Subdistricts by type Enviromental Pollution

Air/Water	23	Udara/Air	0	Tanah/Land	23
-----------	----	-----------	---	------------	----

10,23%

Desa/Kelurahan Terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup  
*Villages/Subdistricts have Environmental Pollution*

29,77%

Desa/Kelurahan Terdapat Kebiasaan Membakar Ladang/Kebun  
*Villages/Subdistricts have Habbits of Burning Plant/Land Tenure*

10,53%

Desa/Kelurahan Terdapat Sungai yang Tercemar  
*Villages/Subdistricts have Waste Polluted Rivers*



## Penjelasan Teknis Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Sungai adalah tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai yang dimaksud di sini termasuk anak sungai, kanal, dan sodetan (Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011).
2. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam satu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan dibedakan menjadi pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara.
3. Penggalian Golongan C adalah kegiatan penggalian pada wilayah permukaan bumi yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Bahan-bahan galian golongan C (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980) antara lain:
  - a. Nitrat, phosphate, garam batu (halite);
  - b. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
  - c. Yarosit, leusit, tawas (alam), oker;
  - d. Batu permata, batu setengah permata;
  - e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips,

## Technical Notes Environmental Pollution

1. *River is the place, container, and water networks that are formed naturally or artificially starts from upstream to with bounded right and left by the demarcation line. River is here including creeks, canals, and sodetan (Governmental Regulation No. 38 Year 2011).*
2. *Environmental Pollution is the inclusion of living things, substances, energy, and other components into the environment by human activities so that it surpasses the established environmental quality standards. Environmental quality standard is the size of the limit or the level of living things, substances, energy, or components that exist or must exist and or pollutant elements tolerated in a particular resource as an element of the environment. Environmental pollution can be divided into water pollution, land pollution, and air pollution.*
3. *C-Class Mining is the quarrying activity on Earth's surface area that could potentially damage the environment. Excavated materials class C (Regulation of Government No. 27 Year 1980) include:*
  - a. *Nitrate, phosphate, rock salt (halite);*
  - b. *Asbestos, talc, mica, graphite, magnesite;*
  - c. *Yarosit, leusit, alum (natural), ocher;*
  - d. *Gemstones, half gem stones;*
  - e. *Quartz sand, kaolin, feldspar, gypsum,*

- bentonite;
- f. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
  - g. Marmer, batu tulis;
  - h. Batu kapur, dolomite, kalsit;
  - i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A dan golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

- bentonite;*
- f. Pumice, tras, obsidian, perlite, diatomaceous earth, soil absorption (Fullers earth);*
  - g. Marble, slate;*
  - h. Limestone, dolomite, calcite;*
  - i. Granite, andesite, basalt, trakhit, clay, and sand does not contain all the mineral elements of class A and class B in a significant amount in terms of mining economy.*

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL**  
**TABLE** : 14.1

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG MEMPUNYAI SUNGAI DAN SUNGAI  
YANG TERCEMAR LIMBAH MENURUT SUMBER LIMBAH**  
*NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH RIVERS AND RIVERS  
CONTAMINATED WITH WASTE BY WASTE SOURCES*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Desa/Kelurahan yang Mempunyai Sungai <i>Village that have Rivers</i>	Desa/Kelurahan yang Mempunyai Sungai yang Tercemar Limbah <i>Village with Waste Polluted Rivers</i>		
		Limbah dari Pabrik/Industri/Usaha <i>Waste from Factory/Industrial/Business</i>	Limbah Rumah tangga <i>Household Waste</i>	Limbah lainnya <i>Other Waste</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	5	–	–	–
Bintan	20	1	–	–
Natuna	41	–	6	–
Lingga	62	4	5	–
Kepulauan Anambas	20	–	1	–
Kota Batam	4	–	1	–
Kota Tanjungpinang	–	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>152</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>–</b>

**TABEL 14.2** **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TABLE 14.2** **NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY TYPE OF ENVIRONMENTAL POLLUTION**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Pencemaran Air <i>Water Pollution</i>	Pencemaran Tanah <i>Land Pollution</i>	Pencemaran Udara <i>Air Pollution</i>	Tidak Ada Pencemaran <i>No Pollution</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	3	–	6	63
Bintan	3	–	–	48
Natuna	6	–	13	58
Lingga	7	–	1	87
Kepulauan Anambas	–	–	1	53
Kota Batam	4	–	2	59
Kota Tanjungpinang	–	–	–	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>23</b>	<b>–</b>	<b>23</b>	<b>386</b>

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL 14.3** BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS DAN SUMBER UTAMA  
**PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TABLE 14.3** NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY TYPE AND MAIN SOURCE OF  
 ENVIRONMENTAL POLLUTION

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sumber Pencemaran Air <i>The Source of Water Pollution</i>			Sumber Pencemaran Tanah <i>The Source of Land Pollution</i>			Sumber Pencemaran Udara <i>The Source of Air Pollution</i>		
	Pabrik/ Rumah Industri Tangga /Usaha Lainnya <i>Domestic Factory/ Others Waste Industry/ Business</i>			Pabrik/ Rumah Industri Tangga /Usaha Lainnya <i>Domestic Factory/ Others Waste Industry/ Business</i>			Pabrik/ Rumah Industri Tangga /Usaha Lainnya <i>Domestic Factory/ Others Waste Industry/ Business</i>		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Karimun	1	2	–	–	–	–	1	2	3
Bintan	–	2	1	–	–	–	–	–	–
Natuna	6	–	–	–	–	–	11	–	2
Lingga	2	5	–	–	–	–	–	1	–
Kepulauan Anambas	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Kota Batam	3	–	1	–	–	–	1	1	–
Kota Tanjungpinang	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**TABEL : 14.4** **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBIASAAN MASYARAKAT MEMBAKAR LADANG/ KEBUN DAN KEBERADAAN PENGGALIAN GOLONGAN C**  
**TABLE** **NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY HABBITS OF BURNING PLANT/LAND TENURE AND EXISTENCE OF C-CLASS MINING FIELD**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kebiasaan Membakar Ladang/Kebun <i>Habbits of Burning Plant/Land Tenure</i>		Keberadaan Penggalian Golongan C <i>The Existence of C-Class Mining Field</i>	
	Ada <i>Exist</i>	Tidak Ada <i>Not Exist</i>	Ada <i>Exist</i>	Tidak Ada <i>Not Exist</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	23	48	19	52
Bintan	10	41	9	42
Natuna	45	32	31	46
Lingga	17	78	56	39
Kepulauan Anambas	29	25	28	26
Kota Batam	4	60	4	60
Kota Tanjungpinang	–	18	–	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>128</b>	<b>302</b>	<b>147</b>	<b>283</b>

<https://kepri.bps.go.id/>



# ANTISIPASI DAN KEJADIAN BENCANA ALAM

BAB  
Chapter

15

ANTICIPATION AND  
INCIDENCE OF NATURAL  
DISASTER



45,58%

Desa/Kelurahan Terdapat Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam  
*Villages/Subdistricts have Anticipation/Mitigation of Natural Disaster*

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam  
*Number of Villages/Subdistricts by Type of Anticipation/Mitigation of Natural Disaster*

Pembuatan, Perawatan, Normalisasi:  
Sungai, Kanal, dll  
*Manufacture, Maintenance,  
Normalization: Rivers, Canals, etc*

172

Sistem Peringatan Dini Bencana Alam  
*Natural Disaster Early Warning System*

18

Perlengkapan Keselamatan  
*Safety Equipment*

49

Rambu-rambu dan Jalur Evakuasi  
*Signs and Evacuation Route*

20

Sistem Peringatan Dini Tsunami  
*Tsunami Early Warning System*

3

40,93% Desa/Kelurahan Terdapat Bencana Alam (2023-2024\*)  
*Villages/Subdistricts Have Natural Disaster (2023-2024\*)*

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut 3 Jenis Bencana Alam  
*Number of Villages/Subdistricts by 3 Types of Natural Disaster*

Gelombang Pasang Laut  
*Tide*

78

Banjir  
*Flood*

74

Tanah Longsor  
*Landslide*

32





## Penjelasan Teknis Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam

1. Bencana Alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa bencana yang terjadi dalam kurun waktu Januari 2023 hingga April 2024. Dalam suatu kejadian bencana alam dapat menimbulkan beberapa peristiwa alam lainnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi.
2. Sistem Peringatan Dini Bencana Alam adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana alam pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem peringatan dini bencana alam yang dimaksud, misalnya peringatan dini terhadap warga mengenai status ketinggian pintu air, status gunung, d.s.b yang disampaikan melalui kentongan, pemberitahuan dengan *loud speaker*, dan lainnya.
3. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, d.l.l. Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu contoh yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
4. Sistem Peringatan Dini Tsunami adalah fasilitas pendeteksian kejadian bencana

## Technical Notes Anticipation and Incidence of Natural Disaster

1. *Natural Disaster is an event or series of disaster events that occurred in the period from January 2023 to April 2024 that threaten and disrupt the lives and livelihoods caused by natural factors such as: earthquake, tsunami, volcanic eruption, flood, flash flood, drought, typhoon/cyclone, and landslide so it can lead to result in loss of material and non-material.*
2. *Natural Disaster Early Warning System is a series of activities warnings about the possibility of a natural disaster to local community by regulatory authorities. The natural disaster early warning system referred here is early warning to residents regarding the status of sluice height, mountain status, etc., which is conveyed through kentongan, notification with loud speakers, and others.*
3. *Engineering, maintenance or normalization: rivers, canals, dikes, etc. These activities can be the example as a disaster prevention effort. According to Government Regulation Number 21 of 2008 concerning Implementation of Disaster Management, prevention is carried out by reducing the threat of disasters and the vulnerability of those threatened by disaster.*
4. *Tsunami Early Warning System is a facility of early detection of tsunami occurrence to*

alam tsunami untuk memberikan peringatan dini sebelum bencana alam tsunami datang/menimpa desa/kelurahan. Sistem ini menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam tsunami itu akan terjadi. Cakupan wilayah sistem peringatan dini tsunami meliputi semua desa/kelurahan yang dapat dijangkau oleh sistem tersebut dan bukan hanya desa/kelurahan dimana lokasi alat tersebut berada.

5. Perlengkapan Keselamatan adalah perlengkapan yang diupayakan/disediakan oleh aparat setempat maupun warga desa untukantisipasi maupun evakuasi korban saat terjadi bencana alam, seperti: perahu karet, tenda, persediaan masker, dan sebagainya.
6. Rambu-rambu dan Jalur Evakuasi adalah rambu-rambu/tanda dan jalur atau rute khusus yang digunakan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam. Rambu-rambu dan jalur atau rute ini bisa tersedia di desa/kelurahan dalam bentuk apapun, misal peta, petunjuk evakuasi, dan lokasi aman untuk berkumpul (muster point). Hal yang terpenting adalah jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, warga desa/kelurahan tahu jalur atau rute evakuasi yang harus dilewati.

*provide early warning for the population before the tsunami hit the village/subdistrict. This system uses high technology equipment as a tool to monitor when and where the tsunami will occur. The coverage area of the tsunami early warning system covers all villages/subdistricts that can be reached by the system and not just the village/subdistrict where the location of the equipment is located.*

5. *Safety Equipment is equipment that sought/provided by local apparatus or village community to anticipate the occurrence of natural disasters, such as providing rubber boats, tents, masks stock, etc.*
6. *Evacuation Route is a path or a special route that is used for evacuation when a natural disaster is occurred. These routes could be available in the village in any form, e.g. maps, evacuation instructions, and muster point. The most important thing is that in case of a natural disaster, the villagers have clear evacuation route that must be followed.*

**TABEL** : 15.1  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT UPAYA ANTISIPASI/MITIGASI BENCANA ALAM**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY EFFORT IN ANTICIPATION/MITIGATION OF NATURAL DISASTER

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam <i>Natural Disaster Early Warning System</i>	Sistem Peringatan Dini Tsunami <i>Tsunami Early Warning System</i>	Perlengkapan Keselamatan <i>Safety Equipment</i>	Rambu-Rambu dan Jalur Evakuasi <i>Signs and Evacuation Route</i>	Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi: Sungai, Kanal, Tanggul, dll <i>Manufacture, Maintenance, or Normalizatio: Rivers, Canals, Embankment, etc</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	2	1	4	–	42
Bintan	5	1	16	2	31
Natuna	1	–	12	2	31
Lingga	3	–	6	3	24
Kepulauan Anambas	2	–	3	–	12
Kota Batam	2	1	2	2	19
Kota Tanjungpinang	3	–	6	11	13
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>20</b>	<b>172</b>

**TABEL** : 15.2  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG MENGALAMI BENCANA ALAM  
MENURUT JENIS BENCANA ALAM, 2023-2024\***  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY TYPE OF NATURAL DISASTER,  
2023-2024\*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Tanah Longsor <i>Landslide</i>	Banjir <i>Flood</i>	Banjir Bandang <i>Flash Flood</i>	Gempa Bumi <i>Earth-quake</i>	Tsunami <i>Tsunami</i>	Gelombang Pasang Laut <i>Tide</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	2	14	–	–	–	7
Bintan	1	18	1	–	–	19
Natuna	10	10	2	–	–	17
Lingga	–	5	–	–	–	11
Kepulauan Anambas	3	4	–	–	–	7
Kota Batam	13	14	1	–	–	8
Kota Tanjungpinang	3	9	–	–	–	9
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>32</b>	<b>74</b>	<b>4</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>78</b>

Catatan : \* Periode tahun 2024 adalah Januari - April/2024 *Period is January-April*

<https://kepri.bps.go.id>

Lanjutan Tabel/*Continued Table 15.2*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Angin Puyuh/Puting Beliung/Topan <i>Typhoon/ Cyclone</i>	Gunung Meletus <i>Volcanic Eruption</i>	Kebakaran Hutan dan Lahan <i>Forest and Land Fires</i>	Kekeringan <i>Drought</i>	Abrasi <i>Abrasion</i>	Tidak Ada Bencana Alam <i>No Natural Disaster</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Karimun	6	–	10	4	5	45
Bintan	4	–	8	4	2	18
Natuna	2	–	6	8	4	34
Lingga	3	–	2	–	1	76
Kepulauan Anambas	–	–	–	–	–	43
Kota Batam	10	–	2	1	1	36
Kota Tanjungpinang	3	–	1	1	–	2
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>28</b>	<b>–</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>254</b>



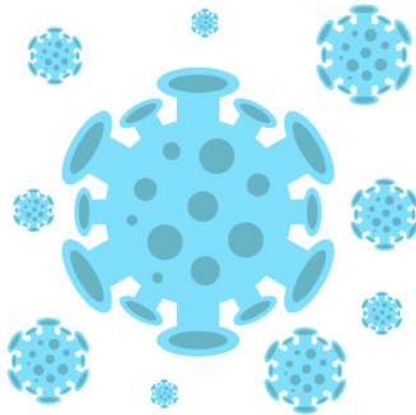


# PERMASALAHAN KESEHATAN MASYARAKAT

BAB  
Chapter

16

PUBLIC HEALTH PROBLEMS



6,51%

Desa/kelurahan terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit  
*Villages/Subdistricts have Epidemic*

92,79%

Desa/kelurahan terdapat Penyandang Disabilitas  
*Villages/Subdistricts have Disabled People*

4 Jenis Disabilitas yang Memiliki Paling Banyak Penyandang  
*4 Types of Disabilities that Have the Most Sufferers*

Tuna Daksa  
*Physically Disable*

Tuna Grahita  
*Mental Disorder*

Tuna Rungu  
*Deaf*

Tuna Wicara  
*Mute*



32,56%

Desa/kelurahan terdapat Penderita Kurang Gizi  
*Villages/Subdistricts have Malnutrition People*

2,79%

Desa/kelurahan terdapat Penduduk Dipasung  
*Villages/Subdistricts have Deprived People*





## Penjelasan Teknis Permasalahan Kesehatan di Masyarakat

1. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010). Penetapan KLB dapat dilakukan oleh:
  - a. Kepala dinas kesehatan Kabupaten/Kota,
  - b. Kepala dinas kesehatan provinsi, bila kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tidak menetapkan daerahnya dalam keadaan KLB,
  - c. Menteri kesehatan, bila kepala dinas kesehatan provinsi atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tidak menetapkan suatu daerah di wilayahnya dalam keadaan KLB.
2. Wabah Penyakit Menular adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010). Penetapan wabah dapat dilakukan oleh menteri kesehatan.
3. Gizi Buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energy protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan

## Technical Notes Public Health Problem

1. *Extraordinary Event is an appearance or increased incidence of morbidity or mortality epidemiologically in an area within a certain time and is a condition that can lead to an epidemic (Regulation of the Minister of Health No. 1501/MENKES/PER/X/2010). Determination of KLB can be done by:*
  - a. *Chief of health office in regency/municipality,*
  - b. *Chief of health office in province, if a chief of health office in regency/municipality didn't establishment his region on epidemic,*
  - c. *Minister of Health, if a chief of health office in province or a chief of health office in regency/municipality didn't establishment his region on epidemic,*
2. *Epidemic is an outbreak of infectious disease in the community in which the number of patients more increased significantly than common condition in a certain time, area, and cause havoc (Regulation of the Minister of Health No. 1501/MENKES/PER/X/2010). The establishment of epidemic can be done by the minister of health.*
3. *Malnutrition is a condition of nutritional deficiency that is caused by the low energy consumption of protein daily, characterized by the weight and height is determined by medical personnel. Honger oedema is included as one*

tinggi badan tidak sesuai umur (dibawah rata-rata) dan harus ditetapkan oleh tenaga medis. Busung lapar termasuk salah satu bentuk gizi buruk. Secara klinis, status gizi buruk terdapat tiga tipe, yaitu: marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.

4. Orang yang Dipasung adalah tindakan masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa (biasanya yang berat) dengan cara dikurung, dirantai kakinya, dimasukan kedalam balok kayu, dan lain-lain sehingga kebebasannya menjadi hilang.
5. Penyandang Cacat adalah orang yang mengalami kecacatan sehingga terganggu/terhambat dalam melakukan suatu kegiatan sebagaimana layaknya.
  - a. Tunanetra (Buta) adalah kondisi se- seorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Tunanetra dibedakan ke dalam dua golongan yaitu: buta total dan kurang awas. Buta total jika kedua mata tidak dapat melihat sama sekali. Kurang awas, bila dua mata tidak dapat menghitung jari-jari tangan yang digerakkan pada jarak 1 meter di depannya walaupun memakai kacamata atau ada cukup cahaya untuk melihat.
  - b. Tunarungu (Tuli) adalah kondisi fisik yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara.
  - c. Tunawicara (Bisu) adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara.
  - d. Tunarungu-wicara (tuli-bisu) adalah ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara dan berbicara. Seseorang menjadi bisu umumnya

*form of malnutrition. Clinically, there are three types of malnutrition status, namely: marasmus, kwashiorkor, and marasmus-kwashiorkor.*

4. *The Deprived People are people who are restricted for their movement because they are considered disruptive (usually people with severe mental disorders) caging, chaining their legs, putting them into the wooden beams and others so that their freedom is lost.*
5. *The Disabled is people who have disabilities so that they are disrupted / impaired in carrying out an activity as normal people.*
  - a. *Blind is a condition of a person who has a disorder or obstacles in the senses of vision. Blind is divided into two groups, namely: total blindness and less alert (low vision). Total blindness if both eyes can not see at all. Less alert (low vision), when the two eyes can not count the fingers that are driven at a distance of 1 meter in front of him despite wearing glasses or there is enough light to see.*
  - b. *Deaf is a physical condition that is characterized by a decrease or the inability of a person to listen to the sound.*
  - c. *Mute is the inability of a person to speak.*
  - d. *Deaf-Mute is the inability of a person to hear and speak. The mute is usually as an impact of deaf .*

- disebabkan karena tuli.
- e. Tunadaksa (Cacat Tubuh) adalah kelainan pada tulang, otot atau sendi anggota gerak dan tubuh, serta kelumpuhan/ketidaklengkapan anggota gerak/tulang sehingga menimbulkan gangguan gerak.
  - f. Tunagrahita (Cacat Mental/ Keterbelakangan Mental) adalah kelainan/keterbelakangan mental/ jiwa sehingga tidak mampu melakukan aktivitas yang umum dilakukan orang lain seusianya, contoh idiot.
  - g. Tunalaras adalah hambatan/ gangguan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.
  - h. Cacat Eks Sakit Kusta adalah kecacatan yang disebabkan oleh penyakit kusta/lepra yang secara medis sudah dinyatakan sembuh.
  - i. Cacat Ganda (Cacat Fisik-Mental) adalah orang yang menderita cacat mental (tunagrahita atau tunalaras) dan cacat fisik (buta, tuli, bisu, bisutuli atau cacat tubuh).
- e. *Physically Disable an abnormality in bones, muscles or joints of the body and limbs, and paralysis/incompleteness of limb/ bone causing movement disorders.*
  - f. *Mental Disorder is ta disorder/retardation of mental/soul hence unable to perform common activities that others who have similar age did, like an idiot.*
  - g. *Post-Madness is barrier/disturbance in emotional control and social control.*
  - h. *Post-Leprosy is disability caused by leprosy which has been declared cured medically.*
  - i. *Physical-Mental Disabilities is people who suffer from mental disabilities (mental disorder or post-madnes) and physical disabilities (blind, deaf, mute, mute-deaf or handicapped).*

**TABEL : 16.1** BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)/WABAH PENYAKIT SELAMA SETAHUN TERAKHIR  
 TABLE : 16.1 NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY TYPE OF EPIDEMIC WITHIN LAST YEAR

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Muntaber /Diare <i>Diarrhea</i>	Demam Berdarah <i>Dengue Fever</i>	Campak <i>Measles</i>	Malaria	Flu Burung/ SARS <i>Avian Influenza</i>	Hepatitis E	Difteri <i>Diphtheria</i>	Corona/ Covid 19 <i>Corona/C ovid 19</i>	Lainnya <i>Other Epidemics</i>	Tidak Ada KLB/ Wabah <i>No Epidemic</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Karimun	1	2	1	1	-	-	-	-	1	69
Bintan	-	1	-	1	-	-	-	5	1	43
Natuna	1	-	-	-	-	-	-	-	-	76
Lingga	4	3	-	-	-	-	-	-	-	88
Kepulauan Anambas	2	-	1	-	-	-	-	-	-	51
Kota Batam	6	6	4	4	-	-	-	-	-	57
Kota Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>402</b>

**TABEL : 16.2** BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN  
**TABLE** PENDERITA KEKURANGAN GIZI DAN ORANG YANG DIPASUNG  
 NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY PRESENCE OF  
 MALNUTRITION AND DEPRIVED PEOPLE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Penderita Kekurangan Gizi <i>Malnutrition</i>	Orang yang Dipasung <i>Deprived People</i>
(1)	(2)	(3)
Karimun	23	2
Bintan	12	–
Natuna	41	5
Lingga	26	2
Kepulauan Anambas	12	1
Kota Batam	24	1
Kota Tanjungpinang	2	1
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>140</b>	<b>12</b>

**TABEL** : 16.3  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN PENYANDANG  
DISABILITAS**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY PRESENCE OF DISABLED

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Ada Penyandang Disabilitas <i>Disabled People</i>	Jenis Disabilitas/ <i>The Type of Disability</i>			
		Tuna Netra <i>Blind</i>	Tuna Rungu <i>Deaf</i>	Tuna Wicara <i>Mute</i>	Tuna Rungu-Wicara <i>Deaf-Mute</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	63	29	33	43	35
Bintan	47	22	18	22	29
Natuna	75	37	49	37	33
Lingga	91	40	46	41	39
Kepulauan Anambas	51	25	31	20	26
Kota Batam	55	27	30	28	19
Kota Tanjungpinang	17	11	11	10	10
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>399</b>	<b>191</b>	<b>218</b>	<b>201</b>	<b>191</b>

<https://kepri.bps.go.id>



Lanjutan Tabel/Continued Table 16.3

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jenis Disabilitas/The Type of Disability				
	Tuna Daksa Physically Disable	Tuna Grahita Mental Disorder	Tuna Laras Post-Madness	Tuna Eks Sakit Kusta Post-Leprosy	Tuna Ganda Physical-Mental Disabilities
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Karimun	40	41	30	5	8
Bintan	32	31	21	–	4
Natuna	49	50	25	1	7
Lingga	55	57	28	2	3
Kepulauan Anambas	36	32	23	2	7
Kota Batam	38	37	21	1	10
Kota Tanjungpinang	13	12	5	1	6
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>263</b>	<b>260</b>	<b>153</b>	<b>12</b>	<b>45</b>



# PERMASALAHAN SOSIAL

BAB  
Chapter

17

SOCIAL PROBLEMS



**93,02%**

Desa/kelurahan  
terdapat Penerima  
SKTM

Villages/subdistricts  
have Poor Certificate  
Receiver

**2,56%**

Desa/kelurahan  
terdapat Korban  
Bunuh Diri

Villages/  
kelurahan  
have Suicides  
Victims



**2,33%**

Desa/kelurahan  
terdapat Lokasi  
Berkumpul Anak  
Jalanan

Villages/subdistricts  
have Location of Street  
Children

**1,16%**

Desa/kelurahan  
terdapat Lokasi  
Gelandangan

Villages/subdistricts have  
Location of Homeless



**3,26%**

Desa/kelurahan  
terdapat Lokasi  
Pekerja Seks  
Komersial (PSK)

Villages/subdistricts have  
Location of Commercial Sex  
Workers





## Penjelasan Teknis Permasalahan Sosial

1. Surat Miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat keterangan yang diberikan oleh kepala desa/lurah kepada masyarakat miskin untuk keperluan tertentu.
2. Korban bunuh diri adalah seseorang yang perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa sendiri atas kemauan sendiri atau karena bujukan, rayuan, dan hasutan, termasuk yang mencoba bunuh diri tetapi tidak meninggal. Korban bunuh diri mencakup juga upaya percobaan bunuh diri.
3. Lokasi Berkumpul Anak Jalanan adalah titik-titik lokasi berkumpulnya anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun tempat-tempat umum, seperti pasar, mall, terminal bis, stasiun kereta api, taman kota (Kementrian Sosial RI).
4. Lokasi Gelandangan adalah titik-titik lokasi yang menjadi tempat mangkal/tinggal gelandangan dan pengemis, misalnya jembatan, emperan toko, d.l.l.
5. Lokalisasi/Lokasi/Tempat Mangkal Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah tempat PSK menjajakan diri baik secara legal maupun ilegal yang dikelola secara kelompok maupun individu.

## Technical Notes Social Problems

1. *Poor Letter/Certificate of Inability (SKTM) is a certificate given by the village head to the poor for a particular purpose.*
2. *A suicide victim is someone intentionally did suicidal action or lose their own lives on their own will or because of persuasion, seduction, and incitement, including those who attempted suicide but did not die. Suicide victims include those who attempted suicide.*
3. *Location of Street Children Gathered is location point where children aged 5-18 years gather to spend most of their time to earn a living and hang around the streets and public places, such as markets, malls, bus terminals, railway station, and city park.*
4. *Location of Homeless is location points that became a hangout/living for homeless and beggars, for example bridges, storefront, etc.*
5. *Localization/Location of Commercial Sex Workers is location where a prostitute selling themselves both legally and illegally managed on a group or individual.*

**TABEL** : 17.1  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN  
WARGA PENERIMA SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU  
PADA TAHUN 2023**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY PRESENCE OF  
PEOPLE WHO RECEIVED POOR CERTIFICATE IN 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Ada Penerima Surat Miskin/SKTM <i>People Who Received Poor Certificate</i>
(1)	(2)
Karimun	70
Bintan	49
Natuna	76
Lingga	90
Kepulauan Anambas	46
Kota Batam	51
Kota Tanjungpinang	18
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>400</b>

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL** : 17.2  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN KORBAN BUNUH DIRI, LOKASI BERKUMPUL ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)**  
NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY EXISTENCE OF SUICIDE VICTIMS, LOCATIONS OF STREET CHILDREN, HOMELESS, AND COMMERCIAL SEX WORKERS

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Korban Bunuh Diri <i>Suicide Victim</i>	Lokasi Berkumpul Anak Jalanan <i>Location of Street Children</i>	Lokasi Gelandangan <i>Location of Homeless</i>	Lokasi Pekerja Seks Komersial (PSK) <i>Location of Commercial Sex Workers</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	4	2	2	3
Bintan	–	1	–	2
Natuna	1	–	–	–
Lingga	1	–	–	–
Kepulauan Anambas	–	1	–	2
Kota Batam	3	6	2	5
Kota Tanjungpinang	2	–	1	2
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>14</b>



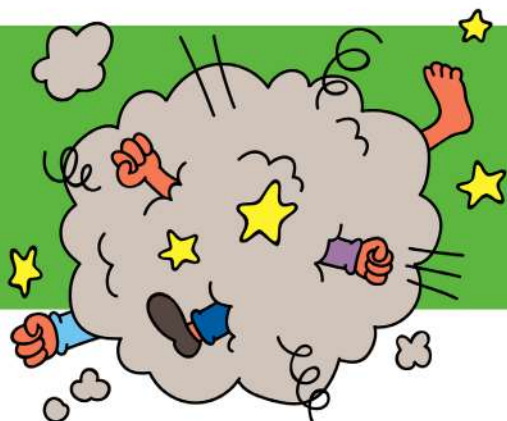


# GANGGUAN KEAMANAN

SECURITY DISTURBANCE

BAB  
Chapter

18



0%

Desa/kelurahan terdapat  
Perkelahian Massal

Villages/subdistricts with Mass  
Fight Incident

0%

Desa/kelurahan terdapat Inisiator  
Penyelesaian Perkelahian Massal

Villages/subdistricts have Settlement  
Inisiator of the Mass Fight



30,00% Desa/kelurahan terjadi tindak  
kejahatan, dimana tindak  
kejahatan yang paling banyak terjadi adalah  
**pencurian**

Desa/kelurahan with crime incidents, and the  
most frequent crime incident is **Theft**





## Penjelasan Teknis Gangguan Keamanan

1. Perkelahian Massal adalah perkelahian yang terjadi secara massal melibatkan banyak pelaku antara lain: antar kelompok masyarakat, antar pelajar, antar suku, atau lainnya yang terjadi di desa selama setahun terakhir.
2. Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal adalah orang atau sekelompok orang yang berinisiatif secara aktif untuk mendamaikan massa yang sedang bertikai.
  - a. Aparat Keamanan meliputi aparat kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Pengamanan (Satpam), dan sebagainya.
  - b. Aparat Pemerintah meliputi aparatur pemerintah daerah, kecamatan, desa dan sebagainya.
  - c. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau wibawa di lingkungannya. Contoh: Ketua RT/RW, Ketua Adat, pengurus ormas, dan sebagainya.
  - d. Tokoh Agama adalah orang yang memiliki kharisma dalam agama dan menjadi panutan orang-orang sekitar. Contoh: ulama/ustadz, pendeta, dan sebagainya.
3. Tindak Kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja/tidak, telah terjadi/baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta, benda, kehormatan dan lainnya serta tindakan tersebut dapat diancam hukuman penjara/kurungan. Tindak kejahatan mencakup pencurian, penipuan, penganiayaan, dan sebagainya.

## Technical Notes Security Disturbance

1. *Massive Fighting Incident* is a fight in bulk that involves many actors such as: among the society, students, ethnic groups, or others in the village during the last year.
2. *Initiator of Problem Solving* is the person or group of people who actively take the initiative to reconcile the masses who are fighting:
  - a. *Security Force* includes the police, military, civil service police unit, security unit and so on.
  - b. *Government Official* includes the local government officials, subdistrict, village, and so on.
  - c. *Community Figure* is someone who has influence or authority in their communities. For example: Head of RT/RW, Customary Chair, organization administrator, and so on.
  - d. *Religious Figure* is people who have charisma in religion and become role models of people around. For example: ustadz, pastor, and so on.
3. *Crime* is any act both intentional and not, has occurred or a trial, that can injure others in terms of body, soul, property, objects, and other honors, and such action that may be subjected to punishable with imprisonment. Crime includes theft, fraud, abuse, etc.

**TABEL** : 18.1  
*TABLE*

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS PERKELAHIAN MASSAL YANG TERJADI SELAMA SETAHUN TERAKHIR**  
*NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY TYPE OF MASS FIGHT INCIDENTS WITHIN LAST YEAR*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Antar Kelompok Masyarakat <i>Among Community Groups</i>	Kelompok Masyarakat Antar Desa/ Kelurahan <i>Between Rural Communities</i>	Kelompok Masyarakat dengan Aparat Keamanan <i>Community vs. Security Forces</i>	Kelompok Masyarakat dengan Aparat Pemerintah <i>Community vs. Government Officials</i>	Pelajar/ Mahasiswa <i>Among Students</i>	Antar Suku <i>Ethnic Group</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Karimun	-	-	-	-	-	-	-
Bintan	-	-	-	-	-	-	-
Natuna	-	-	-	-	-	-	-
Lingga	-	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Anambas	-	-	-	-	-	-	-
Kota Batam	-	-	-	-	-	-	-
Kota Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	-	-	-	-	-	-	-

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL : 18.2** **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG MENGALAMI KEJADIAN PERKELAHIAN MASSAL DAN KATEGORI KORBAN**  
**TABLE** : 18.2 **NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH MASS FIGHT INCIDENTS AND TYPE OF VICTIMS**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Desa/Kelurahan yang Mengalami Perkelahian Massal <i>Village/SUBDISTRICTS With Mass Fight Incidents</i>	Kategori Korban/ <i>The Type of Victim</i>	
		Meninggal <i>Died</i>	Luka-luka <i>Injured</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	-	-	-
Bintan	-	-	-
Natuna	-	-	-
Lingga	-	-	-
Kepulauan Anambas	-	-	-
Kota Batam	-	-	-
Kota Tanjungpinang	-	-	-
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	-	-	-

**TABEL 18.3** **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT INISIATOR PENYELESAIAN PERKELAHIAN MASSAL YANG PALING SERING TERJADI SETAHUN TERAKHIR**  
**TABLE 18.3** **NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY INITIATORS OF THE SETTLEMENT OF THE MOST FREQUENT MASS FIGHT WITHIN LAST YEAR**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Aparat Keamanan <i>Security Forces</i>	Aparat Pemerintah <i>Government Officials</i>	Tokoh Masyarakat <i>Community Figure</i>	Tokoh Agama <i>Religious Figure</i>	Lainnya <i>Others</i>	Tidak ada Inisiator <i>No Initiator</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	-	-	-	-	-	-
Bintan	-	-	-	-	-	-
Natuna	-	-	-	-	-	-
Lingga	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Anambas	-	-	-	-	-	-
Kota Batam	-	-	-	-	-	-
Kota Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	-	-	-	-	-	-

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL : 18.4**  
**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG MENGALAMI KEJADIAN TINDAK KEJAHATAN SELAMA SETAHUN TERAKHIR MENURUT JENIS TINDAK KEJAHATAN**  
**TABLE** NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH INCIDENTS OF CRIME WITHIN LAST YEAR BY TYPE OF CRIME

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Pencurian <i>Theft</i>	Pencurian dengan Kekerasan <i>Robbery</i>	Penipuan/ Penggelapan <i>Fraud/ Embezzlement</i>	Penganiayaan <i>Persecution</i>	Pembakaran <i>Arson</i>	Perkosaan/ Kejahatan Terhadap Kesusilaan <i>Rape/Crime Against Decency</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	38	2	7	1	4	2
Bintan	13	–	2	1	2	1
Natuna	8	–	2	–	–	1
Lingga	1	–	–	–	–	–
Kepulauan Anambas	3	–	–	–	1	1
Kota Batam	38	10	17	9	2	8
Kota Tanjungpinang	14	1	3	1	1	1
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>115</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>14</b>

Lanjutan Tabel/Continued Table 18.4

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Penyalahgunaan/ Pengedaran Narkoba <i>Drug Abuse/ Drug Trafficking</i>	Perjudian <i>Gambling</i>	Pembunuhan <i>Murder</i>	Perdagangan Orang <i>Trafficking</i>	Korupsi <i>Corruption</i>	Tidak Ada Tindak Kejahatan <i>No Incident of Crime</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Karimun	15	3	1	–	–	30
Bintan	4	–	–	–	–	37
Natuna	–	–	–	–	1	66
Lingga	1	1	–	–	–	92
Kepulauan Anambas	–	–	–	–	–	49
Kota Batam	2	3	2	2	1	24
Kota Tanjungpinang	5	1	2	–	–	3
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>301</b>

<https://kepri.bps.go.id>



**TABEL : 18.5**  
TABLE

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS KEJADIAN TINDAK KEJAHATAN YANG PALING SERING TERJADI SELAMA SETAHUN TERAKHIR**  
**NUMBER OF VILLAGES/SUBDISTRICTS BY TYPE OF THE MOST FREQUENT INCIDENTS OF CRIME WITHIN LAST YEAR**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Pencurian <i>Theft</i>	Pencurian dengan Kekerasan <i>Robbery</i>	Penipuan/ Penggelapan <i>Fraud/ Embezzlement</i>	Penganiayaan <i>Persecution</i>	Pembakaran <i>Arson</i>	Perkosaan/ Kejahatan Terhadap Kesusilaan <i>Rape/Crime Against Decency</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	36	–	1	–	–	–
Bintan	11	–	1	–	2	–
Natuna	8	–	1	–	–	1
Lingga	1	–	–	–	–	–
Kepulauan Anambas	3	–	–	–	1	1
Kota Batam	36	–	1	1	1	–
Kota Tanjungpinang	13	–	–	–	–	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>108</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

Lanjutan Tabel/Continued Table 18.5

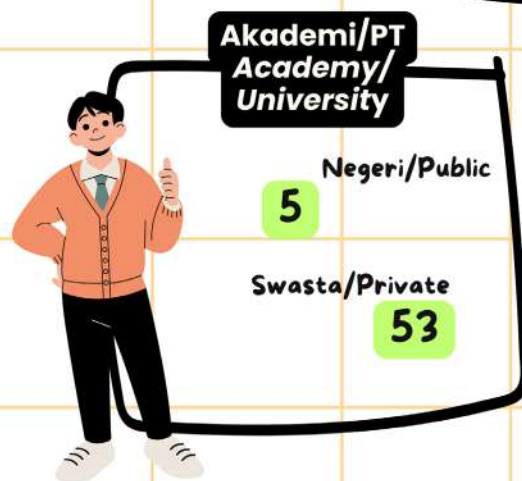
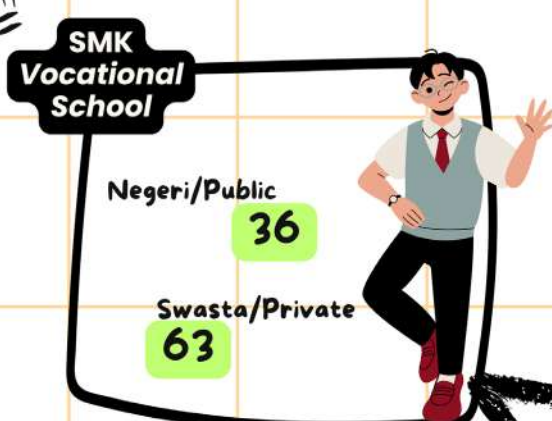
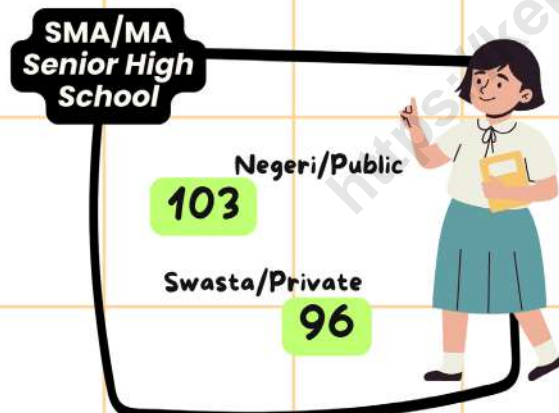
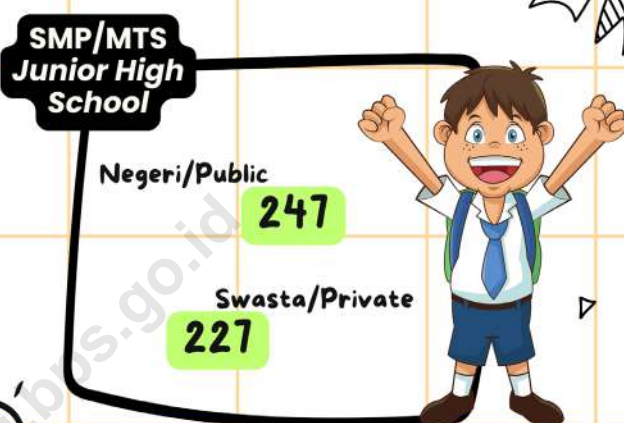
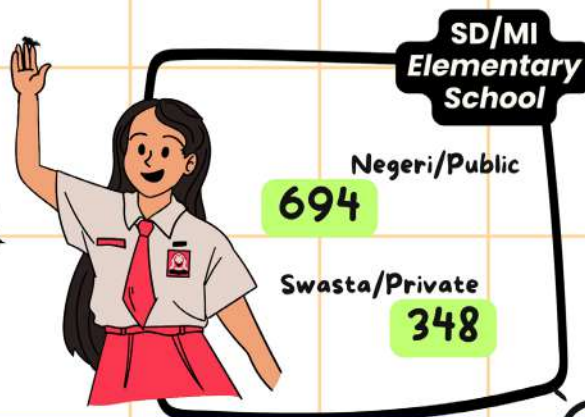
Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Penyalahgunaan / Pengedaran Narkoba <i>Drug Abuse/Drug Trafficking</i>	Perjudian <i>Gambling</i>	Pembunuhan <i>Murder</i>	Perdagangan Orang <i>Trafficking</i>	Korupsi <i>Corruption</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Karimun	3	1	–	–	–	41
Bintan	–	–	–	–	–	14
Natuna	–	–	–	–	1	11
Lingga	1	1	–	–	–	3
Kepulauan Anambas	–	–	–	–	–	5
Kota Batam	1	–	–	–	–	40
Kota Tanjungpinang	–	1	1	–	–	15
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>129</b>

# INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN

BAB  
Chapter

# 19

EDUCATION INFRASTRUCTURE





## Penjelasan Teknis Infrastruktur Pendidikan

1. Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus
  - a. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
  - b. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
  - c. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

## Technical Notes Education Infrastructure

1. *The Formal Education Level consists of primary education, secondary education, and high education. The kind of education that taught consists of general education, vocational, academic, professional, religious, and specific education.*
  - a. *The Primary Education consists of Elementary School, Extraordinary Primary School, and Islamic Elementary School or other equivalent forms and Junior High School, Extraordinary Junior High School, and MTs, or other equivalent forms.*
  - b. *The Secondary Education consists of the senior high school, Extraordinary Senior High School, MA, Vocational School, and Vocational Madrasah Aliyah, or other equivalent forms.*
  - c. *The High Education consists of the education level after the secondary education that consists of diplomas, bachelor, master, specialist, and doctoral degrees that are held by the college. The colleges can be academy, polytechnic, high school, institute, or university.*

**TABEL : 19.1**  
**BANYAKNYA SD/MI NEGERI DAN SWASTA MENURUT**  
**KABUPATEN/KOTA**  
**NUMBER OF PUBLIC AND PRIVATE ELEMENTARY SCHOOLS BY**  
**REGENCY/MUNICIPALITY**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	SD/ <i>Elementary School</i>			MI/ <i>Madrasah Ibtidaiyah</i>			SD/MI <i>Elementary School/Madrasah Ibtidaiyah</i>		
	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah
			SD <i>Total</i>			MI <i>Total</i>			SD/MI <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Karimun	121	16	137	3	11	14	124	27	151
Bintan	85	13	98	2	6	8	87	19	106
Natuna	80	4	84	–	2	2	80	6	86
Lingga	136	6	142	1	1	2	137	7	144
Kepulauan Anambas	66	1	67	1	2	3	67	3	70
Kota Batam	146	219	365	2	41	43	148	260	408
Kota Tanjungpinang	50	22	72	1	4	5	51	26	77
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>684</b>	<b>281</b>	<b>965</b>	<b>10</b>	<b>67</b>	<b>77</b>	<b>694</b>	<b>348</b>	<b>1042</b>

**TABEL : 19.2**  
**BANYAKNYA SMP/MTs NEGERI DAN SWASTA MENURUT**  
**KABUPATEN/KOTA**  
**NUMBER OF PUBLIC AND PRIVATE JUNIOR HIGH SCHOOLS BY**  
**REGENCY/MUNICIPALITY**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	SMP/ <i>Junior High School</i>			MTs/ <i>Madrasah Tsanawiyah</i>			SMP/MTs <i>Junior High School/Madrasah Tsanawiyah</i>		
	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah
			SMP <i>Total</i>			MTs <i>Total</i>			SMP/MTs <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Karimun	40	12	52	1	11	12	41	23	64
Bintan	28	7	35	1	8	9	29	15	44
Natuna	25	–	25	3	10	13	28	10	38
Lingga	36	3	39	1	3	4	37	6	43
Kepulauan Anambas	25	1	26	–	3	3	25	4	29
Kota Batam	65	120	185	4	29	33	69	149	218
Kota Tanjungpinang	17	19	36	1	1	2	18	20	38
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>236</b>	<b>162</b>	<b>398</b>	<b>11</b>	<b>65</b>	<b>76</b>	<b>247</b>	<b>227</b>	<b>474</b>

**TABEL** : 19.3  
TABLE

**BANYAKNYA SMA/MA NEGERI DAN SWASTA MENURUT  
KABUPATEN/KOTA**  
NUMBER OF PUBLIC AND PRIVATE SENIOR HIGH SCHOOLS BY  
REGENCY/MUNICIPALITY

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	SMA/ <i>Senior High School</i>			MA/ <i>Madrasah Aliyah</i>			SMA/MA <i>Senior High School/Madrasah Aliyah</i>		
	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah
			SMA <i>Total</i>			MA <i>Total</i>			SMA/MA <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Karimun	16	3	19	1	7	8	17	10	27
Bintan	10	4	14	1	3	4	11	7	18
Natuna	14	1	15	2	3	5	16	4	20
Lingga	15	1	16	–	3	3	15	4	19
Kepulauan Anambas	5	–	5	–	3	3	5	3	8
Kota Batam	28	48	76	3	14	17	31	62	93
Kota Tanjungpinang	7	5	12	1	1	2	8	6	14
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>95</b>	<b>62</b>	<b>157</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	<b>103</b>	<b>96</b>	<b>199</b>



**TABEL** : 19.4  
**TABLE** : 19.4

**BANYAKNYA SMK NEGERI DAN SWASTA MENURUT  
 KABUPATEN/KOTA**

*NUMBER OF PUBLIC AND PRIVATE VOCATIONAL  
 SCHOOLS BY REGENCY/MUNICIPALITY*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	SMK/ <i>Vocational School</i>		
	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	5	4	9
Bintan	4	3	7
Natuna	5	–	5
Lingga	4	1	5
Kepulauan Anambas	4	–	4
Kota Batam	9	49	58
Kota Tanjungpinang	5	6	11
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>36</b>	<b>63</b>	<b>99</b>

**TABEL : 19.5** **BANYAKNYA AKADEMI/PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA MENURUT KABUPATEN/KOTA**  
**TABLE** **NUMBER OF PUBLIC AND PRIVATE ACADEMY/ UNIVERSITY BY REGENCY/MUNICIPALITY**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Akademi/Perguruan Tinggi ( <i>Academy/University</i> )		
	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	–	2	2
Bintan	1	4	5
Natuna	–	1	1
Lingga	–	3	3
Kepulauan Anambas	–	–	–
Kota Batam	2	36	38
Kota Tanjungpinang	2	7	9
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>58</b>

<https://kepri.bps.go.id>

# INFRASTRUKTUR KESEHATAN

BAB  
Chapter

# 20

HEALTH INFRASTRUCTURE



# 34

## RUMAH SAKIT

*Hospital*

# 392

## APOTEK

*Pharmacy*



# 4

## RUMAH SAKIT BERSALIN

*Maternity Hospital*

## PUSKESMAS

# 38

**Puskesmas dengan rawat inap**  
*Public health center with hospitalization*

**Puskesmas tanpa rawat inap**  
*Public health center without hospitalization*

# 62



# 258

## POLIKLINIK/BALAI PENGOBATAN

*Polyclinic*



## Penjelasan Teknis Infrastruktur Kesehatan

1. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan/ bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.
2. Rumah Sakit Bersalin adalah rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap, dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan.
3. Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau desa/kelurahan.
4. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan.
5. Poliklinik adalah sarana kesehatan/ bangunan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan. Biasanya dikelola oleh swasta atau organisasi keagamaan tertentu.
6. Balai pengobatan adalah tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan menteri kesehatan.
7. Tempat Praktek Dokter adalah sarana

## Technical Notes Health Infrastructure

1. *Hospital is a health facility/ building in which to serve the ill patients to get outpatient or inpatient treatment services provided by doctors, nurses and other health personnels.*
2. *Maternity Hospital is a specialized hospital for childbirth, has specialist inspection service to pregnancy, childbirth, hospitalization, and outpatient for mothers and children that is under the supervision of an obstetrician.*
3. *Public Health Center is a government-owned health service unit (part of the regency/ municipality office of health service) that is responsible for community health services at district level or village/ subdistrict level.*
4. *Subsidiary Public Health Center is a health facility/ building that is used as a community health center for a smaller area, for example in a village/ subdistrict.*
5. *Polyclinic is a health facility/ building used for providing outpatient services and usually managed by private or certain religious organizations.*
6. *Treatment Center is a health check-up place under the supervision of the health care workers (paramedics).*
7. *Practitioner Doctor is health facility/ building*

- Kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktek dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.
8. Rumah Bersalin adalah sarana pelayanan kesehatan dengan izin sebagai rumah bersalin, dilengkapi pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan serta pemeriksaan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior.
 

*used for the doctor (physician) who usually provides outpatient services, including the practice of doctors who have inpatient and supporting pharmacy facility.*
  8. *Maternity House is health care facility with a license as a maternity house, equipped with prenatal care, childbirth, and examination of mothers and children which is under the supervision of a senior midwife.*
  9. Tempat Praktek Bidan adalah sarana Kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktek bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.
 

*Midwives are health facility/building used for the midwife who usually provides medical examination for pregnant women and infants.*
  9. *Midwives are health facility/building used for the midwife who usually provides medical examination for pregnant women and infants.*
  10. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan.
 

*Village Health Post (Poskesdes) is community-based health facility that is established in the village in an effort to provide basic health services for rural communities.*
  10. *Village Health Post (Poskesdes) is community-based health facility that is established in the village in an effort to provide basic health services for rural communities.*
  11. Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa.
 

*Village Maternity Post is buildings that are built with donations from government funds and village community participation for maternity assistance and lodging for maternity mothers, as well as a place for the midwives to live in the village.*
  11. *Village Maternity Post is buildings that are built with donations from government funds and village community participation for maternity assistance and lodging for maternity mothers, as well as a place for the midwives to live in the village.*
  12. Apotek adalah suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi.
 

*Pharmacy is a health facility forwhere the pharmacist works, and drugs pharmaceutical products are sold or distributed to public.*
  12. *Pharmacy is a health facility forwhere the pharmacist works, and drugs pharmaceutical products are sold or distributed to public.*
  13. Toko Khusus Obat/Jamu adalah tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menyimpan, dan
 

*Traditional Drugs Store is a specific place that is used to do the work of storing and selling the drugs/herbs as well as special ingredients for*
  13. *Traditional Drugs Store is a specific place that is used to do the work of storing and selling the drugs/herbs as well as special ingredients for*

menjual obat/bahan khusus untuk obat/jamu.

14. Posyandu adalah salah satu wadah peran serta masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan memantau pertumbuhan balita dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara dini. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.
15. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), yang saat ini dikenal Posbindu PTM (penyakit tidak menular) merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik (Juknis Pelaksanaan Posbindu, Kemenkes, 2012).

*medicines/ herbal medicines.*

14. *Integrated Health Service is a facility for the community participation which is managed and organized from, by, for, and with the community to obtain basic health services and monitor the growth of infants in order to improve the quality of human resources at an early stage. Those activities are immunization services, community nutrition education, and health services for mother and child.*
15. *Integrated Health Counseling Post (the Posbindu), which is currently known as the Posbindu PTM (Integrated Health Counseling Post for the noninfectious disease) is the role of the community in conducting early detection and monitoring of main risk factors of noninfectious disease carried out in an integrated, routine and periodic manner (Technical Guidelines on the Posbindu Operation, the Ministry of Health, 2012 )*

**TABEL** : 20.1 **BANYAKNYA RUMAH SAKIT DAN RUMAH SAKIT BERSALIN MENURUT KABUPATEN/KOTA**  
**TABLE** : 20.1 **NUMBER OF HOSPITALS AND MATERNITY HOSPITALS BY REGENCY/MUNICIPALITY**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Rumah Sakit <i>Hospital</i>	Rumah Sakit Bersalin <i>Maternity Hospital</i>
(1)	(2)	(3)
Karimun	3	–
Bintan	2	–
Natuna	2	–
Lingga	2	–
Kepulauan Anambas	3	–
Kota Batam	19	4
Kota Tanjungpinang	3	–
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>34</b>	<b>4</b>

<https://kepri.bps.go.id>



**TABEL** : 20.2 **BANYAKNYA PUSKESMAS MENURUT KABUPATEN/KOTA**  
**TABLE** : 20.2 **NUMBER OF PUBLIC HEALTH CENTERS BY REGENCY/MUNICIPALITY**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Puskesmas dengan Rawat Inap <i>Public Health Center with Hospitalization</i>	Puskesmas tanpa Rawat Inap <i>Public Health Center without Hospitalization</i>
(1)	(2)	(3)
Karimun	4	10
Bintan	10	8
Natuna	10	7
Lingga	7	7
Kepulauan Anambas	6	5
Kota Batam	–	18
Kota Tanjungpinang	1	7
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>38</b>	<b>62</b>

**TABEL** : 20.3 **BANYAKNYA POLIKLINIK/BALAI PENGOBATAN DAN APOTEK MENURUT KABUPATEN/KOTA**  
**TABLE** : 20.3 **NUMBER OF POLYCLINICS/TREATMENT CENTER AND PHARMACIES BY REGENCY/MUNICIPALITY**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Poliklinik/Balai Pengobatan <i>Polyclinic/Treatment Center</i>	Apotek <i>Pharmacy</i>
(1)	(2)	(3)
Karimun	7	29
Bintan	9	20
Natuna	1	16
Lingga	1	15
Kepulauan Anambas	3	13
Kota Batam	186	225
Kota Tanjungpinang	51	74
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>258</b>	<b>392</b>

<https://kepri.bps.go.id>

# INFRASTRUKTUR EKONOMI

BAB  
Chapter

# 21

ECONOMY INFRASTRUCTURE



**128**  
**Pasar  
Market**

Pasar dengan bangunan permanen <i>Market in permanent building</i>	<b>91</b>
Pasar dengan bangunan semi permanen <i>Market in semi permanent building</i>	<b>18</b>
Pasar tanpa bangunan <i>Market without permanent building</i>	<b>19</b>

Penginapan  
*Inn*

**306**

Hotel  
*Hotel*

**350**

**656**

**Sarana Akomodasi  
Accommodation Facilities**



**BANK**

**374**  
**Bank  
Bank**

Bank Umum Pemerintah  
*Government Bank*

**168**

Bank Perkreditan Rakyat  
*Rural Bank*

**78**

Bank Umum Swasta  
*Privat Bank*

**128**

Koperasi Unit Desa  
*Village Cooperative Unit*

**20**

Kospin  
*Savings and Loans Cooperative*

**229**

Kopinkra  
*Small Industry and Citizen Handicraft  
Cooperative*

**4**

Koperasi Lainnya  
*Other Cooperative*

**135**

**388**

**Koperasi  
Cooperatives**





## Penjelasan Teknis Infrastruktur Ekonomi

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip:
  - a. Keanggotaannya sukarela dan terbuka;
  - b. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis;
  - c. Pembagian sisa hasil usahanya dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
  - e. Kemandirian, serta sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
2. Mini Market adalah tempat usaha yang menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan sistem pelayanan mandiri dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400 m<sup>2</sup>.
3. Restoran adalah tempat usaha yang menggunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahannya dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna jasa. Restoran mempunyai ciri bahwa pembeli dikenakan pajak. Izin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh Ditjen Pariwisata atau Kanwil Parpostel setempat.
4. Rumah Makan adalah tempat usaha yang menyediakan jasa pangan yang

## Technical Notes Economy Infrastructure

1. *Cooperative is a business entity consisting of people or cooperative legal entities which activities are based on the principles:*
  - a. *Membership is voluntary and open;*
  - b. *Management is conducted democratically;*
  - c. *Benefits are distributed proportionally according to the member's share;*
  - d. *Remuneration is limited to the capital; and*
  - e. *Independence, as well as the people's economic movement based on the principle of kinship;*
2. *Mini Market is a place of business which sell various kinds of goods at retail by self-service system and everything has a price tag, with a building area of less than 400 m<sup>2</sup>.*
3. *Restaurant is a place of business that use the entire building permanently to provide food processing services and presented directly in place in accordance with the wishes of service users. Restaurant has characteristic that the buyers have to pay taxes. The license of restaurant and its qualifications are awarded by the Directorate General of Tourism or the Regional Office of Tourism, Post, and Telecommunications.*
4. *Food Stall is a place of business that provide providing food services that food processing*

pengolahan makanannya bisa dilakukan di luar rumah makan. Rumah makan mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin rumah makan diberikan oleh Dinas Pariwisata Daerah atau Direktorat Perekonomian/Bagian Perekonomian Pemerintah daerah setempat.

5. Warung/Kedai Makanan Minuman adalah tempat usaha yang menjual makanan dan minuman siap saji yang dijual di bangunan yang tetap dan tidak mempunyai surat ijin usaha. Ciri utama dari warung/kedai makanan minuman adalah pembeli biasanya tidak dikenakan pajak.
6. Toko/Warung Kelontong adalah tempat usaha di bangunan tetap yang menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran, tidak mempunyai sistem pelayanan mandiri dikelola oleh satu penjual.
7. Toko/warung kelontong yang menjual bahan pangan (sembako) adalah tempat usaha di bangunan tetap yang khusus menjual bahan pangan (sembako) secara eceran, tidak mempunyai sistem pelayanan mandiri dan dikelola oleh satu penjual.
8. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, d.l.l) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.

*can be done outside the facility. Food Stall has characteristic that the buyers usually pay taxes. The license of food stall is granted by the Regional Office of Tourism or the Directorate/ Section of Economic Affairs at the local government.*

5. *Food and Beverage Store is a place of business that sell prepared food and beverages in the permanent building and does not has a business license. The main characteristic of food and beverage store is buyers usually are not taxed.*
6. *Shop/ Grocery Store is a place of business that sell daily use items at retail, does not has self-service system, and is managed by a single seller.*
7. *Grocery shop/kios that sell basic food stuffs is a place of business in permanent buildings that specifically sell basic foodstuffs in retail. It, does not have self service system and managed by one seller.*
8. *Hotel is the kind of accommodation that use part or the whole building for lodging services, food and beverage and other services (such as restaurants, laundry, etc.) for the public which is commercially managed with a business license of hotel.*

9. Penginapan (Hostel/Motel/Losmen/Wisma) adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel.
  10. Kelompok Pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal sepuluh toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya bisa lebih dari satu.
  11. Pasar dengan Bangunan Permanen/Semi Permanen adalah pasar yang menggunakan bangunan tetap dan memiliki lantai, atap, baik berdinding maupun tidak.
  12. Pasar Tanpa Bangunan adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan, termasuk pasar terapung.
  13. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
  14. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).
  15. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
9. *Inn is a type of accommodation that use part or the whole building for lodging services to the public, usually without eating and drinking facilities which is commercially managed with a business license of non-hotel.*
  10. *Shopping Complex is a group of shops consisting at least ten stores and clumped. In one shopping complex, number of physical buildings can be more than one.*
  11. *Market in the Permanent/Semi Permanent Building is a market that uses the permanent building and have floor, roof, whether it walled or not.*
  12. *Market Without Building is a market that is not located within the building, including the floating market.*
  13. *Bank is business entity that raise funds from the public in deposits and distribute it to the public in order to improve the living standard of the people.*
  14. *Commercial Bank is a bank that can provide services in payment transfer (Law Number 7 Year 1992 About Banking).*
  15. *Rural bank is a bank that accepts saving in time deposits, savings, or others.*

**TABEL : 21.1** **BANYAKNYA KELOMPOK PERTOKOAN DAN PASAR**  
**MENURUT KABUPATEN/KOTA**  
**TABLE : 21.1** **NUMBER OF SHOPPING COMPLEXES AND MARKETS BY**  
**REGENCY/MUNICIPALITY**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kelompok Pertokoan <i>Shopping Complexs</i>	Pasar dengan Bangunan Permanen <i>Markets in Permanent Building</i>	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen <i>Market in Semi Permanent Building</i>	Pasar tanpa Bangunan <i>Market without Permanent Building</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	102	11	–	–
Bintan	30	7	2	–
Natuna	5	5	4	–
Lingga	7	6	–	1
Kepulauan Anambas	4	8	1	1
Kota Batam	948	47	10	15
Kota Tanjungpinang	116	7	1	2
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>1212</b>	<b>91</b>	<b>18</b>	<b>19</b>

<https://kepri.bps.go.id>



**TABEL : 21.2**  
**BANYAKNYA SARANA PERDAGANGAN**  
**MENURUT KABUPATEN/KOTA**  
**NUMBER OF TRADING FACILITIES BY**  
**REGENCY/MUNICIPALITY**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sarana Perdagangan <i>Trading Facility</i>	
	Mini Market/Swalayan/ Supermarket <i>Mini Market/Swalayan/ Supermarket</i>	Restoran/ Rumah Makan <i>Restaurant/ Food Stall</i>
(1)	(2)	(3)
Karimun	86	82
Bintan	78	71
Natuna	12	5
Lingga	17	78
Kepulauan Anambas	4	93
Kota Batam	682	863
Kota Tanjungpinang	86	246
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>965</b>	<b>1438</b>

**TABEL : 21.3** **BANYAKNYA SARANA AKOMODASI MENURUT KABUPATEN/KOTA**  
*TABLE : 21.3* *NUMBER OF ACCOMODATION FACILITIES BY REGENCY/MUNICIPALITY*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sarana Akomodasi <i>Accomodation Facility</i>	
	Hotel <i>Hotel</i>	Penginapan <i>Inn</i>
(1)	(2)	(3)
Karimun	31	33
Bintan	45	26
Natuna	15	34
Lingga	9	39
Kepulauan Anambas	2	23
Kota Batam	216	86
Kota Tanjungpinang	32	65
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>350</b>	<b>306</b>

<https://kepri.bps.go.id>

**TABEL : 21.4 BANYAKNYA LEMBAGA KEUANGAN BANK MENURUT KABUPATEN/KOTA**  
**TABLE NUMBER OF BANK FACILITIES BY REGENCY/MUNICIPALITY**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jenis Bank <i>The Type of Bank</i>		
	Bank Umum Pemerintah <i>Government Bank</i>	Bank Umum Swasta <i>Private Bank</i>	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) <i>Rural Bank</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	15	6	9
Bintan	14	5	7
Natuna	9	1	1
Lingga	7	–	1
Kepulauan Anambas	7	2	–
Kota Batam	93	95	49
Kota Tanjungpinang	23	19	11
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>168</b>	<b>128</b>	<b>78</b>

**TABEL : 21.5** BANYAKNYA LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI MENURUT  
**KABUPATEN/KOTA**  
*TABLE* *NUMBER OF COOPERATIVES BY REGENCY/MUNICIPALITY*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Koperasi Unit Desa <i>Village Cooperative Unit</i>	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat <i>Small Industry and Citizen Handicraft Cooperative</i>	Koperasi Simpan Pinjam <i>Savings and Loan Cooperative</i>	Koperasi Lainnya <i>Other Cooperative</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	2	–	11	1
Bintan	6	1	24	–
Natuna	4	–	8	12
Lingga	4	3	13	7
Kepulauan Anambas	1	–	6	1
Kota Batam	1	–	104	113
Kota Tanjungpinang	2	–	63	1
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>229</b>	<b>135</b>

<https://kepri.bps.go.id>

# DAFTAR PUSTAKA/*BIBLIOGRAPHY*

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 2024. *Buku 3: Pedoman Konsep dan Definisi Podes 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

<https://kepri.bps.go.id>





**LAMPIRAN**  
**APPENDIX**



<https://kepri.go.id>





**PODES2024- DESA**

**REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**PENDATAAN POTENSI DESA/KELURAHAN 2024**

**RAHASIA**

I. KETERANGAN TEMPAT				
101	Provinsi			<input type="text"/>
102	Kabupaten/Kota *)			<input type="text"/>
103	Kecamatan			<input type="text"/>
104	Desa/Kelurahan *)			<input type="text"/>
105	Status Daerah	<i>Perkotaan - 1</i> <i>Perdesaan - 2</i>		<input type="text"/>
106	a. SK pembentukan/pengesahan desa/kelurahan			
	<i>Permendagri/Kepmendagri</i>	- 1	<i>SK Gubernur/Bupati</i>	- 4
	<i>Perda Provinsi</i>	- 2	<i>Lainnya..... (tuliskan)</i>	- 5
	<i>Perda Kabupaten</i>	- 3		<input type="text"/>
	b. Jika SK Permendagri (R106a kode 1), kode desa			<input type="text"/>
107	Status definitif desa dan operasional desa/kelurahan:			
	a. Ada wilayah desa/kelurahan dengan batas yang jelas	<i>Ya - 1</i>	<i>Tidak - 2</i>	<input type="text"/>
	b. Ada penduduk yang menetap di wilayah desa/kelurahan	<i>Ya - 1</i>	<i>Tidak - 2</i>	<input type="text"/>
	c. Ada pemerintah desa/kelurahan	<i>Ya - 1</i>	<i>Tidak - 2</i>	<input type="text"/>
<b>Jika R107 a, b atau c ada yang berkode 2, maka lanjutkan ke R201 sampai R207 kemudian STOP</b>				
108	Lokasi pelayanan pemerintah desa/kelurahan:			
	a. Alamat lengkap			
	b. Nomor telepon	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Alamat e-mail			Kode Pos : <input type="text"/>
II. KETERANGAN PETUGAS DAN NARASUMBER				
201	Nama Pencacah		202	NIP/NIM <input type="text"/>
203	Tanggal Kunjungan			
	No	Tanggal Kunjungan		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
204	Nama Pengawas/ Pemeriksa		205	NIP/NIM <input type="text"/>
206	Tanggal Pemeriksaan	<input type="text"/>		
207	Narasumber :			
	Nama	Jabatan	No. Telepon	Email
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

\*) Coret yang tidak sesuai

**DAFTAR INI DIISI OLEH PETUGAS BERDASARKAN HASIL PENCACAHAN/  
WAWANCARA DENGAN NARASUMBER TERKAIT YANG BERWENANG  
DAN RELEVAN, SERTA PENELUSURAN DOKUMEN DESA/KELURAHAN**

..... 2024

Mengetahui  
Kepala Desa/Lurah\*)\_\_\_\_\_  
Nama dan Stempel

III. KETERANGAN UMUM DESA/KELURAHAN															
301	Status pemerintahan: Desa - 1 Kelurahan - 2 UPT/SPT - 3 Nagari - 4		<input type="checkbox"/>												
302	Peta desa/kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota atau Gubernur: Ada - 1 Tidak ada - 2		<input type="checkbox"/>												
303	a. Keberadaan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di bawah desa/kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2 → R304		<input type="checkbox"/>												
	b. Banyaknya jenjang SLS di bawah desa/kelurahan:		<input type="checkbox"/>												
	c. Banyaknya SLS terkecil di desa/kelurahan:		<input type="checkbox"/>												
	d. Daftar SLS terkecil di desa/kelurahan:		<input type="checkbox"/>												
	<p style="text-align: center;">Keterangan Kondisi pada Master (Kondisi Awal)</p> <p style="text-align: center;">Jika tidak ada SLS/Non SLS di bawah desa maka petugas harus mengkonfirmasi apakah saat ini telah terbentuk SLS/Non SLS di bawah desa</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Kode SLS/Non SLS</th> <th style="width: 30%;">Nama SLS/Non SLS</th> <th style="width: 35%;">Hasil Identifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ada - 1 Tidak Ada - 2</td> </tr> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> </tr> </tbody> </table>		No	Kode SLS/Non SLS	Nama SLS/Non SLS	Hasil Identifikasi				Ada - 1 Tidak Ada - 2	(1)	(2)	(3)	(4)	
No	Kode SLS/Non SLS	Nama SLS/Non SLS	Hasil Identifikasi												
			Ada - 1 Tidak Ada - 2												
(1)	(2)	(3)	(4)												
304	Luas wilayah desa/kelurahan : ..... km <sup>2</sup> (1 Ha= 0,01 km <sup>2</sup> )	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
305	a. Topografi sebagian besar wilayah desa/kelurahan: Puncak/Tebing - 1 Lereng - 2 Dataran - 3 → R305c Lembah - 4 → R305c		<input type="checkbox"/>												
	b. Keberadaan permukiman penduduk di puncak/tebing/lereng: Ada - 1 Tidak ada - 2		<input type="checkbox"/>												
	c. Wilayah desa/kelurahan terletak di sebanyak ..... pulau.		<input type="checkbox"/>												
306	Keberadaan, status, kondisi, dan lokasi kantor kepala desa/lurah:														
	a. Keberadaan kantor kepala desa/lurah: Ada - 1 Tidak ada - 2 → R307		<input type="checkbox"/>												
	b. Status kantor kepala desa/lurah: Aset desa/kelurahan - 1 Bukan aset desa/kelurahan - 2		<input type="checkbox"/>												
	c. Kondisi kantor kepala desa/lurah: Layak - 1 Tidak layak - 2		<input type="checkbox"/>												
d. Lokasi kantor kepala desa/lurah: Di dalam wilayah desa/kelurahan - 1 Di luar wilayah desa/kelurahan - 2		<input type="checkbox"/>													
307	a. Kegiatan pemerintahan desa/kelurahan utamanya dilaksanakan di: Kantor kepala desa/lurah - 1 Bukan kantor kepala desa/lurah - 2		<input type="checkbox"/>												
	b. Koordinat lokasi kegiatan pemerintahan desa/kelurahan:														
	1. Koordinat: Garis Lintang (Latitude): Lintang Utara (LU) - 1 Lintang Selatan (LS) - 2 Garis Bujur (Longitude) Timur: .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>											
	2. Ketinggian letak (Altitude) lokasi kegiatan pemerintahan desa/kelurahan dari permukaan air laut (dpal): ..... m		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>											
308	a. Ada wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut: Ada - 1 Tidak ada - 2 → R309		<input type="checkbox"/>												
	b. Jika wilayah desa/kelurahan ada yang berbatasan langsung dengan laut:														
	1. Pemanfaatan laut untuk:														
	a) Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut) Ada - 1 Tidak ada - 2		<input type="checkbox"/>												
	b) Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut) Ada - 1 Tidak ada - 2		<input type="checkbox"/>												
	c) Tambak garam Ada - 1 Tidak ada - 2		<input type="checkbox"/>												
d) Wisata bahari Ada - 1 Tidak ada - 2		<input type="checkbox"/>													
e) Transportasi umum Ada - 1 Tidak ada - 2		<input type="checkbox"/>													
2. Keberadaan tanaman mangrove (misalnya: bakau, api-api, pedada, tanjang, dll.) di desa/kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2 → R309		<input type="checkbox"/>													
3. Kondisi mangrove: Baik - 1 Sebagian rusak - 2 Rusak - 3		<input type="checkbox"/>													

Lanjutan Lampiran 1 / *Continued Appendix 1*

309	a. Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap kawasan hutan/hutan: <i>Di dalam kawasan hutan - 1 Di tepi/sekitar kawasan hutan - 2 Di luar kawasan hutan - 3 → R310</i>	<input type="checkbox"/>
	b. Status kawasan hutan/hutan : <i>Hutan Negara - 1 Hutan Hak - 2 Hutan Adat - 3</i>	<input type="checkbox"/>
	c. Fungsi kawasan hutan/hutan : <i>Konservasi - 1 Lindung - 2 Produksi - 4</i>	<input type="checkbox"/>
	d. Ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan/hutan: <i>Tinggi - 1 Sedang - 2 Rendah - 3 Tidak tergantung - 4</i>	<input type="checkbox"/>
	e. Program Perhutanan Sosial tahun 2023: <i>Ada - 1 Tidak - 2</i>	<input type="checkbox"/>
310	Keberadaan satwa/tumbuhan yang dilindungi: <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i>	<input type="checkbox"/>
<b>IV. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN</b>		
401	Penduduk dan keluarga pada 1 Januari 2024:	
	a. Jumlah penduduk laki-laki	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> orang
	c. Jumlah keluarga	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> keluarga
d. Jumlah keluarga pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> keluarga	
402	a. Keberadaan warga desa/kelurahan yang sedang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia/TKI di luar negeri pada 1 Januari 2024: <i>Ada - 1 Tidak ada - 2 → R402c</i>	<input type="checkbox"/>
	b. Jumlah warga desa/kelurahan yang sedang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia/TKI di luar negeri pada 1 Januari 2024: 1. Laki-laki 2. Perempuan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> orang <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> orang
	c. Keberadaan agen (seseorang/sekelompok orang/perusahaan) penerahan Pekerja Migran Indonesia/TKI ke luar negeri di desa/kelurahan pada tahun 2023: <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i>	<input type="checkbox"/>
	d. 1. Sejak tahun 2018 sampai 2023, apakah pihak desa/kelurahan telah memberikan layanan rekomendasi/surat keterangan bagi warga desa/kelurahan yang akan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia/TKI di luar negeri: <i>Ada - 1 Tidak ada - 2 → R402e</i>	<input type="checkbox"/>
	2. Selama tahun 2023, berapa jumlah calon PMI yang mendapatkan rekomendasi/surat keterangan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia/TKI di luar negeri dari kepala desa/ lurah: a. Laki-laki b. Perempuan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> orang <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> orang
	e. 1. Keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di desa/kelurahan pada 1 Januari 2024: <i>Ada - 1 Tidak ada - 2 → R403</i>	<input type="checkbox"/>
	2. Jumlah Warga Negara Asing (WNA) di desa/kelurahan pada 1 Januari 2024 a. Laki-laki b. Perempuan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> orang <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> orang
403	a. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan berasal dari lapangan usaha:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<i>Pertanian, kehutanan, dan perikanan - 1 Real estat - 12</i>	
	<i>Pertambangan dan penggalian - 2 Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis - 13</i>	
	<i>Industri pengolahan - 3 Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya - 14</i>	
	<i>Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin - 4 Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib - 15</i>	
	<i>Treatment air, treatment air limbah, Treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi - 5 Pendidikan - 16</i>	
	<i>Konstruksi - 6 Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial - 17</i>	
	<i>Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor - 7 Kesenian, hiburan, dan rekreasi - 18</i>	
	<i>Pengangkutan dan pergudangan - 8 Aktivitas jasa lainnya - 19</i>	
	<i>Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum - 9 Aktivitas keluarga sebagai pemberi kerja - 20</i>	
	<i>Informasi dan komunikasi - 10 Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya - 21</i>	
	<i>Aktivitas keuangan &amp; asuransi - 11 Jika R403a berkode 2-21 → R501</i>	

Lanjutan Lampiran 1/Continued Appendix 1

403	b. 1. Jenis sub sektor utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan:				
	<i>Tanaman Pangan</i>	- 1	<i>Perikanan</i>	- 5	<input type="checkbox"/>
	<i>Tanaman Hortikultura</i>	- 2	<i>Kehutanan</i>	- 6	
<i>Tanaman Perkebunan</i>	- 3	<i>Jasa Pertanian</i>	- 7 → <b>R403c1</b>		
<i>Peternakan</i>	- 4				
2. Komoditas utama dari sub sektor utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan:.....(tuliskan)					<input type="text"/>
403	c. Jenis prasarana transportasi dari/ke lokasi sentra produksi pertanian di desa/kelurahan:				
	1. Jenis prasarana transportasi dari/ke lokasi sentra produksi pertanian ke jalan utama desa/kelurahan:				<input type="checkbox"/>
	<i>Aspal/beton</i>	- 1	<i>Tanah</i>	- 3	
<i>Diperkeras (kerikil, batu, dll)</i>	- 2	<i>Air</i>	- 4 → <b>R501</b>		
(tuliskan, misalnya: jalan setapak, kayu/papan, dll)					
403	2. Jalan darat dari/ke lokasi sentra produksi pertanian ke jalan utama desa/kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih:				
	<i>Sepanjang tahun</i>	- 1	<i>Selama musim kemarau</i>	- 3	<input type="checkbox"/>
	<i>Sepanjang tahun kecuali saat tertentu</i>	- 2	<i>Tidak dapat dilalui sepanjang tahun</i>	- 4	
(ketika turun hujan, pasang, dll)					
<b>V. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>					
501	a. Jumlah keluarga pengguna listrik:				
	1. PLN (Perusahaan Listrik Negara)				<input type="text"/> keluarga
	2. Non-PLN (misalnya: swasta, swadaya, atau perseorangan)				<input type="text"/> keluarga
501	b. Jumlah keluarga bukan pengguna listrik:				<input type="text"/> keluarga
	c. Keluarga yang menggunakan lampu tenaga surya: <i>Ada, sebagian besar</i> - 1 <i>Ada, sebagian kecil</i> - 2 <i>Tidak ada</i> - 3				<input type="checkbox"/>
502	a. Penerangan di jalan desa/kelurahan yang menggunakan lampu tenaga surya: <i>Ada</i> - 1 <i>Tidak ada</i> - 2				<input type="checkbox"/>
	b. Penerangan di jalan utama desa/kelurahan: <i>Ada, sebagian besar</i> - 1 <i>Ada, sebagian kecil</i> - 2 <i>Tidak ada</i> - 3 → <b>R503</b>				<input type="checkbox"/>
	c. Sumber penerangan di jalan utama desa/kelurahan:				<input type="checkbox"/>
<i>Listrik diusahakan oleh pemerintah</i> - 1 <i>Listrik diusahakan oleh non pemerintah</i> - 2 <i>Non listrik</i> - 3					
503	a. Bahan bakar untuk memasak yang digunakan oleh keluarga:				
	1. Listrik	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	1. <input type="checkbox"/>	
	2. Elpiji 5,5 kg /blue gaz	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	2. <input type="checkbox"/>	
	3. Elpiji 12 kg	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	3. <input type="checkbox"/>	
	4. Elpiji 3 kg	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	4. <input type="checkbox"/>	
	5. Gas kota	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	5. <input type="checkbox"/>	
	6. Biogas	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	6. <input type="checkbox"/>	
	7. Minyak tanah	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	7. <input type="checkbox"/>	
	8. Briket	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	8. <input type="checkbox"/>	
	9. Arang	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	9. <input type="checkbox"/>	
	10. Kayu bakar	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	10. <input type="checkbox"/>	
	11. Lainnya .....(tuliskan)	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	11. <input type="checkbox"/>	
b. Bahan bakar untuk memasak <b>sebagian besar keluarga</b> : (Pilih salah satu kode pada R503a yang dijawab "Ya")				<input type="checkbox"/>	
c. Jika <b>R503a.10 berkode 1</b> , cara memperoleh kayu bakar oleh sebagian besar keluarga:				<input type="checkbox"/>	
<i>Pembelian</i> - 1 <i>Pengambilan dari luar kawasan hutan/hutan</i> - 3					
<i>Pengambilan dari kawasan hutan/hutan</i> - 2 <i>Lainnya .....(tuliskan)</i> - 4					

Lanjutan Lampiran 1/ *Continued Appendix 1*

504	a. Tempat buang sampah keluarga:				
	1. a) Tempat sampah, kemudian diangkut	Ya - 1	Tidak - 2 → R504a2	1.	<input type="checkbox"/>
	b) Berapa kali frekuensi pengangkutan dilakukan dalam satu minggu?				<input type="checkbox"/>
	4 kali atau lebih - 1	2 kali - 3			
	3 kali - 2	1 kali atau kurang - 4			
	2. Dalam lubang atau dibakar	Ya - 1	Tidak - 2	2.	<input type="checkbox"/>
	3. Sungai/saluran irigasi/danau/laut	Ya - 1	Tidak - 2	3.	<input type="checkbox"/>
	4. Drainase (got/selokan)	Ya - 1	Tidak - 2	4.	<input type="checkbox"/>
	5. Lainnya ..... (tuliskan)	Ya - 1	Tidak - 2	5.	<input type="checkbox"/>
	b. Tempat buang sampah <b>sebagian besar keluarga</b> (Pilih salah satu kode pada R504a yang dijawab "Ya"):				<input type="checkbox"/>
c. Keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS):	Ada, digunakan - 1	Ada, tidak digunakan - 2	Tidak ada - 3	<input type="checkbox"/>	
d. Keberadaan Tempat Penampungan Sementara Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di desa/kelurahan:				<input type="checkbox"/>	
Ada, digunakan - 1	Ada, tidak digunakan - 2	Tidak ada - 3			
e. Keberadaan bank sampah di desa/kelurahan:		Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>	
f. 1. Apakah dilakukan proses pemilahan di TPS3R?	Ya - 1	Tidak - 2 → R505		<input type="checkbox"/>	
2. Jenis pemilahan yang dilakukan di TPS3R (lingkari kode yang sesuai)				<input type="checkbox"/>	
Sampah organik - A	Sampah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) - C				
Sampah anorganik - B	Sampah residu - D				
505	Pemilahan sampah membusuk dan sampah kering:				<input type="checkbox"/>
Semua keluarga - 1	Sebagian kecil keluarga - 3				
Sebagian besar keluarga - 2	Tidak ada - 4				
506	a. Penggunaan fasilitas buang air besar <b>sebagian besar keluarga</b> di desa/kelurahan:				<input type="checkbox"/>
Jamban sendiri - 1	Jamban umum - 3				
Jamban bersama - 2	Bukan jamban - 4 → R507				
b. Tempat pembuangan akhir tinja <b>sebagian besar keluarga</b> :				<input type="checkbox"/>	
Tangki septik - 1	Kolam/sawah/sungai/danau/laut - 3	Pantai/tanah lapang/kebun - 5			
IPAL - 2	Lubang tanah - 4	Lainnya - 6			
507	Tempat/saluran pembuangan limbah cair dari air mandi/cuci <b>sebagian besar keluarga</b> :				<input type="checkbox"/>
Lubang resapan - 1	Dalam lubang atau tanah terbuka - 4				
Drainase (got/selokan) - 2	Lainnya ..... (tuliskan) - 5				
Sungai/saluran irigasi/danau/laut - 3					
508	a. Sumber air untuk minum <b>sebagian besar keluarga</b> berasal dari:				<input type="checkbox"/>
Air kemasan bermerek - 1	Sumur - 6				
Air isi ulang - 2	Mata air - 7				
Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM) - 3	Sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/bendungan - 8				
Ledeng tanpa meteran - 4	Air hujan - 9				
Sumur bor atau pompa - 5	Lainnya ..... (tuliskan) - 10				
b. Sumber air untuk mandi/cuci <b>sebagian besar keluarga</b> berasal dari:				<input type="checkbox"/>	
Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM) - 1	Mata air - 5				
Ledeng tanpa meteran - 2	Sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/bendungan - 6				
Sumur bor atau pompa - 3	Air hujan - 7				
Sumur - 4	Lainnya ..... (tuliskan) - 8				
509	a. Wilayah desa/kelurahan dilalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) / Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) / Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS):				<input type="checkbox"/>
Ya - 1	Tidak - 2 → R510				
b. Keberadaan permukiman di bawah SUTET/SUTT/SUTTAS:				<input type="checkbox"/>	
Ada - 1	Tidak ada - 2 → R510				
c. Jika ada permukiman di bawah SUTET/SUTT/SUTTAS:					
1. Jumlah lokasi			<input type="text"/>	lokasi	
2. Jumlah bangunan rumah			<input type="text"/>	unit	
3. Jumlah keluarga (Isian tidak boleh lebih dari isian R401c)			<input type="text"/>	keluarga	

Lanjutan Lampiran 1/Continued Appendix 1

510	Penggunaan sungai, saluran irigasi, danau/waduk/situ/bendungan, dan embung:					
	Jenis penggunaan		Sungai	Saluran irigasi	Danau/waduk/situ/bendungan	Embung
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Keberadaan:	Ada - 1      Tidak ada - 2 → R511	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Penggunaan:	Ya - 1      Tidak - 2				
	1. Mandi/cuci		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Sumber air minum/masak		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. Bahan baku air minum		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. Pengairan/irigasi lahan pertanian		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. Pariwisata (komersial)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Perikanan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Transportasi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Pembangkit listrik		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Industri/pabrik		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. Lainnya .....	(tuliskan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
511	a. Jika ada sungai (R510 kolom 2 berkode 1), keberadaan permukiman di bantaran sungai: Ada - 1      Tidak ada - 2 → R511c <input type="checkbox"/>					
	b. Jika ada permukiman di bantaran sungai:					
	1. Jumlah lokasi <input type="text"/> lokasi					
	2. Jumlah bangunan rumah <input type="text"/> unit					
	3. Jumlah keluarga (isian tidak boleh lebih dari isian R401c) <input type="text"/> keluarga					
512	c. 1. Jika ada sungai (R510 kolom 2 berkode 1), air sungai tercemar limbah: Ya - 1      Tidak - 2 → R512 <input type="checkbox"/>					
	2. Jika air sungai tercemar limbah, sumber limbah berasal dari:					
	a. Pabrik/industri/usaha      Ya - 1      Tidak - 2 <input type="checkbox"/>					
	b. Rumah tangga      Ya - 1      Tidak - 2 <input type="checkbox"/>					
	c. Lainnya      Ya - 1      Tidak - 2 <input type="checkbox"/>					
3. Sumber limbah berlokasi di: Dalam desa/kelurahan ini - 1      Luar desa/kelurahan ini - 2      Dalam dan luar desa/kelurahan - 3 <input type="checkbox"/>						
512	a. Keberadaan mata air di desa/kelurahan: Ada, dikelola - 1      Ada, tidak dikelola - 2      Tidak ada - 3 <input type="checkbox"/>					
	b. Jumlah embung di desa/kelurahan: <input type="text"/> buah					
513	a. Keberadaan permukiman kumuh (sanitasi lingkungan buruk, bangunan padat dan sebagian besar tidak layak huni) di desa/kelurahan: Ada - 1      Tidak ada - 2 → R514 <input type="checkbox"/>					
	b. Jika ada permukiman kumuh:					
	1. Jumlah lokasi <input type="text"/> lokasi					
	2. Jumlah bangunan rumah <input type="text"/> unit					
3. Jumlah keluarga (isian tidak boleh lebih dari isian R401c) <input type="text"/> keluarga						
514	Pencemaran lingkungan hidup (polusi) di desa/kelurahan selama setahun terakhir:					
	Pencemaran lingkungan hidup (polusi)	Kejadian pencemaran lingkungan hidup Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada kejadian pencemaran lingkungan hidup (kolom (2) berkode 1)			
			Sumber pencemaran lingkungan hidup yang utama Rumah tangga - 1 Pabrik/industri/usaha - 2 Lainnya - 3	Pengaduan warga ke aparat desa/kelurahan Ada - 1 Tidak ada - 2		
	(1)	(2)	(3)		(4)	
	a. Air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	, .....		
	b. Tanah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	, .....		
c. Udara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	, .....			

515	Kegiatan pelestarian lingkungan dan pengolahan sampah selama <b>3 tahun terakhir</b>				Ada, sebagian warga terlibat - 1			
	Jenis Kegiatan				Ada, warga tidak terlibat - 2			
	(1)		(2)					
	a. Penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan sejenisnya oleh masyarakat desa/kelurahan				<input type="checkbox"/>			
	b. Pengolahan/daur ulang sampah/limbah ( <i>reuse, recycle</i> ) oleh masyarakat desa/kelurahan				<input type="checkbox"/>			
c. Penggalakan penggunaan pupuk organik di lahan pertanian				<input type="checkbox"/>				
516	Keberadaan dan keaktifan komunitas/kelompok lingkungan hidup (meliputi gerakan lingkungan berkelanjutan, sadar lingkungan, siaga bencana)							<input type="checkbox"/>
		Ada, aktif - 1		Ada, tidak aktif - 2		Tidak ada - 3		
517	Kebiasaan masyarakat membakar ladang/kebun di desa/kelurahan untuk proses usaha pertanian: Ada - 1 Tidak ada - 2							<input type="checkbox"/>
518	Keberadaan lokasi penggalian Golongan C (misalnya: batu kali, pasir, kapur, kaolin, pasir kuarsa, tanah liat, dll.) di desa/kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2							<input type="checkbox"/>
<b>VI. BENCANA ALAM DAN MITIGASI BENCANA ALAM</b>								
601	Kejadian/bencana alam (mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat) yang terjadi :							
	Kejadian/bencana alam	Kejadian Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada kejadian/bencana alam ( <b>kolom (2) berkode 1</b> )					Keberadaan Korban
			Tahun 2023		Januari - April 2024			
			Banyak kejadian	Korban Meninggal	Keberadaan Korban	Banyak kejadian	Korban Meninggal	Keberadaan Korban
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Tanah longsor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
b.	Banjir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
c.	Banjir bandang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
d.	Gempa bumi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
e.	Tsunami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
f.	Gelombang pasang laut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
g.	Angin puyuh/puting beliung/ topan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
h.	Gunung meletus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
i.	Kebakaran hutan dan lahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
j.	Kekeringan (lahan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
k.	Abrasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D
<b>Kode kolom (5) dan (8):</b> Pilihan boleh lebih dari satu kode								
			Korban hilang - A		Korban terluka/sakit - B			
			Korban mengungsi - C		Tidak ada korban hilang/terluka/sakit/mengungsi - D			
602	Jika R.601 kol (3) tidak sama dengan '0' semua, berapa jumlah korban yang terdampak bencana tahun 2023 ..... orang							<input type="text"/>
603	Jika R.601 kol (3) tidak sama dengan "0" semua, berapa luas areal pertanian yang terdampak/rusak pada tahun 2023 .....Ha							<input type="text"/>
604	Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di desa/kelurahan:							
a.	Sistem peringatan dini bencana alam				Ada - 1		Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>	
b.	Sistem peringatan dini khusus tsunami		Ada - 1		Tidak ada - 2		Bukan wilayah potensi tsunami - 3 <input type="checkbox"/>	
c.	Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll.)				Ada - 1		Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>	
d.	Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana				Ada - 1		Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>	
e.	Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll.				Ada - 1		Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>	

605	Apakah Desa/SLS dibawahnya termasuk dalam:					
	a. Desa Tangguh Bencana (Destana)	Ya	- 1	Tidak	- 2	<input type="checkbox"/>
	b. Program Kampung Iklim (Proklim)	Ya	- 1	Tidak	- 2	<input type="checkbox"/>
	c. Kampung Pesisir Tangguh	Ya	- 1	Tidak	- 2	<input type="checkbox"/>
	d. Kampung Siaga Bencana	Ya	- 1	Tidak	- 2	<input type="checkbox"/>
	e. Kampung Tangguh Covid	Ya	- 1	Tidak	- 2	<input type="checkbox"/>
606	Keberadaan warga desa pernah:					
	1. Mengikuti simulasi kesiapsiagaan bencana					<input type="checkbox"/>
	<i>Sebagian Besar</i>	- 1	<i>Sebagian Kecil</i>	- 2	<i>Tidak Ada</i>	- 3
	2. Mengikuti gladi ruang kesiapsiagaan bencana					<input type="checkbox"/>
	<i>Sebagian Besar</i>	- 1	<i>Sebagian Kecil</i>	- 2	<i>Tidak Ada</i>	- 3
	3. Memiliki sertifikasi pelatihan penanggulangan bencana					<input type="checkbox"/>
	<i>Sebagian Besar</i>	- 1	<i>Sebagian Kecil</i>	- 2	<i>Tidak Ada</i>	- 3
<b>VII. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN</b>						
701	Keberadaan sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di desa/kelurahan					
	Jenis/jenjang pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan		Jika tidak ada lembaga pendidikan ( <i>kolom (2) dan kolom (3) berkode 0</i> ), untuk mencapai sarana pendidikan terdekat		
		Negeri	Swasta	Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai: 1. Sangat mudah 2. Mudah 3. Sulit 4. Sangat sulit	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	a. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. TK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. RA/BA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. SD	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. MI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. SMP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. MTs	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	h. SMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	i. MA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	j. SMK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	k. Akademi/Perguruan Tinggi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	l. SDLB	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	m. SMPLB	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
n. SMALB	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
o. Pondok Pesantren	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
p. Madrasah Diniyah	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
q. Seminari/sejenisnya	<input type="text"/>	<input type="text"/>				



Lanjutan Lampiran 1/Continued Appendix 1

702	a. Kegiatan pendidikan keaksaraan dasar/lanjutan selama <b>setahun terakhir</b> :	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	b. Kegiatan pendidikan Paket A/B/C selama <b>setahun terakhir</b> :	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	c. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) :	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
703	Keberadaan sarana/prasarana keterampilan di desa/kelurahan			
	Jenis pendidikan keterampilan		Jumlah	
			Milik desa/kelurahan	Bukan milik desa/kelurahan
	(1)		(2)	(3)
	a. Bahasa asing		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Komputer		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Menjahit/tata busana		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	d. Kecantikan		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	e. Montir mobil/motor		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	f. Elektronika		<input type="text"/>	<input type="text"/>
g. Lainnya .....		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		<i>(tuliskan, misalnya: tataboga, stir mobil, mengetik, akuntansi, dll.)</i>		
704	Keberadaan sarana kesehatan di desa/kelurahan			
	Sarana kesehatan	Jumlah sarana kesehatan	<i>Jika tidak ada sarana kesehatan (kolom (2) berkode 0), untuk mencapai sarana kesehatan terdekat</i>	
			Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai: 1. Sangat mudah 2. Mudah 3. Sulit 4. Sangat sulit
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Rumah sakit	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Rumah sakit bersalin	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Puskesmas dengan rawat inap	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	d. Puskesmas tanpa rawat inap	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	e. Puskesmas pembantu	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	f. Poliklinik/balai pengobatan	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	g. Tempat praktik dokter	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	h. Rumah bersalin	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	i. Tempat praktik bidan	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	j. Poskesdes (pos kesehatan desa)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	k. Polindes (pondok bersalin desa)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	l. Apotek	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	m. Toko khusus obat/jamu	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
705	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) selama <b>setahun terakhir</b> :			
	a. Jumlah posyandu aktif:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	unit
	b. Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap sebulan sekali:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	unit
	c. Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	unit
	d. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	unit
e. Jumlah kader pelaksana (KB/kesehatan ibu dan anak)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	orang	

Lanjutan Lampiran 1/Continued Appendix 1

706	Tenaga kesehatan yang tinggal/menetap di desa/kelurahan:		
	a. Dokter umum/spesialis:		
	1. Dokter pria		<input type="text"/> orang
	2. Dokter wanita		<input type="text"/> orang
	b. Dokter spesialis gigi (tidak termasuk tukang gigi):		<input type="text"/> orang
	c. Bidan:		<input type="text"/> orang
	d. Tenaga kesehatan lainnya:		<input type="text"/> orang
707	Keberadaan Bidan Di Desa (BDD):		<input type="text"/>
	<i>Ada - 1</i>	<i>Tidak ada - 2</i>	
708	Dukun bayi/dukun bersalin/paraji yang tinggal/menetap di desa/kelurahan:		
	<input type="text"/>		
709	Jumlah warga penderita kekurangan gizi ( <i>marasmus</i> dan <i>kwashiorkor</i> ) di desa/kelurahan selama <b>tahun 2023</b> :		
	<input type="text"/> orang		
710	Jumlah surat miskin/SKTM yang dikeluarkan desa/kelurahan selama <b>tahun 2023</b> :		
	<input type="text"/> surat		
711	Kejadian luar biasa (KLB) atau wabah penyakit selama setahun terakhir		
	Jenis KLB/wabah penyakit (KLB: timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, ditetapkan oleh pemerintah)	Kejadian <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>	Jika ada KLB atau wabah, <b>(kolom (2) berkode 1)</b>
	(1)	(2)	Jumlah penderita jumlah penderita yang meninggal (3) (4)
	a. Muntaber/diare	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Demam berdarah	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Campak	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	d. Malaria	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	e. Flu burung/SARS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	f. Hepatitis E	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	g. Difteri	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	h. Corona/COVID-19	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	i. Lainnya ..... (tuliskan, misalnya: <i>chikungunya, leptospirosis, kolera, dll.</i> )	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	j. Kerawanan Pangan *)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>VIII. SOSIAL BUDAYA</b>			
801	Keberadaan warga yang menganut agama/kepercayaan di desa/kelurahan:		
	Kode	Nama agama/kepercayaan	Keberadaan
	(1)	(2)	(3)
	1	Islam <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>	<input type="text"/>
	2	Kristen <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>	<input type="text"/>
	3	Katolik <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>	<input type="text"/>
	4	Buddha <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>	<input type="text"/>
	5	Hindu <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>	<input type="text"/>
	6	Konghucu <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>	<input type="text"/>
	7	Aliran penghayat kepercayaan..... (tuliskan) <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>	<input type="text"/>
802	Agama/kepercayaan yang dianut oleh <b>sebagian besar</b> warga di desa/kelurahan: (pilih salah satu kode pada <b>R801 kolom (1) yang isian kolom (3) nya berkode 1</b> )		
	<input type="text"/>		

\*) Tidak termasuk KLB

Lanjutan Lampiran 1 / *Continued Appendix 1*

803	Jumlah tempat ibadah di desa/kelurahan:			
	Jenis tempat ibadah		Jumlah	
	(1)		(2)	
	a. Masjid	<input type="text"/>	f. Pura	<input type="text"/>
	b. Surau/Langgar/Musala	<input type="text"/>	g. Wihara	<input type="text"/>
	c. Gereja Kristen	<input type="text"/>	h. Kelenteng	<input type="text"/>
	d. Gereja Katolik	<input type="text"/>	i. Balai Basarah	<input type="text"/>
e. Kapel	<input type="text"/>	j. Lainnya, ..... (tuliskan, misalnya: Pamunjungan, dll.)	<input type="text"/>	
804	a. 1. Warga desa/kelurahan terdiri dari beberapa suku/etnis: <i>Ya - 1 Tidak - 2</i>			<input type="checkbox"/>
	2. Tuliskan tiga nama suku/etnis utama secara berurutan dari yang terbesar:			
	a) .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b) .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
805	b. 1. Warga desa/kelurahan berkomunikasi sehari-hari menggunakan beberapa bahasa: <i>Ya - 1 Tidak - 2</i>			<input type="checkbox"/>
	2. Bahasa sehari-hari sebagian besar warga di desa/kelurahan: .....			<input type="text"/>
				(tuliskan)
	Banyaknya penyandang disabilitas di desa/kelurahan:			
Jenis disabilitas			Banyaknya penyandang disabilitas	
a. Jumlah tuna netra (buta)			<input type="text"/>	
b. Jumlah tuna rungu (tuli)			<input type="text"/>	
c. Jumlah tuna wicara (bisu)			<input type="text"/>	
d. Jumlah tuna rungu-wicara (tuli-bisu)			<input type="text"/>	
e. Jumlah tuna daksa (disabilitas tubuh): kelumpuhan/kelainan/ketidakterlengkapan anggota gerak			<input type="text"/>	
f. Jumlah tuna grahita (keterbelakangan mental)			<input type="text"/>	
g. Jumlah tuna laras (eks-sakit jiwa, mengalami hambatan/gangguan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial)			<input type="text"/>	
h. Jumlah tuna eks-sakit kusta: pernah mengalami sakit kusta dan telah dinyatakan sembuh oleh dokter			<input type="text"/>	
i. Jumlah tuna ganda (fisik-mental): fisik (buta, tuli, bisu, bisu-tuli atau tubuh) dan mental (tunagrahita atau tunalaras)			<input type="text"/>	
806	Jumlah orang yang dipasung di desa/kelurahan:			<input type="checkbox"/> orang
807	a. Ruang publik terbuka yang peruntukan utamanya sebagai tempat bagi warga desa/kelurahan untuk bersantai/bermain tanpa perlu membayar (misalnya: lapangan terbuka/alun-alun, taman, dll.): <i>Ada, dikelola - 1 Ada, tidak dikelola - 2 Tidak ada - 3 → R808</i>			<input type="checkbox"/>
	b. Jika ada ruang publik terbuka, maka keberadaan :			
	1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i>			<input type="checkbox"/>
2. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i>			<input type="checkbox"/>	
808	a. Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan untuk kepentingan umum/komunitas (seperti: kerja bakti, siskamling, pesta rakyat, dll) <b>selama setahun terakhir:</b> <i>Ada, sebagian besar warga terlibat - 1 Ada, sebagian kecil warga terlibat - 2 Tidak ada kebiasaan - 3</i>			<input type="checkbox"/>
	b. Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah (seperti kematian, kesakitan, kecelakaan, dll) <b>selama setahun terakhir:</b> <i>Ada, sebagian besar warga terlibat - 1 Ada, sebagian kecil warga terlibat - 2 Tidak ada kebiasaan - 3</i>			<input type="checkbox"/>

Lanjutan Lampiran 1/Continued Appendix 1

809	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan:			
	Jenis lembaga	Jumlah	Jenis lembaga	Jumlah
	(1)	(2)	(1)	(2)
	a. PKK	<input type="text"/>	d. Kelompok tani	<input type="text"/>
	b. Karang taruna	<input type="text"/>	e. Lembaga pengelolaan air	<input type="text"/>
c. Lembaga adat	<input type="text"/>	f. Kelompok masyarakat (pokmas)	<input type="text"/>	
<b>IX. OLAHRAGA DAN HIBURAN</b>				
901	Ketersediaan fasilitas/lapangan dan kelompok kegiatan olahraga di desa/kelurahan:			
	Jenis olahraga	Fasilitas/lapangan olahraga Ada, baik -1    Ada, rusak parah - 3 Ada, rusak sedang - 2    Tidak ada - 4	Kelompok kegiatan Ada - 1    Tidak ada - 2	
	(1)	(2)	(3)	
	a. Sepak bola	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	b. Bola voli	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	c. Bulu tangkis	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	d. Bola basket	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	e. Tenis lapangan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	f. Tenis meja	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	g. Futsal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	h. Renang	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	i. Bela diri (pencak silat, karate, dll.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	j. Bilyard	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
k. Fitnes, aerobik, dll.	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
l. Lainnya.....(tuliskan)	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
902	a. Keberadaan pub/diskotek/tempat karaoke yang masih berfungsi di desa/kelurahan: Ada - 1 → <b>R1001</b> Tidak ada - 2 <input type="text"/>			
	b. Jika tidak ada pub/diskotek/tempat karaoke, perkiraan jarak ke pub/diskotek/tempat karaoke terdekat : ...., ... km <input type="text"/> , <input type="text"/>			
<b>X. ANGKUTAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>				
1001	Prasarana dan sarana transportasi antar desa/kelurahan :			
	a. Lalu lintas dari/ke desa/kelurahan melalui :			
	Darat - 1    Air - 2 → <b>R1001c</b> Darat dan air - 3    Udara - 4 → <b>R1001c</b> <input type="text"/>			
	b. Jika lalu lintas dari/ke desa/kelurahan melalui darat atau darat dan air ( <b>R1001a</b> berkode 1 atau 3):			
	1. Jenis permukaan jalan darat antar desa/kelurahan yang terluas :			
	Aspal/beton - 1    Tanah - 3 <input type="text"/>			
	Diperkeras (kerikil, batu, dll.) - 2    Lainnya ..... - 4 <input type="text"/>			
	(tuliskan, misalkan: jalan setapak, kayu/papan, dll.)			
	2. Jalan darat antar desa/kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih :			
	Sepanjang tahun - 1 <input type="text"/>			
Sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll.) - 2 <input type="text"/>				
Selama musim kemarau - 3 <input type="text"/>				
Tidak dapat dilalui sepanjang tahun - 4 <input type="text"/>				
c. Angkutan umum yang melewati desa/kelurahan :				
1. Keberadaan angkutan umum :				
Ada, dengan trayek tetap - 1    Ada, tanpa trayek tetap - 2    Tidak ada angkutan umum - 3 → <b>R1002</b> <input type="text"/>				
2. Operasional angkutan umum yang utama :				
Setiap hari - 1    Tidak setiap hari - 2 <input type="text"/>				
3. Jam operasi angkutan umum yang utama :				
Siang dan malam hari - 1    Hanya siang/malam hari - 2 <input type="text"/>				

Lanjutan Lampiran 1 / *Continued Appendix 1*

1002	Sarana transportasi dari kantor kepala desa/lurah ke kantor camat/bupati/walikota:						
	Sarana transportasi yang biasa digunakan oleh sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa/lurah ke	Sarana transportasi yang biasa digunakan	Jika ada angkutan umum ( <i>kolom (2) A dilingkari</i> )		Jarak tempuh (km)	Waktu tempuh (jam: menit)	Biaya transportasi (000 Rupiah)
			Jenis angkutan umum	Angkutan umum yang utama			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	a. Kantor camat	A B C	A B C D E	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="text"/>
b. Kantor bupati/walikota	A B C	A B C D E	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="text"/>	
c. Kantor camat lain terdekat	A B C	A B C D E	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="text"/>	
d. Kantor bupati/walikota lain terdekat	A B C	A B C D E	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Kode kolom (2).</b> pilihan boleh lebih dari satu kode: Angkutan umum - A Kendaraan pribadi - B Jalan kaki, sepeda, dll. - C		<b>Kode kolom (3).</b> pilihan boleh lebih dari satu kode: Ojek sepeda motor - A Kendaraan bermotor roda 3 atau lebih - B Perahu (bermotor maupun tidak bermotor) - C Pesawat terbang - D Lainnya (becak, delman, pedati, dll) - E		<b>Kode kolom (4):</b> Ojek sepeda motor - A Kendaraan bermotor roda 3 atau lebih - B Perahu (bermotor maupun tidak bermotor) - C Pesawat terbang - D Lainnya (becak, delman, pedati, dll) - E			
1003	a. Jumlah keluarga yang berlangganan telepon kabel: <input type="text"/> keluarga						
	b. Keberadaan warga yang menggunakan telepon seluler/handphone: Sebagian besar warga - 1    Sebagian kecil warga - 2    Tidak ada - 3 <input type="checkbox"/>						
1004	Keberadaan internet untuk warnet, game online, dan fasilitas lainnya di desa/kelurahan:    Ada - 1    Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>						
1005	Keberadaan menara telepon seluler, sinyal telepon dan sinyal internet di desa/kelurahan						
	a. Jumlah menara telepon seluler atau Base Transceiver Station (BTS) : <input type="text"/> buah						
	b. Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone yang menjangkau di desa/kelurahan (Indosat Ooredoo, Telkomsel, XL Axiata, Axis, Smart Telecom, dll) : jenis <input type="checkbox"/>						
	c. Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa/kelurahan : Sinyal sangat kuat - 1    Sinyal kuat - 2    Sinyal lemah - 3    Tidak ada sinyal - 4 → <b>R1006</b> <input type="checkbox"/>						
d. Sinyal internet telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan : 5G/4G/LTE - 1    3G/H/H+/EVDO - 2    2,5G/E/GPRS - 3    Tidak ada sinyal internet - 4 <input type="checkbox"/>							
1006	a. Komputer/PC/laptop yang masih berfungsi di kantor kepala desa/lurah: Digunakan - 1    Jarang digunakan - 2    Tidak digunakan - 3    Tidak ada - 4 <input type="checkbox"/>						
	b. Fasilitas internet di kantor kepala desa/lurah: Berfungsi - 1    Jarang berfungsi - 2    Tidak berfungsi - 3    Tidak ada - 4 <input type="checkbox"/>						
1007	a. Kantor pos/pos pembantu/rumah pos: Beroperasi - 1    Jarang beroperasi - 2    Tidak beroperasi - 3    Tidak ada - 4 <input type="checkbox"/>						
	b. Layanan pos keliling:    Ada - 1    Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>						
	c. Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/dokumen) swasta: Beroperasi - 1    Jarang beroperasi - 2    Tidak beroperasi - 3    Tidak ada - 4 <input type="checkbox"/>						
1008	Program/siaran TV/radio yang diterima di desa/kelurahan						
	Program/siaran TV/radio	Program/siaran TV/radio dapat diterima Ya - 1    Tidak - 2		Jika Program/siaran TV dapat diterima ( <i>kolom (kolom 2 berkode 1)</i> ), apakah harus menggunakan parabola/TV kabel? Ya - 1    Tidak - 2			
	(1)	(2)		(3)			
	a. TVRI	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	b. TVRI daerah	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	c. TV swasta	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	d. TV luar negeri	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	e. RRI	<input type="checkbox"/>					
f. RRI daerah	<input type="checkbox"/>						
g. Radio swasta/komunitas	<input type="checkbox"/>						

Lanjutan Lampiran 1/Continued Appendix 1

XI. PENGGUNAAN LAHAN		
1101	Luas lahan menurut jenis penggunaan lahan (1 km <sup>2</sup> =100 ha):	
a.	Lahan pertanian sawah ( <b>R1101a.1+R1101a.2</b> ) : .....	Ha <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>
1.	Lahan sawah irigasi : .....	Ha <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>
2.	Lahan sawah non irigasi (tadah hujan, pasang surut, rawa) : .....	Ha <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>
b.	Lahan pertanian non sawah (tegal/kebun, ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, perkebunan, peternakan, dll.) : .....	Ha <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>
c.	Lahan non pertanian (perumahan, industri, perkantoran, pertokoan, jalan, prasarana umum, lapangan, dll.) : .....	Ha <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>
XII. EKONOMI		
1201	a. Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) menurut jenis produk :	Jumlah
	1. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (tas, sepatu, sandal, ikat pinggang, dll)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	2. Industri furnitur dari kayu, rotan/bambu, plastik, logam (meja, kursi, tempat tidur, lemari, dll)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	3. Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya (teralis, pagar, sabit, pisau, parang, gunting, sendok, golok, dll)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	4. Industri tekstil (kain ulos, kain songket, kain tenun, dan percetakan batik, dll)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	5. Industri pakaian jadi (konveksi, pakaian, kemeja, rok, celana, mukena bordir)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	6. Industri barang galian bukan logam/industri gerabah/keramik/batu bata (genteng, batu bata, porselin, tegel, keramik, kaca patri, cangkir, guci, dll)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	7. Industri kayu, barang dari kayu, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (reng kayu, papan, anyaman tas dan tikar, kusen, dll)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	8. Industri makanan (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah, sayuran, minyak dan lemak, susu, dll)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	9. Industri minuman (minuman kemasan, air mineral, air isi ulang, sopi dll)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	10. Industri pengolahan tembakau (industri rokok, pengeringan dan perajangan tembakau)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	11. Industri kertas dan barang dari kertas (kantong kertas, post card, kardus, sak semen)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	12. Industri percetakan dan reproduksi media rekaman (buku, brosur, kartu nama, kalender, spanduk, dll)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	13. Industri alat angkutan lainnya (perahu, klotok, rakit, kursi roda, dll)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	14. Industri kerajinan dan lainnya (kerajinan tangan, mainan anak-anak, batu akik, perhiasan emas/imitasi,)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	15. Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan (las keliling, reparasi dinamo, reparasi mesin penggiling padi dll)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	16. Industri lainnya ..... (tuliskan)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
1202	a. 1. Jumlah Sentra Industri:	<input type="text"/> lokasi
	2. Tuliskan produk pada sentra industri yang mempunyai muatan usaha terbanyak .....(tuliskan)	
	b. Jumlah Lingkungan Industri Kecil (LIK):	<input type="text"/> lokasi
	c. Jumlah Perkampungan Industri Kecil (PIK):	<input type="text"/> lokasi
1203	a. Keberadaan produk barang unggulan/utama di desa/kelurahan: Ada -1 Tidak ada -2 → <b>R1204</b>	<input type="text"/>
	b. Produk barang unggulan/utama desa/kelurahan: (tuliskan)	(tuliskan)
	1. Makanan ..... 2.Non Makanan .....	
	c. Produk unggulan/utama desa/kelurahan ada yang diekspor ke negara lain: Ada, sebagian besar -1 Ada, sebagian kecil -2 Tidak ada -3	<input type="text"/>
1204	a. Keberadaan pangkalan/agen/penjual minyak tanah (termasuk penjual minyak tanah keliling): Ada -1 Tidak ada -2	<input type="text"/>
	b. Keberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling): Ada -1 Tidak ada -2	<input type="text"/>

Lanjutan Lampiran 1/ *Continued Appendix 1*

1205	a. Jumlah bank yang beroperasi di desa/kelurahan			
	1. Bank Umum Pemerintah (BRI, BNI, Mandiri, BPD, BTN)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	2. Bank Umum Swasta (BCA, Permata, Sinarmas, CIMB, dll)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
b. Jika tidak ada bank, perkiraan jarak ke bank terdekat : ..... , ... km	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
1206	a. Jumlah koperasi di desa/kelurahan yang masih aktif :			
	1. Koperasi Unit Desa (KUD) :	<input type="text"/>	unit	
	2. Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)/Usaha mikro	<input type="text"/>	unit	
	3. Koperasi Simpan Pinjam (KSP/Kospin)	<input type="text"/>	unit	
	4. Koperasi lainnya ..... (tuliskan)	<input type="text"/>	unit	
	b. Keberadaan toko/kios yang menjual sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, cangkul, dll.) di desa/kelurahan:			
	1. Milik KUD	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
2. Milik BUM Desa	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>	
3. Selain milik KUD/BUM Desa	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>	
1207	Fasilitas kredit yang diterima warga desa/kelurahan selama setahun terakhir:			
	a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	b. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPP-E)	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	c. Kredit Usaha Kecil (KUK)	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
1208	Keberadaan sarana penunjang ekonomi di desa/kelurahan			
	Jenis sarana penunjang ekonomi	Jumlah sarana	<i>Jika tidak ada sarana penunjang ekonomi (kolom (2) berkode 0), untuk mencapai sarana penunjang ekonomi terdekat</i>	
			Kemudahan untuk mencapai: 1. Sangat mudah 2. mudah 3. Sulit 4. Sangat sulit	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Agen Bank	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	d. Perusahaan Pembiayaan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	e. Pedagang Valuta Asing	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	f. Pergadaian	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	g. Agen Tiket/Travel/Biro Perjalanan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	h. Bengkel Mobil/Motor	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
i. Salon Kecantikan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	

Lanjutan Lampiran 1/ *Continued Appendix 1*

1209	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi di desa/kelurahan				
	Jenis sarana dan prasarana ekonomi	Jumlah	Jika tidak ada sarana ekonomi ( <b>kolom (2) berkode 0</b> ), untuk mencapai sarana ekonomi terdekat		
			Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai: 1. Sangat mudah 2. mudah 3. Sulit 4. Sangat sulit	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	a. Kelompok pertokoan (minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>	
	b. Pasar dengan bangunan permanen (memiliki atap, lantai, dan dinding)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>	
	c. Pasar dengan bangunan semi permanen (memiliki atap dan lantai, tanpa dinding)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>	
	d. Pasar tanpa bangunan (misalnya: pasar subuh, pasar terapung, dll.)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>	
	e. Jumlah minimarket/swalayan/supermarket (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan label harga, sistem pelayanan mandiri)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>	
	f. Restoran/rumah makan (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya dikenai pajak)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>	
g. Warung/kedai makanan minuman (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya tidak dikenai pajak)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>		
h. Hotel (menyediakan jasa akomodasi dan ada restoran, penginapan dengan izin usaha sebagai hotel)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>		
i. Penginapan: hostel/motel/losmen/wisma (menyediakan akomodasi, penginapan dengan izin usaha bukan sebagai hotel)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>		
j. Toko/warung kelontong (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang keperluan sehari-hari secara eceran, tanpa ada sistem pelayanan mandiri)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>		
<b>XIII. KEAMANAN</b>					
1301	a. Kejadian perkelahian massal di desa/kelurahan selama <b>setahun terakhir</b> : Ada - 1 Tidak ada - 2 → <b>R1303</b> <input type="checkbox"/>				
	b. Jika ada kejadian perkelahian massal, berikut ini keterangan jenis perkelahian massal, jumlah kejadian, dan keberadaan korban manusia selama <b>setahun terakhir</b> :				
	Jenis perkelahian massal	Jumlah kejadian	Jika ada perkelahian massal ( <b>kolom (2) tidak sama dengan 0</b> )		
			Korban manusia		Penyebab perkelahian
	Meninggal : Ada - 1 Tidak ada - 2	Luka-luka : Ada - 1 Tidak ada - 2			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Antar kelompok masyarakat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A B C D E F G
	2. Kelompok masyarakat antar desa/kelurahan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A B C D E F G
	3. Kelompok masyarakat dengan aparat keamanan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A B C D E F G
	4. Kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A B C D E F G
5. Pelajar/mahasiswa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A B C D E F G	
6. Antar suku	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A B C D E F G	
7. Lainnya ..... (tuliskan)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A B C D E F G	
<b>Kode kolom (5):</b> Pilihan boleh lebih dari satu.					
Harta - A Asmara - C Keramaian (olah raga, hiburan, dll) - E Lainnya - G Kekuasaan - B Ideologi/kepercayaan - D Ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan - F					



Lanjutan Lampiran 1/ *Continued Appendix 1*

1302	a. Perkelahian massal yang paling sering terjadi ( <b>R1301b kolom (2) yang isianannya paling banyak</b> ), apakah sudah diselesaikan/didamaikan?			<input type="checkbox"/>
	<i>Ya, semuanya</i> - 1	<i>Ya, sebagian</i> - 2	<i>Tidak</i> - 3	
1303	b. Upaya penyelesaian perkelahian massal dilakukan oleh: (Pilihan boleh lebih dari satu)			<input type="checkbox"/>
	<i>Aparat keamanan</i> - A	<i>Tokoh masyarakat</i> - C	<i>Lainnya</i> - E	
	<i>Aparat pemerintah</i> - B	<i>Tokoh agama</i> - D	<i>Tidak ada</i> - F	
1303	a. Tindak kejahatan yang terjadi di desa/kelurahan selama <b>setahun terakhir</b> :			
	Kode	Jenis tindak kejahatan	Kejadian Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada tindak kejahatan ( <b>kolom (3) berkode 1</b> ), kecenderungan tindak kejahatan dibanding setahun yang lalu Menurun - 1 Sama saja - 2 Meningkat - 3
	(1)	(2)	(3)	(4)
	01	Pencurian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	02	Pencurian dengan kekerasan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	03	Penipuan/penggelapan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	04	Penganiayaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	05	Pembakaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	06	Perkosaan/kejahatan terhadap kesucilaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	07	Penyalahgunaan/peredaran narkoba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	08	Perjudian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	09	Pembunuhan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10	Perdagangan orang ( <i>trafficking</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	11	Korupsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Dari berbagai kejadian tindak kejahatan ( <b>R1303a kolom (3) berkode 1</b> ), tindak kejahatan yang paling sering terjadi: ( <i>salin kode pada R1303a kolom (1)</i> )			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1304	Kegiatan warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan lingkungan di desa/kelurahan selama <b>setahun terakhir</b> :			
	a. Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan:	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>
	b. Pembentukan/pengaturan regu keamanan:	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>
	c. Penambahan jumlah anggota hansip/linmas:	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>
	d. Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan:	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>
	e. Pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga:	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>
1305	Jumlah anggota linmas/hansip di desa/kelurahan:			<input type="text"/> <input type="text"/> orang
1306	a. Keberadaan pos polisi (termasuk kantor polisi) di desa/kelurahan: <i>Ada</i> - 1 <i>Tidak ada</i> - 2 → <b>R1306c</b>			<input type="checkbox"/>
	b. Jumlah pos polisi (termasuk kantor polisi):			
	1. Digunakan:			<input type="text"/> unit
	2. Tidak digunakan:			<input type="text"/> unit
	→ <b>R1307</b>			
	c. Jika tidak ada pos polisi,			<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	1. Perkiraan jarak ke pos polisi (termasuk kantor polisi) terdekat (km):			<input type="text"/>
	2. Kemudahan untuk mencapai pos polisi (termasuk kantor polisi) terdekat:			<input type="checkbox"/>
	<i>Sangat mudah</i> - 1	<i>Mudah</i> - 2	<i>Sulit</i> - 3	<i>Sangat sulit</i> - 4

Lanjutan Lampiran 1/ *Continued Appendix 1*

1307	Jumlah korban bunuh diri dan pembunuhan selama <b>setahun terakhir</b> di desa/kelurahan:			
	Korban	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	
	(1)	(2)	(3)	
a. Bunuh diri (termasuk percobaan bunuh diri)	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
b. Pembunuhan (jika R1303a.09 kolom (3) berkode 1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
1308	a. Keberadaan lokasi berkumpul/mangkal anak jalanan (selain rumah singgah) di desa/kelurahan:	Ada - 1	Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>	
	b. Keberadaan tempat mangkal gelandangan/pengemis di desa/kelurahan:	Ada - 1	Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>	
1309	Keberadaan lokalisasi/lokasi/tempat mangkal Pekerja Seks Komersial (PSK) di desa/kelurahan:	Ada - 1	Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>	
<b>XIV. KEUANGAN DAN ASET DESA</b>				
<b>Blok ini akan terisi jika Blok III R 301, status pemerintahannya adalah Desa atau UPT/SPT atau Nagari (jika Blok III R301 berstatus Kelurahan maka langsung ke R1501)</b>				
1401	a. Keberadaan sistem informasi desa:	Ada, diperbaharui - 1	Ada, tidak diperbaharui - 2	Tidak ada - 3 <input type="checkbox"/>
	b. Jika ada (R1401a=1 atau 2), kapan terakhir diperbaharui bulan..... dan tahun.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Penggunaan sistem keuangan desa:	Ada, diperbaharui - 1	Ada, tidak diperbaharui - 2	Tidak ada - 3 <input type="checkbox"/>
1402	Apakah desa mempunyai PADES:	Ya - 1	Tidak - 2 <input type="checkbox"/>	
1403	Kepemilikan badan usaha dan aset desa:			<input type="checkbox"/> unit
	a. Jumlah unit usaha BUMDes:			<input type="checkbox"/>
	b. Tanah kas desa/ulayat	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	c. Tambatan perahu	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	d. Pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan yang dikelola desa, pelelangan hasil pertanian)	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	e. Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, lapangan olah raga, dll)	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	f. Hutan milik desa	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	g. Mata air milik desa	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	h. Tempat wisata/Pemandian umum	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	i. Aset lainnya milik desa (kekayaan asli desa, hibah/sumbangan/sejenisnya dll)	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
1404	a. 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berlaku:	Ada - 1	Tidak ada - 2	→ <b>R1404b</b> <input type="checkbox"/>
	2. Periode RPJM Desa yang berlaku tahun:	<input type="text"/>	hingga <input type="text"/>	
	b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2024:	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	c. Jumlah peraturan desa tahun 2023:			<input type="text"/> buah
	d. Jumlah peraturan kepala desa tahun 2023:			<input type="text"/> buah
1405	a. Keberadaan kerjasama antar desa tahun 2023:	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	b. Keberadaan kerjasama desa dengan pihak ketiga tahun 2023:	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
1406	Keberadaan pendamping lokal desa:	Ada, aktif - 1	Ada, tidak aktif - 2	Tidak ada - 3 <input type="checkbox"/>
1407	a. Keberadaan Kader Pembangunan Manusia (KPM):	Ada, aktif - 1	Ada, tidak aktif - 2	Tidak ada - 3 → <b>R1501</b> <input type="checkbox"/>
	b. Jika ada, apakah ada KPM yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota?	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>

XV. PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1501	Penggunaan Dana Desa pada tahun 2023: (ditanyakan untuk desa yang status pemerintahannya selain kelurahan)			
	Jenis bantuan/Kegiatan	Penyaluran Dana Desa dalam bentuk: Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika kol 2 berkode 1	
			Berapa jumlah keluarga	Nilai bantuan setiap per Keluarga? (Rupiah)
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Bantuan Langsung Tunai (Tiga Bulan Pertama)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Bantuan Langsung Tunai (Tiga Bulan kedua)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Padat Karya Tunai Desa..... orang	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1502	Paket layanan terkait stunting di desa selama tahun 2023:			
	1. Kegiatan posyandu:		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)/penyuluhan		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	b. Pelatihan kader		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	c. Insentif kader		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	d. Lain-lain		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	2. Kelas ibu hamil		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	3. Kelas ibu balita		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	4. PMT ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)/Resiko Tinggi (RESTI) dari keluarga miskin		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	5. Akses air minum aman		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	6. Akses jamban sehat		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	7. Jaminan Kesehatan untuk ibu hamil dari keluarga miskin		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	8. Jaminan Kesehatan untuk anak baduta dari keluarga miskin		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	9. Akta kelahiran untuk bayi dari keluarga miskin		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	10. Kelas pengasuhan		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	11. Pemanfaatan pekarangan keluarga dan tanah desa		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
1503	Keberadaan program kegiatan pembangunan masyarakat:			
	a. Sarana prasarana energi		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	b. Sarana prasarana sanitasi dan air bersih		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	c. Sarana prasarana penanggulangan bencana dan pelestarian alam		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
1504	Keberadaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat:			
	a. Pengembangan energi terbarukan		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	b. Pengelolaan lingkungan perumahan desa/kelurahan		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	c. Peningkatan kesadaran dalam pelestarian alam dan penanggulangan bencana		Ada - 1    Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>

Lanjutan Lampiran 1/Continued Appendix 1

XVI. KETERANGAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN					
1601	Keberadaan kepala desa/lurah dan sekretaris kepala desa/lurah:				
	Pemerintah desa/kelurahan	Keberadaan Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada pemerintah desa/kelurahan (kolom (2) berkode 1)		
			Umur (tahun)	Jenis kelamin Laki-laki - 1 Perempuan - 2	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan [kode]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Kepala Desa/Lurah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	*) Kode kolom (5) : Tidak pernah sekolah - 1 SMP/Sederajat - 4 Diploma IV/S1 - 7 Tidak tamat SD/Sederajat - 2 SMU/Sederajat - 5 S2 - 8 Tamat SD/Sederajat - 3 Akademi/DIII - 6 S3 - 9				
1602	Jumlah aparatur pemerintahan:				
	a. Sekretariat Desa/Kelurahan (kaur keuangan, dll)	<input type="checkbox"/>	c. Pelaksana Kewilayahan (Kadus, Ketua RT, dll)		<input type="checkbox"/>
	b. Pelaksana Teknis (kasi kesejahteraan, dll)	<input type="checkbox"/>	d. Pegawai Desa/Kelurahan lainnya (hansip, dll)		<input type="checkbox"/>
1603	a. Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2 → R1604 <input type="checkbox"/>				
	b. Jika ada (R1603a=1), apakah ada anggota yang perempuan: Ada - 1 Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>				
	c. Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan selama tahun 2023: <input type="checkbox"/>				
1604	a. Desa sudah menjalankan pemilihan kepala desa secara serentak: Ya - 1 Tidak - 2 → STOP <input type="checkbox"/>				
	b. Tahun terakhir pelaksanaan pemilihan kepala desa: <input type="checkbox"/>				
	c. Jumlah calon pemilihan kepala desa: <input type="checkbox"/>				
	d. Persentase perolehan suara pemenang pemilihan kepala desa: <input type="checkbox"/>				
XVII. CATATAN					



**ST 2023**  
SENSUS PERTANIAN

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Amanah  
Harmonis Loyal Adaptif Berprestasi

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# DATA

**MENCERDASKAN BANGSA**

*Enlighten The Nation*



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
BPS-STATISTICS KEPULAUAN RIAU PROVINCE**

Jl. A. Yani No. 21 Tanjungpinang 29124

Telp. (0771) 4500155

Homepage: <https://www.kepri.bps.go.id> Email: [bps2100@bps.go.id](mailto:bps2100@bps.go.id)